



**NEHAF SAU
BONOUT SAU**
MEMBANGUN
DENGAN HATI
MENYATUKAN
DALAM KASIH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)**



SORONG 2024



GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

JL. Kurana, Kel. Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Menurut Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga memberikan kewenangan yang luas bagi Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya masing-masing. Oleh sebab itu, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang di susun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sorong, 14 Juli 2025





GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

JL. Kurana, Kel. Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sorong, 14 Juli 2025



DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	v
NERACA	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	xi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiv
LAPORAN ARUS KAS	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	10
2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional	10
2.1.1 Tingkat Kemiskinan.....	11
2.1.2 Indek Gini (Gini Ratio).....	12
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	13

2.2 Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2.1 Inflasi	15
2.3 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat Daya	16
2.4 Kebijakan Keuangan	17
2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD	18
BAB III KHTISAR DAN HAMBATAN CAPAIAN KINERJA	26
3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan	26
3.2 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait <i>Mandatory Spending</i>	28
3.3 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Penanganan Prevalensi Stunting	39
3.4 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus	41
3.5 Regulasi Pemerintah Provinsi terkait Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas.....	42
3.6 Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran 2023.	42
3.7 Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja....	71
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	74
4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.....	74
4.1.1 Entitas Pelaporan	74
4.1.2 Entitas Akuntansi	74
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	75
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	76

4.3.1 Pendapatan LRA	76
4.3.2 Belanja.....	77
4.3.3 Transfer.....	77
4.3.4 Pembiayaan.....	78
4.3.5 Aset.....	78
4.3.6 Pengukuran/penilaian Aset :	78
4.3.7 Kewajiban	83
4.3.8 Pendapatan Lo	83
4.3.9 Beban	84
4.3.10 Kapitalisasi Aset Tetap	86
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	88
5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	88
5.1.1 PENDAPATAN	88
5.1.2 BELANJA.....	95
5.1.3 PEMBIAYAAN	102
5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	103
5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS NERACA DAERAH	104
5.3.1 ASET.....	104
5.3.2 KEWAJIBAN	184
5.3.3 EKUITAS.....	186
5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN OPERASIONAL	187
5.4.1 PENDAPATAN – LO.....	187
5.4.2 BEBAN- LO.....	191

5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN	
ARUS KAS	196
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	197
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ <i>Investasi Non Keuangan</i>	197
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ <i>Pembiayaan</i>	198
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ <i>Non Anggaran</i>	198
5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN	
PERUBAHAN EKUITAS	198
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON	
KEUANGAN SKPD	200
6.1 Kondisi Umum Provinsi Papua Barat Daya	200
6.2 Kondisi Umum Provinsi Papua Barat Daya	201
BAB VII PENUTUP.....	204
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat Daya	11
Tabel 2.2 Gini Ratio Provinsi Papua Barat Daya	12
Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota	13
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya	15
Tabel 2.5 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Barat Daya	16
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota	17
Tabel 2.7 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota	17
Tabel 2.8 Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2024	19
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Berdasarkan Klasifikasi Per Organisasi.....	26
Tabel 3.2 Belanja Urusan Pendidikan.....	31
Tabel 3.3 Belanja Infrastruktur Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ...	37
Tabel 3.4 Belanja Infrastruktur Daerah	38
Tabel 3.5 Prevalensi Stunting berdasarkan data e-PPGBM per Desember 2024	39
Tabel 3.6 Realisasi untuk penurunan Prevalensi Stunting Provinsi Papua Barat Daya	40
Tabel 3.7 Dana Otsus Yang Bersifat Umum	43
Tabel 3.8 Dana Otsus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya.....	53
Tabel 3.9 Dana Tambahan Infrastruktur	66
Tabel 3.10 Dana Tambahan Migas Otsus	70
Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah	89
Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah	89
Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak	90
Tabel 5.4 Lain-lain Penerimaan PAD yang Sah.....	91
Tabel 5.5 Pendapatan Transfer	92

Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	92
Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	93
Tabel 5.8 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah.....	94
Tabel 5.9 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2024	96
Tabel 5.10 Belanja Operasi	96
Tabel 5.11 Belanja Pegawai	97
Tabel 5.12 Belanja Barang Jasa	98
Tabel 5.13 Belanja Hibah.....	99
Tabel 5.14 Belanja Bantuan Sosial	99
Tabel 5.15 Belanja Modal	100
Tabel 5.16 Belanja Transfer.....	101
Tabel 5.17 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	102
Tabel 5.19 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	104
Tabel 5.20 Saldo Per 31 Desember 2024 Pada Rekening Kas Provinsi Papua Barat Daya	105
Tabel 5.21 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	107
Tabel 5.22 Kas Dana BOS.....	109
Tabel 5.23 Jasa Giro per 31 Desember 2024	109
Tabel 5.24 Kas di Rekening Penampung.....	110
Tabel 5.26 Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 Menurut Jenis	113
Tabel 5.27 Rincian Mutasi Aset Tetap Menurut Objek Per 31 Desember 2024	114
Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024.....	115
Tabel 5.29 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024.....	125
Tabel 5.30 Rincian saldo akhir Tanah.....	126
Tabel 5.31 Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Tanah tambah kurang	127
Tabel 5.32 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 ...	129

Tabel 5.33 Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	130
Tabel 5.34 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	131
Tabel 5.35 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	144
Tabel 5.36 Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD Per 31 Desember 2024	145
Tabel 5.37 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	146
Tabel 5.38 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	153
Tabel 5.39 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi OPD Per 31 Desember 2024	154
Tabel 5.40 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 Per 31 Desember 2024	155
Tabel 5.41 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024	161
Tabel 5.42 Rincian saldo akhir Aset Tetap Lainnya OPD Per 31 Desember 2024	161
Tabel 5.43 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024	162
Tabel 5.44 Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan Per 31 Desember 2024	165
Tabel 5.45 Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan OPD Per 31 Desember 2024	165
Tabel 5.46 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan Per 31 Desember 2024	166
Tabel 5.47 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	169
Tabel 5.48 Nilai Akumulasi Penyusutan Per OPD Tahun 2024	171
Tabel 5.49 Rincian Penyesuaian Perhitungan Penyusutan Saldo Awal Aset Tetap Saldo Awal Aset Tetap	172
Tabel 5.50 Rincian Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024	174
Tabel 5.51 Aset Lainnya OPD Per 31 Desember 2024.....	174

Tabel 5.52 Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024	175
Tabel 5.53 Rincian OPD Penyesuaian Perhitungan Amortisasi Saldo Awal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	177
Tabel 5.54 Rincian Saldo Awal Penyesuaian Perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lainnya	177
Tabel 5.55 Nilai Perolehan Saldo Akhir Aset Lainnya pada Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	178
Tabel 5.56 Rincian Akumulasi Amortisasi Per OPD per 31 Desember 2024	180
Tabel 5.57 Tuntutan Ganti kerugian Daerah per 31 Desember 2024 ...	181
Tabel 5.58 Aset Tidak Berwujud	182
Tabel 5.59 Nilai Aset Tidak Berwujud Berupa Software Per OPD	183
Tabel 5.60 Nilai Aset Tidak Berwujud Berupa Kajian Per OPD	183
Tabel 5.61 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	184
Tabel 5.62 Kewajiban per 31 Desember 2024	184
Tabel 5.63 Utang Belanja	186
Tabel 5.64 Ekuitas Dana.....	187
Tabel 5.65 Pendapatan Asli Daerah	188
Tabel 5.66 Pendapatan Pajak Daerah – LO	188
Tabel 5.67 Lain-lain PAD Yang Sah – LO.....	189
Tabel 5.68 Pendapatan Transfer	189
Tabel 5.69 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024	190
Tabel 5.70 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO.....	190
Tabel 5.71 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024	191
Tabel 5.72 Beban Operasi	192
Tabel 5.73 Beban Pegawai.....	192
Tabel 5.74 Beban Barang dan Jasa.....	193
Tabel 5.75 Beban Hibah	194

Tabel 5.76 Beban Bantuan Sosial.....	194
Tabel 5.77 Beban Penyusutan dan Amortisasi	195
Tabel 5.78 Beban Transfer	196
Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Daya	200



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas	1.1.01.	555.375.023.682,77	567.783.046.655,38
4	Kas di Kas Daerah		534.584.389.197,77	553.536.424.831,99
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.163.666.045,00	108.510.356,00
	Kas di BLUD		12.297.316.800,00	-
	Kas Dana BOS		11.674.239,00	-
6	Kas Lainnya		5.317.977.401,00	14.138.111.467,39
	Piutang Pajak Daerah	1.1.03.	1.678.646.600,00	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.1.06.	252.849.400,00	
	Penyisihan Piutang	1.1.10.	(1.857.681.150,00)	
7	Persediaan	1.1.12.	91.807.621.683,99	40.968.272.754,00
8	JUMLAH ASET LANCAR	1.1	647.256.460.216,76	608.751.319.409,38
9				
10	ASET TETAP			
11	Tanah	1.3.01.	88.820.519.844,95	3.648.235.655,00
12	Peralatan dan Mesin	1.3.02.	182.212.652.117,42	70.620.798.374,90
13	Gedung dan Bangunan	1.3.03.	244.927.263.932,55	42.216.423.663,81
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.3.04.	1.118.927.063.907,21	471.194.098.450,88
15	Aset Tetap Lainnya	1.3.05.	7.550.098.300,00	5.282.313.300,00
16	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.3.06.	110.219.000.481,00	88.741.494.650,00
17	Akumulasi Penyusutan	1.3.07	(186.576.315.446,32)	(16.329.881.905,00)
18	JUMLAH ASET TETAP	1.3.	1.566.080.283.136,81	665.373.482.189,59
19				
20	ASET LAINNYA			
21	Tagihan Jangka Panjang	1.5.01.	54.210.508.954,40	35.102.349.471,00
	Aset Lain-lain	1.5.04.	4.997.368.000,00	-
22	Aset Tidak Berwujud	1.5.03.	14.199.721.978,00	3.247.661.978,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05.	(644.735.817,11)	-
23	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.5.07.	1.902.017.000,00	13.966.179.081,00
24	JUMLAH ASET LAINNYA	1.5.	74.664.880.115,29	52.316.190.530,00
25				
26	JUMLAH ASET		2.288.001.623.468,86	1.326.440.992.128,97
27				
28	KEWAJIBAN			
29	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
30	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	2.1.01.	3.601.367.483,00	2.246.787.857,00
31	Utang Belanja	2.1.06.	55.464.814.514,00	3.773.811.369,00
32	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.1.	59.066.181.997,00	6.020.599.226,00
33				
34	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
35	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
36	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
37	JUMLAH KEWAJIBAN	2.	59.066.181.997,00	6.020.599.226,00
38				
39	EKUITAS			
40	Ekuitas	3.1.01.	2.228.935.441.471,86	1.320.420.392.902,97
	Ekuitas SAL	3.1.02.		-
41	JUMLAH EKUITAS DANA	5.3.3	2.228.935.441.471,86	1.320.420.392.902,97
42	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.288.001.623.468,86	1.326.440.992.128,97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	4. PENDAPATAN DAERAH					
2	4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
3	4.1.01. Pajak Daerah		216.215.480.367,00	237.540.712.232,00	109,86	70.686.128.349,00
4	4.1.04. Lain-lain PAD Yang Sah		46.574.155.073,00	68.431.512.152,02	146,93	4.232.890.597,00
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 4)	5.1.1.1	262.789.635.440,00	305.972.224.384,02	116,43	74.919.018.946,00
6						
7	4.2. PENDAPATAN TRANSFER					
8	4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.765.220.920.000,00	1.755.247.396.624,00	99,43	2.701.650.000.000,00
9	Jumlah Pendapatan Transfer (8 s.d. 8)	5.1.1.2	1.765.220.920.000,00	1.755.247.396.624,00	99,43	2.701.650.000.000,00
10						
11	4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
12	4.3.01. Pendapatan Hibah		31.476.400.000,00	29.732.239.968,00	94,46	35.592.800.000,00
	4.3.03. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan		0,00	11.674.239,00		
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (12 s.d. 12)	5.1.1.3	31.476.400.000,00	29.743.914.207,00	94,46	35.592.800.000,00
14	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 15 + 25)	5.1.1	2.059.486.955.440,00	2.090.963.535.215,02	101,53	2.812.161.818.946,00
15	5. BELANJA DAERAH					
16	5.1. BELANJA OPERASI					
17	5.1.01. Belanja Pegawai		272.184.333.089,00	174.108.765.199,58	63,97	39.229.727.507,00
18	5.1.02. Belanja Barang dan Jasa		908.903.685.650,00	715.046.945.112,99	78,67	683.600.039.505,88
19	5.1.05. Belanja Hibah		317.791.751.600,00	281.265.924.433,00	88,51	155.122.145.373,86
20	5.1.06. Belanja Bantuan Sosial		53.145.840.000,00	26.359.900.000,00	49,60	47.421.860.000,00
21	Jumlah Belanja Operasi (17 s.d. 20)	5.1.2.1	1.552.025.610.339,00	1.196.781.534.745,57	77,11	925.373.772.386,74
22						
23	5.2. BELANJA MODAL					
24	5.2.01. Belanja Modal Tanah		46.352.228.684,00	43.659.119.434,00	94,19	3.648.235.655,00
25	5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		91.188.020.494,00	77.635.099.069,00	85,14	67.282.415.460,00
26	5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		43.820.577.585,00	36.008.318.942,60	82,17	119.813.080.250,00
27	5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		548.644.372.031,00	502.360.025.075,95	91,56	465.053.143.891,88
28	5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		3.298.483.680,00	139.000.000,00	4,21	5.753.969.707,00
	5.2.06. Belanja Modal Aset Lainnya		2.296.353.250,00	1.888.887.000,00	82,26	
29	Jumlah Belanja Modal (24 s.d. 28)	5.1.2.2	735.600.035.724,00	661.690.449.521,55	89,95	661.550.844.963,88
30						
31	5.3. BELANJA TAK TERDUGA					
32	5.3.01. Belanja Tak Terduga		27.945.150.125,00	1.315.000.000,00	4,71	2.650.000.000,00
33	Jumlah Belanja Tak Terduga (33 s.d. 33)	5.1.2.3	27.945.150.125,00	1.315.000.000,00	4,71	2.650.000.000,00
34						
35	5.4. BELANJA TRANSFER					
36	5.4.01. Belanja Bagi Hasil		170.380.280.584,00	166.140.594.911,08	97,51	8.384.011.153,00
37	5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan		127.072.303.500,00	67.951.962.558,00	53,48	664.556.142.600,00
38	Jumlah Belanja Transfer (36 s.d. 37)	5.1.2.4	297.452.584.084,00	234.092.557.469,08	78,70	672.940.153.753,00
39	JUMLAH BELANJA (29 + 33 + 38)	5.1.2	2.613.023.380.272,00	2.093.879.541.736,20	80,13	2.262.514.771.103,62
40						
41						
42	LUS / (DEFISIT) (14 - 39)		(553.536.424.832,00)	(2.916.006.521,18)	0,53	549.647.047.842,38
43						
44	6. PEMBIAYAAN DAERAH					
45						
46	6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
47	6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		553.536.424.832,00	554.689.662.720,95	100,21	5.000.410.956,00
48	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (47 s.d. 47)		553.536.424.832,00	554.689.662.720,95	100,21	5.000.410.956,00
49						
50	6.2. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN					
51	-					
52	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (51 s.d. 51)	5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PIAYAAN NETTO (48 - 52)		553.536.424.832,00	554.689.662.720,95	100,21	5.000.410.956,00
54						
55	PGRAN (SILPA) (42 + 53)		0,00	551.773.656.199,77	0,00	554.647.458.798,38

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		554.647.458.798,38	5.000.410.956,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		554.689.662.720,95	5.000.410.956,00
3	Sub Total		-42.203.922,57	0
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		551.773.656.199,77	554.647.458.798,38
5	Sub Total		551.773.656.199,77	554.647.458.798,38
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		42203922,57	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2	551.773.656.199,77	554.647.458.798,38

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN DAERAH-LO					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	1237.523.287.632,00	70.686.128.349,00	166.837.159.283,00	70,24%
5	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.2	60.919.008.956,02	4.232.890.597,00	56.686.118.359,02	93,05%
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 4)	5.4.1.1	298.442.296.588,02	74.919.018.946,00	223.523.277.642,02	74,90%
7	PENDAPATAN TRANSFER					
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.4.1.2	1.744.714.515.603,00	2.715.616.179.081,00	(970.901.663.478,00)	(55,65%)
9	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (8 s.d. 8)		1.744.714.515.603,00	2.715.616.179.081,00	(970.901.663.478,00)	(55,65%)
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
11	Pendapatan Hibah	5.4.1.3	29.732.239.968,00	35.592.800.000,00	(5.860.560.032,00)	(19,71%)
12	Jumlah Pendapatan Hibah (21 s.d. 21)		29.732.239.968,00	35.592.800.000,00	(5.860.560.032,00)	(19,71%)
13	JUMLAH PENDAPATAN (5 + 12 + 22)	5.4.1	2.072.889.052.159,02	2.826.127.998.027,00	(753.238.945.867,98)	(36,34%)
14						
15						
16	BEBAN					
17	BEBAN OPERASI					
18	Beban Pegawai	5.4.2.1	172.974.933.199,58	39.038.392.507,00	133.936.540.692,58	77,43%
19	Beban Barang dan Jasa		725.088.020.507,78	593.800.663.207,17	131.287.357.300,61	18,11%
20	Beban Hibah		263.802.583.035,07	155.598.294.707,86	108.204.288.327,21	41,02%
21	Beban Bantuan Sosial		37.101.600.000,00	30.350.630.000,00	6.750.970.000,00	18,20%
22	Beban Penyisihan Piutang		1.857.681.150,00	0,00	1.857.681.150,00	100,00%
23	Jumlah Beban Operasi (18 s.d. 21)		1.200.824.817.892,43	818.787.980.422,03	382.036.837.470,40	31,81%
24	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
25	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2	30.566.743.941,75	4.259.413.264,00	26.307.330.677,75	86,07%
26	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		28.809.989.336,34	144.846.738,00	28.665.142.598,34	99,50%
27	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		107.413.224.028,12	11.893.653.112,00	95.519.570.916,12	88,93%
28	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		3.456.476.235,11	31.968.791,00	3.424.507.444,11	99,08%
29	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		644.735.817,11	0,00	644.735.817,11	100,00%
30	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (25 s.d. 28)		170.891.169.358,43	16.329.881.905,00	154.561.287.453,43	90,44%
31	BEBAN TRANSFER					
32	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3	166.140.594.911,08	8.384.011.153,00	157.756.583.758,08	94,95%
33	Beban Bantuan Keuangan		110.677.268.783,00	664.556.142.600,00	(553.878.873.817,00)	(500,45%)
34	Jumlah Beban Transfer (32 s.d. 33)		276.817.863.694,08	672.940.153.753,00	(396.122.290.058,92)	(143,10%)
35	BEBAN TAK TERDUGA					
48	Beban Tak Terduga	5.4.2.4	1.315.000.000,00	2.650.000.000,00	(1.335.000.000,00)	(101,52%)
49	Jumlah Beban Luar Biasa (49 s.d 49)		1.315.000.000,00	2.650.000.000,00	(1.335.000.000,00)	(101,52%)
50	JUMLAH BEBAN (22 + 29 + 34 + 50)	5.4.2	1.649.848.850.944,94	1.510.708.016.080,03	139.140.834.864,91	8,43%
51	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (14 - 51)		423.040.201.214,08	1.315.419.981.946,97	(892.379.780.732,89)	(210,94%)
52	SURPLUS/DEFISIT-LO (52 s.d 52)	5.4	423.040.201.214,08	0,00	423.040.201.214,08	100,00%
53						

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
1	EKUITAS AWAL		1.320.420.392.902,97	5.000.410.956,00
	RK SKPD		0,00	0,00
	RK PPKD		0,00	0,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		423.040.201.214,08	1.315.419.981.946,97
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
	Koreksi Nilai Persediaan		69.241.440.750,49	0,00
	Koreksi Nilai Aset Tetap		414.102.151.881,75	0,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya		150.000.000,00	0,00
	Koreksi Nilai Aset Lancar		1.981.254.722,57	0,00
4	JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.6	2.228.935.441.471,86	1.320.420.392.902,97

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
1				
2	<i>Arus Kas Masuk</i>			
3	Pajak Daerah		237.540.712.232,00	70.686.128.349,00
4	Retribusi Daerah		-	-
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah		68.431.512.152,02	4.232.890.597,00
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.755.247.396.624,00	66.441.281.000,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah		,00	1.065.085.823.000,00
9	Pendapatan Hibah		29.732.239.968,00	613.266.787.000,00
10	Dana Darurat		,00	352.692.000,00
11	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		11.674.239,00	956.503.417.000,00
12	Dana Penyesuaian		-	-
17	Penerimaan Lainnya		-	-
18	<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		2.090.963.535.215,02	2.776.569.018.946,00
20	<i>Arus Kas Keluar</i>			
21	Belanja Pegawai		174.108.765.199,58	39.229.727.507,00
22	Belanja Barang dan Jasa		715.046.945.112,99	683.600.039.505,88
23	Belanja Bunga		-	-
24	Belanja Subsidi		-	-
25	Belanja Hibah		281.265.924.433,00	155.122.145.373,86
26	Belanja Bantuan Sosial		26.359.900.000,00	47.421.860.000,00
27	Belanja Bantuan Keuangan		67.951.962.558,00	664.556.142.600,00
28	Belanja Tidak Terduga		1.315.000.000,00	2.650.000.000,00
29	Belanja Bagi Hasil		166.140.594.911,08	8.384.011.153,00
30	Jumlah Arus Keluar Kas		1.432.189.092.214,65	1.600.963.926.139,74
31	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>	5.5.1	658.774.443.000,37	1.175.605.092.806,26
32	<i>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>			
33	<i>Arus Kas Masuk</i>			
34	Pendapatan Penjualan Atas Tanah		-	-
35	Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		-	-
36	Pendapatan Penjualan Atas Bangunan dan Gedung		-	-
37	Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
38	Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		-	-
39	Pendapatan Penjualan Atas Aset Lainnya		-	-
40	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
41	<i>Arus Kas Keluar</i>			
42	Belanja Tanah		43.659.119.434,00	3.648.235.655,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin		77.635.099.069,00	67.282.415.460,00
44	Belanja Bangunan dan Gedung		36.008.318.942,60	119.813.080.250,00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		502.360.025.075,95	465.053.143.891,88
46	Belanja Aset Tetap Lainnya		139.000.000,00	5.753.969.707,00
47	Belanja Aset Lainnya		1.888.887.000,00	-
48	Jumlah Arus Keluar Kas		661.690.449.521,55	661.550.844.963,88
49	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</i>	5.5.2	(661.690.449.521,55)	(661.550.844.963,88)
50	<i>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembayaran</i>			
51	<i>Arus Kas Masuk</i>			
52	Pencairan Dana Cadangan		-	-
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
54	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
55	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah		-	-
56	Penerimaan piutang daerah		-	-
57	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
58	<i>Arus Kas Keluar</i>			
59	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
60	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
61	Pembayaran Pokok Utang		-	-
62	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
63	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
64	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	5.5.3	-	-
65	<i>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</i>			
66	<i>Arus Kas Masuk</i>			
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)		113.031.200.593,00	109.444.258.589,73
69	Jumlah Arus Masuk Kas		113.031.200.593,00	109.444.258.589,73
70	<i>Arus Kas Keluar</i>			

NO	URAIAN	REF CALK	2024	2023
71	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		122.565.420.967,00	96.308.670.732,73
73	Jumlah Arus Keluar Kas		122.565.420.967,00	96.308.670.732,73
74	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	5.5.4	(9.534.220.374,00)	13.135.587.857,00
75	Kenaikan / Penurunan Kas		(12.450.226.895,18)	527.189.835.699,38
96	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya		567.783.046.655,38	5.000.410.956,00
97	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya		555.332.819.760,20	532.190.246.655,38
	Saldo Kas Lainnya (Selain BUD)		-	-
	Koreksi Silpa Tahun Lalu		42.203.922,57	-
98	Kas Di Bendahara Penerimaan		-	-
99	Saldo Akhir Kas	5.5.5	555.375.023.682,77	532.190.246.655,38

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada prinsipnya adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan saldo anggaran lebih awal dan penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang diperbandingkan dengan perubahan SAL pada periode sebelumnya;
- c) Neraca menyajikan aset, utang dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya;



- d) Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban operasional tahun berjalan yang diperbandingkan dengan pendapatan dan beban operasional periode sebelumnya;
- e) Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan posisi ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Untuk memudahkan dalam memahami Laporan Keuangan maka dibuat catatan atas laporan keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya selama satu periode tahun anggaran 2024.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2024). Yaitu membandingkan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, dengan anggaran yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui Sisa Perhitungan Tahun Anggaran berkenaan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- e. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
- p. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 01 Tahun 2024 tentang Sistem dan prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;



- q. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 34 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- r. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 17 Tahun 2024 Tanggal 8 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang memadai bagi pembaca laporan keuangan dalam menelaah data kuantitatif yang disajikan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, selain pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, Catatan atas Laporan Keuangan juga meliputi gambaran ekonomi makro secara regional yang digunakan dalam membuat kebijakan keuangan dan merealisasikan kinerja dari alokasi anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan juga menguraikan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan disertai pengungkapan yang cukup atas pos-pos laporan keuangan. Terakhir juga diungkapkan informasi non keuangan yang mempengaruhi interpretasi penyajian laporan keuangan.

Secara rinci sistematika Catatan atas Laporan Keuangan disusun per bab mencakup:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran 2024.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Memuat penjelasan mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya yang didasarkan pada beberapa kategori seperti jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

2.3 Struktur Ekonomi

Memuat penjelasan mengenai sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada PDRB Provinsi Papua Barat Daya.

2.4 Kebijakan keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.5 Pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah.

Bab III Ikhtisar Capaian dan Hambatan Kinerja Keuangan



3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

3.2 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait *Mandatory Spending*

3.3 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Penanganan Prevalensi Stunting

3.4 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus

3.5 Regulasi Pemerintah Provinsi terkait Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas

3.6 Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran 2023

3.7 Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

4.2 Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana).

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan sebagai berikut:

5.1 LRA

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Surplus/Defisit;
- d. Penerimaan Pembiayaan;
- e. Pengeluaran Pembiayaan.

5.2 LPSAL

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Saldo anggaran lebih awal;
- b. Penggunaan SAL pada penerimaan pembiayaan awal;
- c. Saldo anggaran lebih akhir.

5.3 Neraca

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

5.4 LO

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Pendapatan operasional
- b. Beban operasional
- c. Surplus/defisit operasional

5.5 LAK

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Arus kas aktivitas operasi
- b. Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan
- c. Arus kas aktivitas pembiayaan
- d. Arus kas aktivitas on anggaran

5.6 LPE

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos-pos yang terdiri atas:

- a. Saldo ekuitas awal
- b. Surplus/defisit kegiatan operasional
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan yaitu domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkiraan makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya (Provinsi Papua Barat Daya Dalam Angka 2023) dimana Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, yaitu:Tingkat Kemiskinan sebesar 16,95%;

- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,48%;
- Gini Ratio sebesar 0,346;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,65;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,60%;
- Tingkat Inflasi sebesar 1,28%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp37.040,34 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp24.873,72 miliar.



2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat Daya periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Kabupaten Sorong Selatan	3.01	2.81	-0.20
2	Kabupaten Sorong	4.58	1.96	2.62
3	Kabupaten Raja Ampat	3.97	1.36	2.61
4	Kabupaten Tambrauw	1.30	1.52	-0.22
5	Kabupaten Maybrat	4.24	3.56	0.68
6	Kota Sorong	9.86	9.85	0.01

Sumber Dokumen: BPS Papua Barat Daya

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,48%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,53



% atau lebih kecil dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024.

Dengan demikian TPT Provinsi Papua Barat Daya, turun sebesar 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023.

2.1.2 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a) Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b) Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya, Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 0,346 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Gini Ratio Provinsi Papua Barat Daya

No	Provinsi	Rasio Gini Provinsi Papua Barat Daya	
		2023	2024
1	Provinsi Papua Barat Daya	0,346	0,262

Sumber Dokumen: BPS Papua Barat



Pada Tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Papua Barat Daya yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,262. Angka ini menurun 0,084 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 sebesar 0,346.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a) Rendah (<60);
- b) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dimana nilai hitungan IPM pada daerah di Provinsi Papua Darat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 65,53 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Nilai tersebut lebih tinggi 0.78 dibanding Tahun 2022.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Kab. Sorong Selatan	64.54	63.94	0.6
2	Kab. Sorong	69.69	67.49	2.2
3	Kab. Raja Ampat	66.60	65.26	1.34
4	Kab. Tambrauw	58.31	55.55	2.76



5	Kab. Maybrat	61.83	60.49	1.34
6	Kota Sorong	80.55	79.65	0.9

Sumber Dokumen: BPS Papua Barat

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 65,53 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 65,26 poin mengalami kenaikan sebesar 0,63 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 66,46 tahun pada Tahun 2023, lebih lama dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah 7,84 tahun dengan harapan lama sekolah 13,21 tahun. IPM di Provinsi Papua Barat Daya 65,89 pada saat ini berada pada urutan 33 untuk peringkat nasional (Indonesia).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Provinsi			Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,01	2,49	3,60	5,03

Sumber Dokumen: BPS Papua Barat

Selama kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 perekonomian Provinsi Papua Barat Daya mengalami kenaikan. Pada periode Tahun 2022 – Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,59% dan pada kurun waktu Tahun 2023 hingga Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,11%. Dalam skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya menempati urutan 34 dari laju pertumbuhan Provinsi di wilayah Indonesia.

2.2.1 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat.



Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi** (*hyper inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar- besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional Tingkat Inflasi Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 adalah sebesar 3,87% dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Barat Daya

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun%)
1.	Tingkat Inflasi Provinsi	2.60	1.87	0.73%
2.	Tingkat Inflasi Nasional	2.61	1.57	1.04%

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Papua Barat

Tingkat inflasi di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2.60%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 1.87% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Dengan demikian inflasi Provinsi Papua Barat Daya masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1.57%.

2.3 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Barat Daya

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat Daya dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota PBD	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya (Juta Rupiah)
		2024
1.	Kabupaten Raja Ampat	2.879,52
2.	Kabupaten Sorong	9.453,33
3.	Kabupaten Sorong Selatan	100,00
4.	Kabupaten Maybrat	863.407,90
5.	Kabupaten Tambrauw	304,95
6.	Kota Sorong	10.522,31

Sumber Dokumen: BPS Papua Barat

Tabel 2.7 PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (Juta Rupiah)	
		2023	2024
1.	Kabupaten Raja Ampat	4.167.515,52	2.105.325,19
2.	Kabupaten Sorong	12.028.146,37	12.449,80
3.	Kabupaten Sorong Selatan	2.251.435,17	4.066.131,85
4.	Kabupaten Maybrat	811.625,30	255.922,23
5.	Kabupaten Tambrauw	272.590,81	783.841,62
6.	Kota Sorong	16.828.674,33	16.173.580,24

Sumber Dokumen: BPS Papua Barat

2.4 Kebijakan Keuangan

Terkait kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 tidak terdapat kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dapat berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Arus Kas tahun 2024.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.5 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 2.8 Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2024

KODE_SKPD	NAMA_UNIT	PAGU	REALISASI	PERSEN	SISA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.096.484.035.719,00	897.531.753.509,60	81,85	198.952.282.209,40
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	285.410.008.618,00	216.196.126.971,60	75,74	69.213.881.646,40
1.01.2.22.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.410.008.618,00	216.196.126.971,60	75,74	69.213.881.646,40
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	113.980.803.836,00	74.199.557.949,00	65,09	39.781.245.887,00
1.02.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.980.803.836,00	74.199.557.949,00	65,09	39.781.245.887,00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	597.224.967.477,00	537.192.291.964,00	89,94	60.032.675.513,00
1.03.1.04.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	597.224.967.477,00	537.192.291.964,00	89,94	60.032.675.513,00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.700.000.000,00	6.602.977.000,00	98,55	97.023.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.700.000.000,00	6.602.977.000,00	98,55	97.023.000,00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.693.934.683,00	18.234.043.115,00	88,11	2.459.891.568,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.05.00.0.00.01.0000.	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	20.693.934.683,00	18.234.043.115,00	88,11	2.459.891.568,00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	72.474.321.105,00	45.106.756.510,00	62,23	27.367.564.595,00
1.06.2.08.0.00.01.0000.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	72.474.321.105,00	45.106.756.510,00	62,23	27.367.564.595,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	308.774.506.363,00	234.558.389.650,00	75,96	74.216.116.713,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.796.598.082,00	26.015.076.301,00	84,47	4.781.521.781,00
2.07.3.32.3.29.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	30.796.598.082,00	26.015.076.301,00	84,47	4.781.521.781,00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.164.000.300,00	3.319.846.570,00	79,72	844.153.730,00
1.06.2.08.0.00.01.0000.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.164.000.300,00	3.319.846.570,00	79,72	844.153.730,00
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.200.000.000,00	1.166.565.758,00	97,21	33.434.242,00
3.27.2.09.3.25.01.0000.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	1.200.000.000,00	1.166.565.758,00	97,21	33.434.242,00
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	39.628.783.554,00	39.056.058.834,00	98,55	572.724.720,00
2.11.3.28.2.10.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	37.628.783.554,00	37.061.058.834,00	98,49	567.724.720,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4.01.00.0.00.01.0000.	Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00	1.995.000.000,00	99,75	5.000.000,00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.164.106.929,00	17.591.821.374,00	64,76	9.572.285.555,00
2.11.3.28.2.10.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahanan	27.164.106.929,00	17.591.821.374,00	64,76	9.572.285.555,00
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.746.213.700,00	9.697.527.089,00	82,55	2.048.686.611,00
2.12.2.13.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	11.746.213.700,00	9.697.527.089,00	82,55	2.048.686.611,00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.229.219.040,00	10.053.796.040,00	98,28	175.423.000,00
2.12.2.13.0.00.01.0000.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	10.229.219.040,00	10.053.796.040,00	98,28	175.423.000,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.500.000.000,00	3.491.161.594,00	99,74	8.838.406,00
1.02.2.14.0.00.01.0000.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.500.000.000,00	3.491.161.594,00	99,74	8.838.406,00
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	82.101.722.375,00	49.265.657.706,00	60,00	32.836.064.669,00
2.15.00.0.00.01.0000.	Dinas Perhubungan	82.101.722.375,00	49.265.657.706,00	60,00	32.836.064.669,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.841.693.915,00	21.538.278.136,00	74,67	7.303.415.779,00
2.16.2.20.2.21.01.0000.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	28.841.693.915,00	21.538.278.136,00	74,67	7.303.415.779,00
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DANMENENGAH	19.281.851.754,00	9.905.518.645,00	51,37	9.376.333.109,00
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	19.281.851.754,00	9.905.518.645,00	51,37	9.376.333.109,00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	14.666.514.854,00	11.413.080.754,00	77,81	3.253.434.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.666.514.854,00	11.413.080.754,00	77,81	3.253.434.100,00
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.953.801.860,00	27.967.057.234,00	90,35	2.986.744.626,00
2.19.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	30.953.801.860,00	27.967.057.234,00	90,35	2.986.744.626,00
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.500.000.000,00	4.076.943.615,00	90,59	423.056.385,00
1.01.2.22.0.00.01.0000.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.500.000.000,00	4.076.943.615,00	90,59	423.056.385,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	155.105.572.125,00	131.282.337.600,95	84,64	23.823.234.524,05
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.466.364.603,00	37.745.145.820,00	81,23	8.721.218.783,00
3.27.2.09.3.25.01.0000.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	46.466.364.603,00	37.745.145.820,00	81,23	8.721.218.783,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.980.695.900,00	11.069.596.368,00	92,39	911.099.532,00
2.19.3.26.0.00.01.0000.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	11.980.695.900,00	11.069.596.368,00	92,39	911.099.532,00
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	24.046.199.332,00	21.243.803.580,00	88,34	2.802.395.752,00
3.27.2.09.3.25.01.0000.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	24.046.199.332,00	21.243.803.580,00	88,34	2.802.395.752,00
3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	8.843.787.980,00	7.516.001.838,00	84,98	1.327.786.142,00
2.11.3.28.2.10.01.0000.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	8.843.787.980,00	7.516.001.838,00	84,98	1.327.786.142,00
3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.831.796.674,00	41.157.401.464,95	91,80	3.674.395.209,05
2.07.3.32.3.29.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	44.831.796.674,00	41.157.401.464,95	91,80	3.674.395.209,05
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	14.049.387.056,00	10.956.131.636,00	77,98	3.093.255.420,00
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	14.049.387.056,00	10.956.131.636,00	77,98	3.093.255.420,00
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.182.340.580,00	182.337.080,00	5,72	3.000.003.500,00
2.17.3.31.3.30.01.0000.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	3.182.340.580,00	182.337.080,00	5,72	3.000.003.500,00
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.705.000.000,00	1.411.919.814,00	82,81	293.080.186,00
2.07.3.32.3.29.01.0000.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.705.000.000,00	1.411.919.814,00	82,81	293.080.186,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	473.804.054.219,00	375.524.186.126,00	79,25	98.279.868.093,00
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	428.009.173.026,00	339.330.274.580,00	79,28	88.678.898.446,00
4.01.00.0.00.01.0000.	Sekretariat Daerah	428.009.173.026,00	339.330.274.580,00	79,28	88.678.898.446,00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	45.794.881.193,00	36.193.911.546,00	79,03	9.600.969.647,00
4.02.00.0.00.01.0000.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya	45.794.881.193,00	36.193.911.546,00	79,03	9.600.969.647,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	499.939.311.692,00	389.493.801.248,58	77,90	110.445.510.443,42
5.01.	PERENCANAAN	31.721.504.971,00	30.000.561.597,00	94,57	1.720.943.374,00
5.01.00.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	31.721.504.971,00	30.000.561.597,00	94,57	1.720.943.374,00
5.02.	KEUANGAN	418.772.126.022,00	320.768.589.401,58	76,59	98.003.536.620,42
5.02.00.0.00.01.0000.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	418.772.126.022,00	320.768.589.401,58	76,59	98.003.536.620,42
5.03.	KEPEGAWAIAN	29.083.322.699,00	25.226.750.009,00	86,73	3.856.572.690,00
5.03.00.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.083.322.699,00	25.226.750.009,00	86,73	3.856.572.690,00
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.000.000.000,00	1.737.542.241,00	86,87	262.457.759,00
5.03.00.0.00.01.0000.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000.000,00	1.737.542.241,00	86,87	262.457.759,00
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.362.358.000,00	11.760.358.000,00	64,04	6.602.000.000,00
5.01.00.0.00.01.0000.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	18.362.358.000,00	11.760.358.000,00	64,04	6.602.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	24.246.787.807,00	16.637.685.374,00	68,61	7.609.102.433,00
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	24.246.787.807,00	16.637.685.374,00	68,61	7.609.102.433,00
6.01.00.0.00.01.0000.	Inspektorat Daerah	24.246.787.807,00	16.637.685.374,00	68,61	7.609.102.433,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	13.591.500.193,00	12.140.982.522,00	89,32	1.450.517.671,00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.591.500.193,00	12.140.982.522,00	89,32	1.450.517.671,00
8.01.00.0.00.01.0000.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.591.500.193,00	12.140.982.522,00	89,32	1.450.517.671,00
9	UNSUR KEKHSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	41.077.612.154,00	34.624.263.631,00	84,28	6.453.348.523,00
9.03.	UNSUR KEKHSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	41.077.612.154,00	34.624.263.631,00	84,28	6.453.348.523,00
9.03.00.0.00.01.0000.	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Daya	41.077.612.154,00	34.624.263.631,00	84,28	6.453.348.523,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

BAB III

KHTISAR DAN HAMBATAN CAPAIAN KINERJA

3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diklasifikasikan menjadi 3 (Tiga) urusan Pemerintahan, dan 5 (Lima) Unsur yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Perangkat Daerah. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja per Perangkat Daerah disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja dibawah ini.

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan
Berdasarkan Klasifikasi Per Organisasi**

URUSAN/SKPD ANGGARAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(%)	LEBIH/KURANG
	(Rp)	(Rp)		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01.2.22.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1.02.2.14.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.03.1.04.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
1.05.0.00.00.01.0000 DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.06.2.08.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1.06.2.08.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
2.11.3.28.2.10.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN				
2.12.2.13.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG				
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.849.187.273,00	22.593.829.726,99	78,32	6.255.357.547,01
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
2.07.3.32.3.29.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
2.11.3.28.2.10.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN				
2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
3.27.2.09.3.25.01.0000 DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN				
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH				
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DAYA				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.059.486.955.440,00	2.025.803.811.645,84	98,36 %	33.683.14 3.794,16
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	2.059.486.955.440,00	2.025.803.811.645,84	98,36 %	33.683.14 3.794,16
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH				
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN				
9.03.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA				

3.2 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

1. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai amanat Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil



dan/atau transfer kepada daerah/desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berikut disajikan tingkat pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya TA. 2023:

1. Alokasi Pendidikan Sebesar 20%

Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menganggarkan alokasi untuk menunjang fungsi pendidikan senilai Rp.596.162.290.153,00. Apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah pada tahun 2023 senilai Rp.2.840.521.119.956,00 maka persentase rasio alokasi anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah adalah sebesar 20,99%. Alokasi tersebut sudah melebihi ketentuan yang diamanatkan Undang-undang No.20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa alokasi sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.

2. Alokasi Kesehatan Sebesar 10%

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menganggarkan alokasi untuk fungsi kesehatan senilai Rp.316.449.068.130,00. Jika dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah diluar gaji senilai Rp.2.695.377.140.416,00 persentase alokasi anggaran kesehatan terhadap total belanja daerah diluar gaji adalah sebesar 11,74%. Alokasi tersebut melebihi alokasi anggaran yang diamanatkan peraturan perundangan yaitu sebesar 10% untuk fungsi kesehatan.

3. Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik Sebesar 40%

Selanjutnya Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menganggarkan alokasi untuk infrastruktur pelayanan publik senilai Rp.908.749.761.276,00. Apabila dibandingkan dengan jumlah Dana Transfer Umum (DTU) diluar DBH Atau Transfer Kepada Daerah/Desa senilai Rp. 2.175.964.977.356,00 maka persentase alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik terhadap total DTU



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

diluar diluar DBH Atau Transfer Kepada Daerah/Desa adalah sebesar 41,76%. Alokasi tersebut berdasarkan amanat undang-undang telah sesuai dengan persentase yang ditetapkan untuk infrastruktur pelayanan publik.

Berikut Anggaran dan Realisasi Kegiatan untuk *Mandatory Spending*.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 3.2 Belanja Urusan Pendidikan

No	Komponen Perhitungan		SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		CAPAIAN
			Jumlah		Jumlah		
1.	a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:		289.910.008.618,00		220.273.070.586,60	75,98%
	1)	Belanja Operasi:	281.309.032.818,00		211.868.567.150,00		75,32%
		a. belanja pegawai;	47.432.183.328		6.565.722.664,00		13,84%
		b. belanja barang dan jasa;	85.312.101.157		71.742.096.153,00		84,09%
		c. belanja hibah;	148.564.748.333		133.560.748.333,00		89,90%
		d. belanja bantuan sosial.					
	2)	Belanja Modal;	8.600.975.800		8.404.503.436,60		97,72%
	b.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:		42.934.497.760,00		39.036.653.602,00	90,92%
	1)	Belanja Operasi:	42.741.471.760,00		38.856.777.602,00		90,91%
		a. belanja pegawai;	6.784.665.560		5.312.945.408,00		78,31%
		b. belanja barang dan jasa;	22.706.806.200		20.676.032.194,00		91,06%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		c.	belanja hibah;	13.250.000.000		12.867.800.000,00		97,12%
		d.	belanja bantuan sosial.					
	2)	Belanja Modal;		193.026.000		179.876.000,00		93,19%
c.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:				250.513.312.151,00		106.630.058.639,00	42,56%
1	Belanja Transfer:		42.725.306.225,00					0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Kab/ Kota DBH Migas Otsus Mandatory Pendidikan 35%		42.725.306.225,00					0,00%
2	Pelaksanaan tugas Paskibraka		47.968.700,00		47.968.700,00			100,00%
3	Pembentukan Paskibraka		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00			100,00%
4	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		50.220.293.718,00		42.217.597.816,00			84,06%
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari		4.815.000.000,00		4.234.907.110,00			87,95%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					
	6	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.091.470.976,00		577.209.768,00		52,88%
	7	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	400.000.000,00		366.841.500,00		91,71%
	8	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	249.960.200,00		217.369.240,00		86,96%
	9	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	750.539.640,00		605.303.640,00		80,65%
	10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	424.263.100,00		424.263.100,00		100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	11	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	1.815.201.400,00		1.815.201.400,00		100,00%
	12	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	359.298.000,00		359.298.000,00		100,00%
	13	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	408.630.800,00		408.630.800,00		100,00%
	14	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000,00		150.000.000,00		100,00%
	15	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	350.066.750,00		349.844.250,00		99,94%
	16	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	200.000.000,00		200.000.000,00		100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	17	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	42.416.457.726,00		36.878.706.100,00		86,94%
	18	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	49.642.014.450,00		0,00		0,00%
	19	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	10.000.000.000,00		0,00		0,00%
	20	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	5.000.000.000,00		0,00		0,00%
	21	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	2.966.281.091,00		843.920.000,00		28,45%
	22	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	13.200.000.000,00		6.600.000.000,00		50,00%
	23	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	400.000.000,00		400.000.000,00		100,00%
	24	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		100,00%
	25	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00		100.000.000,00		100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	26	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000,00		998.000.000,00		99,80%
	27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.350.000.000,00		349.919.400,00		6,54%
	28	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.930.559.375,00		4.330.077.815,00		62,48%
	29	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	7.000.000.000,00		1.655.000.000,00		23,64%
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		583.357.818.529,00		365.939.782.827,60		
3.	Total Belanja Daerah		2.840.521.119.956,00		2.840.521.119.956,00		
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		20,54%		12,88%		



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 3.3 Belanja Infrastruktur Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Total Belanja Daerah	2.613.023.380.272,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a) belanja bagi hasil	170.380.280.584,00
	b) bantuan keuangan	127.072.303.500,00
	Jumlah (a+b)	297.452.584.084,00
3	Selisih (1-2)	2.315.570.796.188,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	926.228.318.475,20



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 3.4 Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Total Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1	a) Belanja Modal		735.600.035.724,00		661.236.508.429,55
	1) Tanah	46.352.228.684,00		43.379.119.434,00	
	2) Peralatan dan Mesin	91.188.020.494,00		75.897.054.869,00	
	3) Bangunan dan Gedung	43.820.577.585,00		35.199.318.942,60	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	548.644.372.031,00		502.360.025.075,95	
	5) Aset tetap lainnya	3.298.483.680,00		2.512.103.108,00	
	6) Aset lainnya	2.296.353.250,00		1.888.887.000,00	
	b) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)		-		-
	c) Belanja pemeliharaan		81.627.934.000,00		54.634.894.487,00
2	a) Belanja Hibah (hanya yang berdimensi infrastruktur)	-		-	
	b) Belanja Bantuan Sosial (hanya yang berdimensi infrastruktur)	-		-	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		817.227.969.724,00		715.871.402.916,55



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.3 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Penanganan Prevalensi Stunting

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Stunting sebagai isu prioritas Nasional dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 % pada tahun 2021 menjadi 14 % pada tahun 2024. Dalam Upaya pencapaian target telah ditetapkan sasaran dan strategi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan *Prevalensi* adalah jumlah keseluruhan penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di sebuah wilayah. Jadi *Prevalensi Stunting* adalah jumlah keseluruhan permasalahan *Stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah.

Tabel 3.5 Prevalensi Stunting berdasarkan data e-PPGBM
per 28 Desember 2024

KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH BALITA	STUNTING (%)
Kabupaten Sorong Selatan	55.904	2.707	31,3%
Kabupaten Kab Sorong	123.136	2.539	27%
Kabupaten Raja Ampat	70.810	2.195	30,9%
Kabupaten Tambrauw	31.040	1.620	31,8%
Kabupaten Maybrat	46.093	1.880	27,3%
Kota Sorong	284.650	12,38	9,4%
Provinsi Papua Barat Daya	494.730	10487	13,97%

Berdasarkan diagram diatas, dapat terlihat bahwa Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan hasil e-PPGBM tahun 2024 tingkat prevalensi Stunting sebesar 13,97%, tertinggi Kabupaten Tambrauw 31.8 % dan paling rendah Kota Sorong yaitu 9.4%. Data tersebut diperoleh dari inputan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dari setiap kabupaten pada Aplikasi e-PPGBM per 28 Desember 2024.

Berikut alokasi anggaran dan realisasi untuk penurunan *prevalensi stunting* Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.6 Realisasi untuk penurunan Prevalensi Stunting
Provinsi Papua Barat Daya

NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	394.035.000,00	394.035.000,00	100,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4.153.830.953,00	773.989.200,00	18,63%
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	19.499.960.000,00	17.825.505.796,00	91,41%
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.712.954.900,00	420.697.600,00	11,33%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	19.765.170.450,00	8.337.821.550,00	42,18%
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.214.999.000,00	-	0,00%
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	563.292.400,00	249.828.000,00	44,35%
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	975.000.000,00	673.492.500,00	69,08%
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	350.000.000,00	199.815.100,00	57,09%
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.415.316.325,00	1.413.656.325,00	99,88%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.313.926.328,00	10.800.315.230,00	95,46%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	108.473.800,00	108.473.800,00	100,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.500.000.000,00	529.432.500,00	35,30%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	199.503.000,00	99,75%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%

3.4 Pencapaian Program Pemerintah Daerah terkait Dana Otonomi Khusus

Sesuai Undang-Undang APBN TA 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian APBN TA 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2022 Tentang Alokasi Transfer Ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022. Provinsi Papua



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Barat Daya memperoleh penerimaan dalam rangka Otsus sebesar Rp1.905.869.335.000 yang terdiri dari:

- a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp188.691.351.000;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp235.864.189.000;
- c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp531.947.877.000;
- d. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (Tambahan DBH Migas) sebesar Rp949.365.918.000 (Termasuk Kabupaten/Kota). Dengan rincian transfer ke Kabupaten/ Kota sebesar Rp664.556.142.600.

3.5 Regulasi Pemerintah Provinsi terkait Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus, Provinsi Papua Barat Daya masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.07/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.

3.6 Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otsus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran 2023.

Selama TA 2023 dari alokasi pagu penerimaan dalam rangka Otsus sebesar Rp1.905.869.335.000 telah terealisasi sebesar Rp.1.594.942.520.983 (83.68%). Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan akhir TA 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

RENCANA DAN REALISASI PER KLASIFIKASI BELANJA

Tabel 3.7 Dana Otsus Yang Bersifat Umum

Kode Klasifikasi	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi Belanja	PAGU DAN REALISASI		
			Pagu	Realisasi	%
		Belanja Administrasi Pemerintahan	25.211.706.100	18.813.362.400	75%
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Belanja Administrasi Pemerintahan			
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan			
2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan			
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan			
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

9.03.02.4.02.0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Belanja Administrasi Pemerintahan			
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Belanja Administrasi Pemerintahan			
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Belanja Administrasi Pemerintahan			
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Belanja Administrasi Pemerintahan			
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.700.000.000	1.127.255.000	66,31%
X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Belanja Administrasi Pemerintahan			
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Administrasi Pemerintahan			
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Belanja Administrasi Pemerintahan	200.000.000	199.999.000	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Belanja Administrasi Pemerintahan	250.000.000	250.000.000	100,00%
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.453.600.000	1.453.600.000	100,00%
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Belanja Administrasi Pemerintahan	246.400.000	246.400.000	100,00%
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Belanja Administrasi Pemerintahan	700.000.000	349.958.400	49,99%
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.650.000.000	1.650.000.000	100,00%
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.300.000.000	-	0,00%
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Belanja Administrasi Pemerintahan	2.000.000.000	2.014.788.900	100,74%
X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Administrasi Pemerintahan	250.000.000	250.000.000	100,00%
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi PUG	Belanja Administrasi Pemerintahan	150.000.000	150.000.000	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Belanja Administrasi Pemerintahan	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Belanja Administrasi Pemerintahan	2.000.000.000	-	0,00%
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Belanja Administrasi Pemerintahan	550.000.000	495.000.000	90,00%
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Belanja Administrasi Pemerintahan	225.841.160	225.841.160	100,00%
2.13.07.4.03.0001	Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Belanja Administrasi Pemerintahan	603.742.140	603.742.140	100,00%
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Administrasi Pemerintahan	200.000.000	200.000.000	100,00%
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan	200.000.000	-	0,00%
2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan	250.000.000	16.875.000	6,75%
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Belanja Administrasi Pemerintahan	377.302.800	377.302.800	100,00%
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.250.000.000	997.800.000	79,82%
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Belanja Administrasi Pemerintahan	204.820.000	204.800.000	99,99%
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Belanja Administrasi Pemerintahan	700.000.000	-	0,00%
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Belanja Administrasi Pemerintahan	500.000.000	500.000.000	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Belanja Administrasi Pemerintahan	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Belanja Administrasi Pemerintahan	750.000.000	-	0,00%
		Belanja Keagamaan	19.000.000.000	14.000.000.000	73,68%
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Belanja Keagamaan	19.000.000.000	14.000.000.000	73,68%
		Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	21.000.000.000	9.585.295.950	45,64%
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	750.000.000	750.000.000	100,00%
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	5.750.000.000	591.030.000	10,28%
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	500.000.000	500.000.000	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	1.000.000.000	-	0,00%
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	8.000.000.000	2.815.620.000	35,20%
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	750.000.000	750.000.000	100,00%
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	750.000.000	450.000.000	60,00%
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	2.500.000.000	2.728.645.950	109,15%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	2.107.638.800	2.101.388.800	99,70%
2.18.02.4.05.0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.443.608.000	1.437.358.000,00	99,57%
2.13.07.4.06.0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	408.630.800	408.630.800	100,00%
2.13.07.4.06.0001	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	255.400.000	255.400.000	100,00%
		Belanja Pendidikan	73.000.000.000	28.721.463.150	39,34%
1.01.02.3.06.0007 14702	- Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Belanja Pendidikan			
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Belanja Pendidikan	2.000.000.000	2.000.000.000,00	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.01.02.4.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Belanja Pendidikan	64.998.893.910	24.196.000.000,00	37,23%
1.01.02.4.07.0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Belanja Pendidikan	4.700.000.000,00	2.000.000.000	43%
1.01.02.4.05.0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Belanja Pendidikan	1.301.106.090	525.463.150	40,39%
		Belanja Penguatan Kelembagaan	424.263.100	424.263.100	100,00%
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Belanja Penguatan Kelembagaan			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kapasitas Lembaga KeMasyarakat Belanja Penguanan Kelembagaan	424.263.100	424.263.100	100,00%
		Belanja Pertanahan			
2.10.05.1.01.0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintahan Bidang Pertanahan			
		Belanja Sosial	40.700.000.000	16.405.200.000	40,31%
1.06.02.1.02.0004 13130	- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Belanja Sosial			
1.06.05.4.03.0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belanja Sosial			
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Belanja Sosial			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.06.02.4.02.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Belanja Sosial	200.000.000	-	0,00%
1.06.05.3.03.0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belanja Sosial	40.500.000.000	16.405.200.000	40,51%

Tabel 3.8 Dana Otsus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

Kode Klasifikasi	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi Belanja	PAGU DAN REALISASI		
			Pagu	Realisasi	%
3.26.05.1.01.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja Administrasi Pemerintahan			
2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Belanja Administrasi Pemerintahan			
3.28.05.4.01.0005	pengembangan Usaha Perhutanan sosial	Belanja Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.10.06.1.01.0006	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Belanja Pertanahan			
3.25.02.4.08.0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat			
		Belanja Kesehatan	36.164.526.800	20.065.206.196	55,48%
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Kesehatan			
1.02.02.3.02.0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Belanja Kesehatan			
1.02.02.4.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Belanja Kesehatan			
1.02.02.4.02.0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Belanja Kesehatan			
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Belanja Kesehatan			
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Penyakit Kesehatan	Belanja Kesehatan			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	Menular dan Tidak Menular				
1.02.02.3.02.0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Belanja Kesehatan			
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Belanja Kesehatan	19.499.960.000	17.825.505.796,00	91,41%
1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Belanja Kesehatan	537.420.000	171.408.000	31,89%
1.02.03.3.02.0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Belanja Kesehatan	7.000.000.000	1.655.000.000	23,64%
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Belanja Kesehatan	7.334.281.300	-	0,00%
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Belanja Kesehatan	501.729.200	100.000.000	19,93%
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Belanja Kesehatan	603.155.900	-	0,00%
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Belanja Kesehatan	313.292.400	313.292.400	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Belanja Kesehatan	374.688.000	-	0,00%
		Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	50.000.000.000	42.227.239.225	84,45%
3.26.02.1.01.005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.25.03.4.11.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				
2.07.03.4.03.0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.700.000.000	2.775.469.824,00	75%	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				
3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat				



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.29.03.3.26.0003	Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.18.06.1.01.0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
2.13.04.1.01.0015	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
1.06.02.4.02.0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.000.000.000,00	2.903.200.000	72,58%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Bantuan Ekonomi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	6.000.000.000,00	5.986.920.594,00	99,78%
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000,00	1.171.137.118,00	117,11%
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000,00	-	0,00%
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	10.200.000.000,00	10.080.000.000,00	98,82%
3.26.05.3.03.0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.500.000.000,00	1.447.800.000,00	96,52%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	352.027.846,00	320.623.987,00	91,08%
3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.750.000.000,00	1.562.459.700,00	89,28%
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	700.000.000,00	611.178.000,00	87,31%
3.31.02.3.01.0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.000.000.000,00	-	0,00%
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	oleh Pemerintah Daerah Provinsi				
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	659.512.486,00	659.156.446,00	99,95%
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000,00	776.055.656,00	77,61%
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000,00	848.348.900,00	84,83%
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
3.29.03.3.26.0002	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	600.000.000,00	600.000.000	100,00%
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	700.000.000,00	926.359.000,00	132,34%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	8.000.000.000,00	6.999.530.000,00	87,49%
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000,00	959.000.000,00	95,90%
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00%
3.28.05.4.01.0004	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi pokoknya.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.17.08.4.02.0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.000.000.000	1.000.000.000,00	100,00%
3.25.06.4.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	238.459.668	-	0,00%
Header		Belanja Pendidikan	109.658.107.200	42.166.670.046	38,45%
1.01.02.3.06.0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Belanja Pendidikan			
1.01.02.4.08.0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Belanja Pendidikan			
4.01.09.3.04.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Belanja Pendidikan			
1.01.02.3.07.0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Belanja Pendidikan	49.658.107.200,00	42.166.670.046,00	84,91%
4.01.09.3.04.0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Belanja Pendidikan	45.000.000.000,00	-	0,00%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4.01.09.3.04.0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Belanja Pendidikan	10.000.000.000,00	-	0,00%
4.01.12.4.03.0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Belanja Pendidikan	5.000.000.000,00	-	0,00%

Tabel 3.9 Dana Tambahan Infrastruktur

Kode Klasifikasi	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi Belanja	PAGU DAN REALISASI		
			Pagu	Realisasi	%
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	Belanja Infrastruktur Air Bersih	1.000.000.000	981.405.000	98,14%
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Belanja Infrastruktur Air Bersih	6.500.000.000	6.062.417.400	93,27%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Terpencil dan Perdesaan	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	40.000.000.000	32.236.998.126	80,59%
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belanja Perhubungan Infrastruktur	12.550.000.000	11.799.063.100	94,02%
2.15.02.1.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Belanja Perhubungan Infrastruktur	2.950.000.000	2.292.800.000	77,72%
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Belanja Perhubungan Infrastruktur	750.000.000	799.900.000	106,65%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpulan Regional	Belanja Perhubungan	Infrastruktur	2.900.000.000	2.030.300.800	70,01%
2.15.04.4.02.0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Belanja Perhubungan	Infrastruktur			
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Belanja Perhubungan	Infrastruktur			
2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi	Belanja Perhubungan	Infrastruktur			
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Belanja Perhubungan	Infrastruktur	15.000.000.000	14.266.257.540	95,11%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Belanja Perhubungan	Infrastruktur	297.000.000.000	303.865.141.930	102,31%
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan					
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Belanja Perhubungan	Infrastruktur	13.584.607.000	3.427.369.000	25,23%
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan		6.500.000.000	6.449.661.000	99,23%
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			8.510.866.699	8.555.468.998	



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 3.10 Dana Tambahan Migas Otsus

No	Klasifikasi Belanja	Penyerapan Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Administrasi Pemerintahan	73.745.205.040	55.716.751.858,6	75,55%
2.	Belanja Infrastruktur Air Bersih	5.128.642.000	4.877.485.000,0	95,10%
3.	Belanja Infrastruktur Perhubungan	12.224.602.620	12.224.602.620,0	100,00%
4.	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	38.730.410.000	34.963.572.900,0	90,27%
5.	Belanja Kesehatan	61.275.770.950	49.143.285.081,0	83,69%
6.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	350.000.000	0,0	0,00%
7.	Belanja Pendidikan	93.561.287.390	93.561.287.390,0	100,00%
8.	Belanja Penguatan Kelembagaan	350.000.000	0,0	0,00%
Jumlah		285.365.918.000	250.486.984.850	



3.7 Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

a. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya TA 2024 terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

- Keseriusan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Khusus.
- Pemahaman Aparatur selaku pengelola dana Otsus tentang tata kelola dan tujuan Otonomi Khusus.
- Peran serta dan partisipasi Aparatur melalui Musrembang dalam perencanaan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
- Pengawasan aparatur terhadap keberhasilan peruntukan kelola Otsus.

b. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Selain pendukung keberhasilan di temukan beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

- Kurang konsisten antara penganggaran dalam APBD dan RAP disebabkan karena pembahasan RAP. Sehingga mengakibatkan terkendalanya Pelaporan Ke Pusat.
- Dalam Pelaporan ke Pusat, Aplikasi yang digunakan belum menyediaan Menu Cetak Per Sumber Dana.
- SDM Kurang Memadai sebab banyak aparatur yang berkedudukan sebagai pelaksana dan tidak bisa mengambil kebijakan dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Otsus.
- Belum terintegrasi/ terhubungnya antara SIKD OTSUS dan SIPKD/ SIPD.
- Perubahan regulasi berkaitan dengan pengelolaan dana Otsus yang sering menyebabkan kesulitan ASN dalam mengimplementasikan regulasi tersebut.



- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal.
- Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan-perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
- Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

c. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

- BPPKAD Melakukan pergeseran APBD sesuai peruntukan Otsus.
- OPD Melakukan pemetaan sumber dana secara manual.
- BPPKAD Melakukan pencatatan secara manual.
- BPPKAD Berkoordinasi dengan OPD dalam Pelaporan.
- Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- Berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

d. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya TA 2024 adalah sebagai berikut:

- Kapasitas SDM pada OPD teknis belum sepenuhnya memadai sehingga berdampak pada perencanaan, alokasi Dana Otsus.
- Perubahan regulasi tentang penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan keterlambatan penyiapan syarat salur oleh Pemerintah Daerah, mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana Otonomi Khusus sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.



-
-
- Pemisahan rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus terlambat dilaksanakan karena bergantung pada ketersediaan dana pada rekening tersebut.
 - Penggunaan 3 (Tiga) Sistem Informasi yang berbeda (SIPD, SIPKD dan SIKD OTSUS) menyebabkan proses perencanaan dan penganggaran menjadi tidak sejalan.

Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

1. Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Daya TA 2024. Beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut
2. Melaksanakan sosialisasi, diklat dan FGD sebagai sarana transfer knowledge dan transfer of value, membuka ruang komunikasi lebih luas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Regulasi menyangkut teknis pengelolaan dana Otonomi Khusus diberikan jeda waktu tertentu dalam pelaksanaanya, tidak telalu sering berubah sehingga tidak berpengaruh terhadap siklus penyaluran oleh Pemerintah Pusat di setiap tahapan.

Rekening Kas Umum Daerah tidak terpisah dalam beberapa rekening, sehingga kegiatan-kegiatan prioritas yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (OAP) dapat segera dilaksanakan tanpa harus terikat dengan tahapan penyaluran dana oleh Kementerian Keuangan.



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik dengan dukungan oleh entitas akuntansi. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan di lingkungannya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara



periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Jumlah entitas akuntansi terdiri dari 1 (satu) PPKD dan 21 (Dua Puluh Satu) SKPD di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi Sekretariat Daerah beserta Biro-biro, Sekretariat Badan, Sekretariat DPR, Sekretariat MRPB, Dinas-Dinas, Badan dan Kantor.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.



Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD (perlakuan akhir tahun).
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (BLUD).
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/ dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (khusus BLUD).
- Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan



pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

4.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

4.3.6 Pengukuran/penilaian Aset :

4.3.6.1 Persediaan

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.



Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis. obat-obatan, suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
- b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pelaksanaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.



4.3.6.2 Tanah

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4.3.6.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan biaya perolehannya terdiri dari komponen yaitu harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan



semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4.3.6.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

4.3.6.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan



pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

4.3.6.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.6.7 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.



Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya- biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

4.3.7 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

4.3.8 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8.4) Pendapatan–LO dapat diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diyakini dapat direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan



peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

4.3.9 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat



berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b. Terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.



- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.3.10 Kapitalisasi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga, hewan yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, dengan kata lain setiap penambahan Rp1,00 (satu rupiah) terhadap aset tetap sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan kapitalisasi, dan
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Jalan dan Jembatan sama dengan atau melebihi dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a. Pengadaan tanah;
- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d. Pembangunan gedung dan bangunan;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah Laporan yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan.

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

➤ Laporan Realisasi anggaran (LRA)

Laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja estimasi pendapatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

5.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Adalah perhitungan capaian pendapatan yang berhasil di peroleh daerah selama satu periode anggaran, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp2.090.963.535.215,02** atau 101,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp2.059.486.955.440,00**, meningkatnya realisasi pendapatan melebihi rencana realisasi terjadi akibat meningkatnya Pendapatan asli daerah yang melampaui target. Hal ini dikarenakan terjadinya pengalihan P3D UPT Samsat yang menyebabkan terjadinya lonjakan signifikan Pendapatan Asli Daerah.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Berikut rincian penerimaan pendapatan Asli Daerah:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) 2024	REALISASI (Rp) 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Asli Daerah	262.789.635.440,00	305.972.224.384,02	74.919.018.946,00	231.053.205.438,02	116,43
2	Pendapatan Transfer	1.765.220.920.000,00	1.755.247.396.624,00	2.701.650.000.000,00	(946.402.603.376,00)	99,43
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31.476.400.000,00	29.743.914.207,00	35.592.800.000,00	(5.860.560.032,00)	94,46
JUMLAH		2.059.486.955.440,00	2.090.963.535.215,00	2.812.161.818.946,00	(719.945.907.688,90)	101,53

Penjelasan atas keseluruhan pendapatan diatas secara rinci dijelaskan berikut ini:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 305.972.224.384,02 atau 116,43% hal ini dikarenakan optimalisasi layanan dan pembebasan denda pemungutan pendapatan daerah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp262.789.635.440,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	216.215.480.367,00	237.540.712.232,00	109,86
2	Lain-lain PAD Yang Sah	46.574.155.073,00	68.431.512.152,02	146,93
JUMLAH		262.789.635.440,00	305.972.224.384,02	116,43



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan bagi daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024 dan Petunjuk Pengelolaan Pajak Daerah di atur dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/210/10/2023. Realisasi Pendapatan pajak mencapai 109,86% atau sebesar Rp. 237.540.712.232,00 merupakan pendapatan dari:

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	56.815.303.218,00	168,44
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23.174.634.036,00	90,38
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	101.964.059.707,00	95,10
4	Pajak Air Permukaan	9.652.100,00	98,90
5	Pajak Rokok	55.577.063.171,00	112,02
JUMLAH		237.540.712.232,00	109,86

Lain-lain penerimaan PAD yang Sah adalah Pendapatan Daerah selain Pajak daerah. Pendapatan ini mencakup berbagai jenis penerimaan yang diperoleh daerah, seperti jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan Ganti rugi dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Realisasi Lain-lain PAD yang salah mencapai 146,93% atau sebesar Rp68.431.512.152,02 diperoleh dari:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.4 Lain-lain Penerimaan PAD yang Sah

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1	Jasa Giro	6.230.083.113,13	311,50
2	Pendapatan BLUD	34.005.281.699,57	117,87
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	843.203.134,00	16,45
4	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan daerah	27.352.944.205,32	258,05
JUMLAH		68.431.512.152,02	146,93

Penerimaan PAD dari Jasa Giro terdiri Atas 6 Rekening Kas Provinsi Papua Barat Daya yang dapat dilihat pada rekapan Jasa Giro Kas Daerah pada Lampiran I.a, Untuk Pendapatan BLUD dapat dilihat pada Laporan keuangan BLUD terlampir. Adapun Pendapatan Denda Pajak Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	BULAN	KD REK	NM REK	JUMLAH
1	JULI	4.1.4.12.02.010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	683.162.134,00
2	AGUSTUS	4.1.4.12.02.003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.265.000,00
3	AGUSTUS	4.1.4.12.02.010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	72.234.000,00
4	OKTOBER	4.1.4.12.01.003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	4.964.000,00
5	OKTOBER	4.1.4.12.01.007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	73.835.000,00
6	NOVEMBER	4.1.4.12.02.007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.108.500,00
7	DESEMBER	4.1.4.12.01.006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	2.666.000,00
8	DESEMBER	4.1.4.12.01.010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	968.500,00
JUMLAH				843.203.134,00

Sedangkan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terdapat pada Lampiran I.b.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

yang bersumber dari APBN. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar **Rp1.755.247.396.624,00** atau 99,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp1.765.220.920.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	959.370.071.000,00	949.396.547.624,00	98,96
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	805.850.849.000,00	805.850.849.000,00	100,00
JUMLAH		1.765.220.920.000,00	1.755.247.396.624,00	99,43

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp949.396.547.624,00 atau 98,96%. Realisasi tahun 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	275.890.203.865,00	110,06
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	600.571.248.000,00	100,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.128.220.609,00	67,62
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.806.875.150,00	65,30
JUMLAH		949.396.547.624,00	98,96%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 805.850.849.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 805.850.849.000,00. Realisasi tahun 2024 tersebut terdiri dari:

**Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)
1	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	377.266.242.000,00
2	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	428.584.607.000,00
JUMLAH		805.850.849.000,00

Berikut Rincian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	13 Juni 2024	002 Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan (SPESIFIC GRANT) - Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya - TAHAP 1 - NOMOR SP2D 240661303002463	58.746.790.200,00
2	13 Juni 2024	001 Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan - Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya (BLOCKGRANT) - TAHAP 1 - NOMOR SP2D 240661303002465	54.433.082.400,00
3	13 Juni 2024	Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahap I dengan NO SP2D 240661303002463	-
4	20 November 2024	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan - Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya - TAHAP 2 (OTSUS SG)	88.120.185.300,00
5	20 November 2024	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan - Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya - TAHAP 2 (OTSUS BG)	81.649.623.600,00
6	16 Desember 2024	001 Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan - Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya - Otsus Blockgrant- TAHAP 3 - No Sp2D 240661303006912	45.360.902.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

7	16 Desember 2024	002 Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan - Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya - Otsus Spesificgrant - Tahap 3 - No SP2D 240661303006914	48.955.658.500,00
JUMLAH			377.266.242.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah pemerintah daerah adalah pemberian sesuatu (uang atau barang) dari pemerintah daerah kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa penerima tidak wajib mengembalikannya. Pemberian ini dilakukan dengan perjanjian dan ditetapkan peruntukannya. Hibah termasuk dalam Pendapatan Daerah dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp29.743.914.207,00 atau 94,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.476.400.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah

PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH				
NO	URAIAN	KAB/KOTA	TANGGAL	(Rp)
1	Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	Kabupaten Tambrawu	2 April 2024	5.000.000.000,00
		Kabupaten Sorong Selatan	2 Agustus 2024	5.000.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Kota Sorong	20 November 2024	2.000.000.000,00
		Kota Sorong	24 Desember 2024	2.868.000.000,00
		Raja Ampat	5 November 2024	5.000.000.000
		Kabupaten Sorong	25 Oktober 2024	2.000.000.000
2	Transfer Dana Paitua	Kabupaten Sorong	3 Mei 2024	1.794.000.000,00
		Kabupaten Sorong Selatan	12 Desember 2024	891.000.000,00
		Kabupaten Raja Ampat	18 Desember 2024	2.620.200.000,00
		Kabupaten Tambrauw	20 Desember 2024	696.000.000,00
		Kabupaten Maybrat	27 Desember 2024	1.200.000.000,00
		Kota Sorong	4 Desember 2024	663.039.968,00
JUMLAH				29.732.239.968,00

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan Pembangunan dearah, serta untuk memenuhi kesejahteraan Masyarakat. Realisasi sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.093.879.541.736,20 atau 80,13% hal ini disebabkan oleh kesalahan penganggaran sehingga menyebabkan penundaan pencairan sampai dengan perbaikan anggaran berikutnya, dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.613.023.380.272,00, kemudian Realisasi belanja Pada tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.262.514.771.103,62 dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp2.875.464.101.534,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.9 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2024

NO	URAIAN	TA 2023		(%)	TA 2024		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Belanja Operasi	1.295.480.673.111,00	925.373.772.386,74	71,43	1.552.025.610.339,00	1.196.781.534.745,57	77,11
2	Belanja Modal	852.329.446.869,00	661.550.844.963,88	77,62	735.600.035.724,00	661.690.449.521,55	89,95
3	Belanja Tak Terduga	28.154.857.376,00	2.650.000.000,00	9,41	27.945.150.125,00	1.315.000.000,00	4,71
4	Belanja Transfer	699.499.124.178,00	672.940.153.753,00	96,20	297.452.584.084,00	234.092.557.469,08	78,70
JUMLAH		2.875.464.101.534,00	2.262.514.771.103,62	78,68	2.613.023.380.272,00	2.093.879.541.736,20	80,13

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp1.196.781.534.745,57 atau 77,11% hal ini disebabkan adanya kesalahan penganggaran dan keterlambatan transfer dana pusat dari Anggaran sebesar Rp1.552.025.610.339,00.

Tabel 5.10 Belanja Operasi

NO	URAIAN	TA 2023		(%)	TA 2024		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Belanja Pegawai	272.184.333.089,00	39.229.727.507,00	14,41	272.184.333.089,00	174.108.765.199,58	63,97
2	Belanja Barang dan Jasa	908.903.685.650,00	683.600.039.505,88	75,21	908.903.685.650,00	715.046.945.112,99	78,67
3	Belanja Hibah	317.791.751.600,00	155.122.145.373,86	48,81	317.791.751.600,00	281.265.924.433,00	88,51
4	Belanja Bantuan Sosial	53.145.840.000,00	47.421.860.000,00	89,23	53.145.840.000,00	26.359.900.000,00	49,60
JUMLAH		1.552.025.610.339,00	925.373.772.386,74	59,62	1.552.025.610.339,00	1.196.781.534.745,57	77,11

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk gaji dan tunjangan serta honor pegawai pemerintah daerah. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp 174.108.765.199,58 atau 63,97% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 272.184.333.089,00. Selisih antara



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

anggaran dan realisasi disebabkan oleh adanya mutase tambah pegawai masuk ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 5.11 Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	156.292.516.689,00	86.190.475.007,00	55,15
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.060.000.000,00	52.957.016.116,00	73,49
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.241.063.000,00	6.961.224.599,00	84,47
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.269.615.000,00	6.517.792.500,00	57,84
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	500.000.000,00	83,33
6	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	16.507.938.400,00	14.163.501.480,00	85,80
7	Belanja Pegawai BLUD	7.213.200.000,00	6.818.755.497,58	94,53
JUMLAH		272.184.333.089,00	174.108.765.199,58	63,97%

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdiri atas belanja barang atau jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Barang



dan Jasa BLUD. Realisasi belanja tersebut dalam tahun anggaran 2024 sebesar Rp715.046.945.112,99 atau 78,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp908.903.685.650,00.

Tabel 5.12 Belanja Barang Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	251.258.018.974,00	223.741.534.324,00	89,05
2	Belanja Jasa	286.150.164.044,00	254.071.980.166,00	88,79
3	Belanja Pemeliharaan	81.627.934.000,00	54.687.894.487,00	67,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	167.654.918.859,00	142.778.805.434,00	85,16
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	102.298.782.500,00	27.803.565.500,00	27,18
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.316.580.000,00	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.597.287.273,00	11.963.165.201,99	64,33
JUMLAH		908.903.685.650,00	715.046.945.112,99	78,67

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian berupa Uang, barang atau jasa kepada Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan dan Lembaga, Partai Politik serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2024 pemerintah daerah mengeluarkan belanja hibah sebesar Rp281.265.924.433,00 atau 88,51% dari



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

anggarannya yang ditetapkan sebesar Rp317.791.751.600,00.

Belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.912.376.100,00	6.912.376.100,00	100
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	310.879.375.500,00	274.353.548.333,00	88,25
JUMLAH		317.791.751.600,00	281.265.924.433,00	88,51

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu peningkatan aktivitas kegiatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, seperti bantuan kepada organisasi masyarakat, organisasi adat dan agama, serta bantuan kepada nelayan. Realisasi belanja bantuan sosial dalam tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.359.900.000,00 atau 49,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.53.145.840.000,00. Belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang diserahkan kepada masyarakat	52.324.200.000,00	28.230.000.000,00	53,95
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada masyarakat	821.640.000,00	820.000.000,00	99,80
JUMLAH		53.145.840.000,00	29.050.000.000,00	49,60



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Terdapat Belanja Bantuan Sosial yang belum terealisasi terkait dana paitua di rekening Sekretariat Bersama yang belum disalurkan kepada penerima sampai dengan tgl 25 Juni 2025 senilai Rp2.690.100.000,00 dan dana di rekening PAITUA senilai Rp18.480.051.129,00 per 31 Des 2024. Hal ini dikarenakan penerima bantuan sosial yang terdata telah meninggal dunia dalam rentang waktu pembagian dana sosial dilaksanakan dan terdapat juga permasalahan validitas data yang tidak sesuai sehingga dana tidak tersalurkan ke penerima manfaat.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk biaya antara lain belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi dan Aset Tetap Lainnya. Belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat terserap sebesar Rp661.690.449.521,55 atau 89,95% dari belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp735.600.035.724,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Tanah	46.352.228.684,00	43.659.119.434,00	94,19
2	Belanja Peralatan dan Mesin	91.188.020.494,00	77.635.099.069,00	85,14
3	Belanja Gedung dan Bangunan	43.820.577.585,00	36.008.318.942,60	82,17
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.644.372.031,00	502.360.025.075,95	91,56
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.298.483.680,00	139.000.000,00	4,21



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.296.353.250,00	1.888.887.000,00	82,26
JUMLAH		735.600.035.724,00	661.690.449.521,55	89,95

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengurangan ekuitas pemerintah daerah yang digunakan untuk mengatasi keadaan darurat. Belanja tak terduga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.315.000.000,00 atau 4,71% terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp27.945.150.125,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Realisasi Belanja Transfer di tahun anggaran 2024 yang besaran ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur sebesar Rp234.092.557.469,08 atau 78,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 297.452.584.084,00. Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

Tabel 5.16 Belanja Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	170.380.280.584,00	166.140.594.911,08	97,51
2	Transfer Bantuan Keuangan	127.072.303.500,00	67.951.962.558,00	53,48
JUMLAH		297.452.584.084,00	234.092.557.469,08	78,70

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	167.595.544.274,00	163.355.858.601,08	97,47
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	2.784.736.310,00	2.784.736.310,00	100
JUMLAH		170.380.280.584,00	166.140.594.911,08	97,51

Pada transfer bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota terdapat kesalahan yang mengakibatkan *double* Pencairan SP2D pada Kabupaten Raja Ampat senilai Rp252.374.248,50 lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran I.c Belanja Transfer.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 67.951.962.558,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan lebih lanjut dijelaskan pada lampiran I.d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah



terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp554.689.662.720,95.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Papua sebesar Rp0,00.

Total realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.090.963.535.215,02 dikurangi realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.093.879.541.731,20 sehingga terdapat surplus/(defisit) anggaran sebesar (Rp2.916.006.521,18).

5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp551.773.656.199,77. Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

URAIAN	2023	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.000.410.956,00	554.647.458.798,38
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.000.410.956,00	554.689.662.720,95
Sub Total	0,00	-42.203.922,57
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	554.647.458.798,38	551.773.656.199,77
Sub Total	554.647.458.798,38	551.773.656.199,77
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	44.203.922,57
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	554.647.458.798,38	551.773.656.199,77

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN MARING-MARING POS NERACA DAERAH

Neraca Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada ekuitas tahun anggaran. Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

5.3.1 ASET Rp2.288.001.623.468,86

Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya per 31 desember 2024 senilai Rp2.288.001.623.468,86 meliputi kelompok aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dengan penjelasan per jenis aset di masing masing kelompok aset diuraikan berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5.3.1.1 ASET LANCAR Rp647.256.460.216,76

Aset lancar per 31 Desember 2024 senilai Rp647.256.460.216,76 adalah aset yang dapat digunakan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset lancar yang dimiliki meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah Rp534.584.389.197,77

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada pada Kas Daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp534.584.389.197,77. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Saldo Per 31 Desember 2024
Pada Rekening Kas Provinsi Papua Barat Daya

NO	NAMA BANK REKENING KAS	NOMOR REKENING	SALDO KAS DAERAH BERDASARKAN REKENING KORAN PER 31 DES 2024
1	Bank Papua - RKUD Prov. Papua Barat Daya	(2000102091222)	228.624.737.768,24
2	Rek Kasda Dana Otsus 1% Provinsi Papua Barat Daya	(2000107000124)	79.542.997.922,00
3	Rek Kasda Dana Otsus 1.25% Provinsi Papua Barat Daya	(2000107000135)	116.683.200.912,27
4	Rek Kasda DTI Provinsi Papua Barat Daya	(2000107000146)	39.096.251.579,17
5	Rek Kasda Tamb. DBH Migas Otsus Prov Papua Barat Daya	(2000107000150)	69.324.251.001,59
6	Rek Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat Daya	(2000105000622)	13.443.264,00
TOTAL			533.284.882.447,27

Pada tabel diatas menjelaskan Saldo Kas pada setiap Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2024 dengan total sebesar Rp534.584.389.197,77 yang merupakan Akumulasi dari 6 Saldo Rekening Kas diatas Adanya perbedaan transaksi pada



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

rekening koran dan BKU mengakibatkan adanya selisih senilai Rp1.299.506.750,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Debit di RK	Status
Transaksi 2023			
1	pencairan ganda SP2D No 000208/SP2D/LS/2.11.3.28.2.10.01.0000/07/2023 yang belum dipulihkan per 31 Des 2023	13.746.000,00	Belum di pulihkan
2	pencairan ganda SP2D No 000209/SP2D/LS/2.11.3.28.2.10.01.0000/07/2023 yang belum dipulihkan per 31 Des 2023	38.262.600,00	Belum di pulihkan
3	pencairan ganda SP2D No 000210/SP2D/LS/2.11.3.28.2.10.01.0000/07/2023 yang belum dipulihkan per 31 Des 2023	23.192.150,00	Belum di pulihkan
4	pencairan ganda SP2D No 000211/SP2D/LS/2.11.3.28.2.10.01.0000/07/2023 yang belum dipulihkan per 31 Des 2023	67.708.000,00	Belum di pulihkan
Transaksi 2024			
1	PPN dan PPh 23 SP2D Disnaker No.001026/SP2D/LS/2.07.3.32.3.29.01.0000/08/2024 yang tertransfer ke Bendahara, namun sudah di OBMPN kan di Kasda	6.696.757,00	Belum di pulihkan
2	Bank Lebih Cair 330.000 96.00/04.0/002925/SP2D/LS/1.03/PUPR/CV RAVIN PUTRA ABADI/TAG 100% PKRJN PEMB BAHU JLN RUAS JLN PROV DI SORSEL PKT 4	330.000,00	Sudah di pulihkan tanggal 12 Maret 2025
3	Double Cair 96.71/04.0/003478/SP2D/LS/1 .03/12/2024/PUPR /CV.HANNA MITRA PAPUA /PEMBY TAGIHAN FISIK 100% ATAS PEKERJAAN PENINGKATAN JLN KTR L	209.860.000,00	Belum di pulihkan
4	Bank Lebih Cair 450.000 pada 96.00/04.0/002445/SP2D/LS/1 2/2024/PMBY TGHN UANG MK 30% ATS PKRJN PNGKTN JL KTR LNGKNGN HDP-ANGGREK HITAM KM.14 PKT 10(DTI-OTSUS)	450.000,00	Sudah di pulihkan tanggal 12 Maret 2025
5	Double Cair CV. Sunnok SP2D 96.71/04.0/003097/SP2D/LS/2.01/12/2024/PEMBY LS 100 ATAS PEMBNG DAN PENGOLAHAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PRO	459.500.000,00	Belum di pulihkan
6	Double Cair 96.00/04.0/003492/LS/1.03/PPR2/12/2024/DNS PUPR/PEMBY TAGIHAN 100% LUNAS PEKERJAAN PEMBERSIHAN SALURAN DRAINASE JLN PROV DI KO	139.866.915,00	Sudah di pulihkan tanggal 23 Mei 2025
7	Kelebihan pembayaran IWP JKK JKM Gaji Januari	14.386.956,00	Belum di pulihkan
8	IWP JKK JKM Gaji Maret terkirim ke Bend BPPKAD dan Belum dipulihkan	18.479.008,00	Belum di pulihkan
9	Double cair dengan nomor arsip i928800067 tgl 5 April 2025 (96.00/04.0/000015/LS/2.12.2.13.0.00.08.0000/M/2024 PEMB KEKURANGAN GAJI BLN JANFEB 2024/DUKCAPIL & PEMB MSRYK PBD) dan nomor arsip i340600006 tgl 30 maret 2024 (96.00/04.0/000015/LS/2.12.2.13.0.00.08.0000/M/3/2024PEMBLG GAJI PNS (KEKRGN GAJI BULAN JANUARI S/D FEBRUARI) 2024 DUKCAPIL DAN)	25.385.800,00	Belum di pulihkan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

10	Dobel Cair Bagi Hasil Pajak Pemkab Raja Ampat yang dicairkan dengan 2 SP2D berbeda	252.374.248,50	Belum di pulihkan
11	Kelebihan IWP JKK JKM Gaji Rutin April 2024	121.770,00	Belum di pulihkan
12	Kelebihan cair LS 000299/SP2D/LS/4.01.00.0.00.01.0000/04/2024, Sekda	360.000,00	Belum di pulihkan
13	IWP 4% LS 378 tertransfer ke bendahara	610.920,00	Belum di pulihkan
14	THR - bank kelebihan transfer pajak	36.000,00	Belum di pulihkan
17	Kurang setor STS 20/BIMTEK KEBUDAYAAN LOKAL PBD /2024, selisih dengan uang masuk di RKUD Rp400 - SEK. MRP	400,00	Belum di pulihkan
18	STS tidak ada uangnya (19/S3TU/DLHKP/2024), belum disetor - DLHKP	15.744.220,00	Belum di pulihkan
19	PPN dan PPh 22 atas SP2D Bruto Pihak ke-3 No.003303/SP2D/LS/2.11.3.28.2.10.01.0000/12/2024 yang ditransfer bruto, namun pajaknya dibebankan di Kasda - DLHKP	11.756.756,00	Belum di pulihkan
21	Kelebihan IWP koperindag gaji rutin 12	267.107,00	Belum di pulihkan
23	PPh21 SP2D Kesbangpol No.001557/SP2D/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024 yang tertransfer ke Bendahara, namun sudah di OBMPN kan di Kasda	161.693,00	Belum di pulihkan
25	PPh21 SP2D Bapperida 001654/SP2D/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024 yang tertransfer ke Bendahara, namun sudah di OBMPN kan di Kasda	209.450,00	Belum di pulihkan
JUMLAH		1.299.506.750,50	

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp3.163.666.045,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.163.666.045,00 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.20 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.863.742.010,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000,00
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.572.628,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	204.884.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.902.380,00
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.032.693,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

7	Sekretariat Daerah	5.479.411,00
8	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	1.135.323,00
9	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.695.600,00
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	222.000,00
JUMLAH		3.163.666.045,00

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran II.a Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.3.1.1.3 Kas BLUD **Rp12.297.316.800,00**

Kas Dana BLUD adalah kas Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BLUD. Kas ini merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD. Kas di BLUD tahun 2024 senilai Rp12.297.316.800,00 untuk Kas di BLUD dapat dilihat pada Laporan keuangan BLUD terlampir.

5.3.1.1.4 Kas Dana BOS **Rp11.674.239,00**

Kas Dana BOS adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk membantu biaya operasional sekolah. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yang mendukung pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan, seperti administrasi sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, dan pemeliharaan sarana prasarana. Kas akhir Dana BOS tahun 2024 Rp11.674.239,00, yang terdiri dari SLB Negeri Kabupaten Sorong Rp60.740,00, SMPLB Kota Sorong Rp488.000,00, dan SDLB Kota Sorong Rp11.125.499,00.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.21 Kas Dana BOS

No.	Uraian	Nomor Rekening	Saldo Awal Tahun 2024	Kredit	Debit	Saldo Akhir Per 31 Des Tahun 2024
1	Sekolah Luar Biasa Negeri Kab. Sorong	2030201054210	60,740.00	382,400,000.00	382,400,000.00	60,740.00
2	SMA Luar Biasa Kota Sorong	2000202067286	-	348,600,000.00	348,600,000.00	-
3	SMP Luar Biasa Kota Sorong	2000202067275	64,660,000.00	282,300,000.00	346,472,000.00	488,000.00
4	SD Luar Biasa Kota Sorong	2000202067253	4,963,180.00	448,297,140.00	442,134,821.00	11,125,499.00
				1,531,281,060.00	1,519,606,821.00	-
TOTAL SALDO AKHIR BOS SLB						11,674,239.00

5.3.1.1.5 Kas Lainnya **Rp 5.317.977.401,00**

Kas Lainnya merupakan saldo kas yang belum didebet per 31 Desember 2024 ke RKUD sebesar Rp5.317.977.401,00 yang terdiri dari Utang PFK Tahun 2024 senilai Rp5.156.279.067,00; Jasa Giro Pada Rekening Penampung Program Paitua per 31 Desember 2023 senilai Rp10.590.010,00 dan Sisa Kas pada Rekening Penampung program paitua yang belum ditransfer penerima program paitua senilai Rp12.600.000,00 yang dirinci sebagai berikut:

1. Jasa Giro per 31 Desember 2024

Jasa giro adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening giro atas simpanan dana. Jasa giro yang belum disetor ke kas daerah Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 31 desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.22 Jasa Giro per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	NOMOR REKENING	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Rekening Penampung Program Paitua	031001004230309	46.752.167,00	Belum disetor ke kasda
JUMLAH			46.752.167,00	



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2. Kas di Rekening Penampung

Rekening Penampung adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana sementara sebelum disalurkan ke rekening tujuan. Kas di rekening penampung per 31 desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Kas di Rekening Penampung

NO	URAIAN	NOMOR REKENING	NILAI (Rp)
1	Rekening Penampung Program Paitua	031001004230309	2.702.700.000,00
JUMLAH			2.702.700.000,00

3. Kas Lainnya Berupa PFK diluar BUD

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah dana yang disetorkan oleh pemerintah daerah, yang kemudian disetorkan kepada pihak ketiga. Pemotongan PFK per 31 Desember 2024 senilai Rp2.568.525.234,00.

5.3.1.1.6 Piutang Pajak Daerah **Rp1.678.646.600,00**

Piutang Pajak Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.681.376.800,00 merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.543.345.500 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp138.031.300. Rincian Piutang Pajak beserta penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran II.b Piutang Pajak Daerah.



5.3.1.1.7 Piutang Lain-lain PAD

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.119.200,00 terdiri dari Piutang Denda Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp229.272.500,00 Piutang Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp20.846.700,00 Rincian Piutang Lain-lain PAD beserta penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran II.b Piutang Pajak Daerah.

5.3.1.1.8 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Saldo penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.857.681.150,00 merupakan penyisihan atas Piutang Pajak sebesar Rp1.618.482.700,00 Piutang Lain-lain PAD sebesar Rp239.198.450,00 Rincian Penyisihan piutang disajikan pada lampiran II.b Piutang Pajak Daerah.

5.3.1.1.9 Persediaan Rp 91.807.621.683,99

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan



memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember tahun 2023 senilai Rp40.968.272.754,00, sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp91.807.621.683,99. Nilai persediaan terdiri dari persediaan barang pakai habis yang tidak habis digunakan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp270.531.185,00, obat-obatan sebesar Rp20.928.275.153,50, Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Rp1.367.374.595,00 dan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp69.241.440.750,49.

Rincian perhitungan persediaan per SKPD dapat dilihat dalam Lampiran II.c Perhitungan Persediaan.

5.3.1.2 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap Provinsi Papua Barat Daya diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah yaitu barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan penyerahan dari Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong. Nilai Aset Tetap Provinsi Papua Barat daya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.566.080.283.136,80,-.

ASET TETAP	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
	Rp1.566.080.283.136,80	Rp665.999.922.621,87



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jumlah pada pos aset tetap Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 Rp1.566.080.283.136,80. Mutasi aset tetap selama Tahun 2024 terdiri dari penambahan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan dari perolehan APBD Tahun Anggaran 2024 dan perolehan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan penyerahan dari Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong, pengurangan dan penambahan karena adanya reklasifikasi dengan rincian mutasi aset tetap menurut jenis dan objek sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 Menurut Jenis

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)	Mutasi Kurang (Rp.)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	3.648.235.655,00	85.172.284.189,95	-	88.820.519.844,95
Peralatan dan Mesin	70.620.798.374,90	116.936.431.742,52	5.344.578.000,00	182.212.652.117,42
Gedung dan Bangunan	42.216.423.663,81	203.092.458.189,57	381.617.920,83	244.927.263.932,55
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	471.194.098.450,88	652.470.848.543,26	4.737.883.086,93	1.118.927.063.907,21
Aset Tetap Lainnya	5.282.313.300,00	2.267.785.000,00	-	7.550.098.300,00
Konstruksi Dalam Penggerjaan	88.741.494.650,00	81.663.626.289,60	60.186.120.458,60	110.219.000.481,00
Jumlah	681.703.364.094,59	1.141.603.433.954,90	70.650.199.466,36	1.752.656.598.583,13
Akumulasi Penyusutan	(15.703.441.472,72)	-	-	(186.576.315.446,33)
ASET TETAP (NETTO)	665.999.922.621,87	-	-	1.566.080.283.136,80



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.25 Rincian Mutasi Aset Tetap Menurut Objek

Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp)	Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
TANAH	3.648.235.655,00	85.172.284.189,95	-	88.820.519.844,95
Tanah	3.648.235.655,00	85.172.284.189,95	-	88.820.519.844,95
PERALATAN DAN MESIN	70.620.798.374,90	116.936.431.742,52	5.344.578.000,00	182.212.652.117,42
Alat Besar	1.177.047.800,00	2.764.018.492,19	-	3.941.066.292,19
Alat Angkutan	37.124.012.000,00	29.122.552.083,68	139.860.000,00	66.106.704.083,68
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	41.244.700,00	1.080.002.645,81	-	1.121.247.345,81
Alat Pertanian	177.708.028,00	200.828.762,28	-	378.536.790,28
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	9.376.444.539,12	28.023.856.344,20	5.204.718.000,00	32.195.582.883,32
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	3.728.697.623,12	22.293.109.294,70	-	26.021.806.917,82
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	132.102.000,00	772.280.000,00	-	904.382.000,00
Alat Laboratorium	612.744.414,46	9.985.979.893,36	-	10.598.724.307,82
Alat Persenjataan	106.034.725,28	367.000.000,00	-	473.034.725,28
Komputer	14.820.568.798,00	12.715.800.596,30	-	27.536.369.394,30
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	395.160.000,00	-	395.160.000,00
Alat Bantu Eksplorasi	9.114.600,00	-	-	9.114.600,00
Alat Keselamatan Kerja	181.839.148,00	406.861.250,00	-	588.700.398,00
Peralatan Proses/Produksi	7.739.998,92	-	-	7.739.998,92
Rambu - Rambu	3.125.500.000,00	8.794.419.180,00	-	11.919.919.180,00
Peralatan Olah Raga	-	14.563.200,00	-	14.563.200,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	42.216.423.663,81	203.092.458.189,57	381.617.920,83	244.927.263.932,55
Bangunan Gedung	42.016.940.563,81	200.679.474.189,57	381.617.920,83	242.314.796.832,55
Monumen	-	595.284.000,00	-	595.284.000,00
Bangunan Menara	-	1.817.700.000,00	-	1.817.700.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.483.100,00	-	-	199.483.100,00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	471.194.098.450,88	652.470.848.543,26	4.737.883.086,93	1.118.927.063.907,21
Jalan Dan Jembatan	342.648.352.500,00	543.522.873.785,39	4.737.883.086,93	881.433.343.198,46
Bangunan Air	84.813.564.925,00	50.580.485.287,57	-	135.394.050.212,57
Instalasi	36.301.536.025,88	58.169.139.470,30	-	94.470.675.496,18
Jaringan	7.430.645.000,00	198.350.000,00	-	7.628.995.000,00
ASET TETAP LAINNYA	5.282.313.300,00	2.267.785.000,00	-	7.550.098.300,00
Bahan Perpustakaan	500.000.000,00	2.267.785.000,00	-	2.767.785.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	498.201.300,00	-	-	498.201.300,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.284.112.000,00	-	-	4.284.112.000,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	88.741.494.650,00	81.663.626.289,60	60.186.120.458,60	110.219.000.481,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	88.741.494.650,00	81.663.626.289,60	60.186.120.458,60	110.219.000.481,00
JUMLAH	681.703.364.094,59	1.141.603.433.954,90	70.650.199.466,36	1.752.656.598.583,13
Akumulasi Aset Tetaap	(15.703.441.472,72)			(186.576.315.446,33)
ASET TETAP (NETTO)	665.999.922.621,87			1.566.080.283.136,80

Rincian mutasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	681.703.364.094,59
Mutasi Tambah 2024	1.187.889.963.450,90
- LRA Belanja Modal Aset Tetap	659.801.562.521,55
- Penambahan Aset Tetap dari belanja operasi	42.991.896.632,00
- Penambahan Aset Tetap dari dana BOS Pemerintah Pusat	67.959.680,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hutang Peralatan dan Mesin	4.360.987.900,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hutang Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.013.672.399,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hutang Aset Tetap Lainnya	82.000.000,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hutang Persediaan diserahkan ke Masyarakat	602.942.990,00
- Penambahan Aset Tetap karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB)	385.926.451.279,75
- Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi tambah	88.042.490.048,60
Mutasi Kurang 2024	(116.936.728.962,36)
- Reklasifikasi kurang ke Aset Lainnya	(4.997.368.000,00)
- Koreksi	(5.466.711.007,76)
- Reklasifikasi kurang ke Konstruksi Dalam Penggerjaan	(60.186.120.458,60)
- Berkurang Belanja Modal Aset Tetap ke Ekstrakomtabel	(26.894.891.018,00)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- Berkurang Belanja Modal Aset Tetap ke barang persediaan	(43.166.100,00)
- Berkurang Belanja Modal Aset Tetap ke barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat	(17.383.843.259,00)
- Berkurang Belanja Modal Aset Tetap karena pembayaran hutang peralatan dan mesin Tahun 2023	(996.902.410,00)
- Berkurang Belanja Modal Aset Tetap karena pembayaran hutang jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023	(967.726.709,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	1.752.656.598.583,13

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp681.703.364.094,59 merupakan saldo awal Aset Tetap per 1 Januari 2024 sesuai dengan saldo Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 audited.

Penjelasan atas mutasi tambah Aset Tetap sebesar Rp1.141.603.433.964,90 adalah sebagai berikut:

1. Bertambah aset tetap dari belanja modal sebesar Rp659.801.562.521,55 sesuai dengan realisasi belanja modal Tahun 2024. Rincian hasil pengadaan aset tetap per OPD menurut jenis pada Lampiran III.a aset tetap.
2. Penambahan Aset Tetap dari belanja operasi sebesar Rp 42.991.896.632,00 adalah penambahan aset tetap dari realisasi belanja operasi pada:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rp27.064.123.225,00
 - b. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Rp5.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

c.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp27.500.000,00
d.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	Rp1.386.200,00
e.	Dinas Perhubungan	Rp13.081.665.000,00
f.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp7.990.000,00
g.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp573.531.637,00
h.	Sekretariat Daerah	Rp120.912.960,00
i.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Rp1.805.104.000,00
j.	Inspektorat Daerah	Rp304.683.610,00
Jumlah		Rp42.991.896.632,00

3. Penambahan Aset Tetap dari dana BOS Pemerintah Pusat sebesar Rp70.259.680,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp67.959.680,00

Penambahan dana BOS Pemerintah Pusat sebesar Rp70.259.680,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1) Peralatan dan Mesin	Rp62.809.680,00
(Lampiran III Aset Tetap)	
2) Aset Tetap Lainnya	Rp5.150.000,00
(lampiran III Aset Tetap)	
Jumlah	Rp67.959.680,00

4. Rekapitulasi daftar total hutang belanja aset tetap sebesar Rp6.550.418.890,00 pada Lampiran III.b dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.360.987.900,00 (Lampiran III Aset Tetap) pada:

1) Dinas Perhubungan	Rp1.842.846.000,00
2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<u>Rp2.518.141.900,00</u>
Jumlah	Rp4.360.987.900,00

- b. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.504.488.000,00 (Lampiran III.c Aset Tetap) pada:

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp5.570.632.399,00
2) Dinas Perhubungan	Rp443.040.000,00
Jumlah	Rp6.013.672.399,00

- c. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 82.000.000,00 (Lampiran III.c Aset Tetap) pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

a. Dinas Pertanian, Pangan, Keluatan dan Perikanan	Rp82.000.000,00
Jumlah	Rp82.000.000,00

5. Penambahan Aset Tetap dari Hutang Persediaan diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp602.942.990,00 merupakan hutang dari belanja modal peralatan dan mesin yang selanjutnya telah diserahkan ke R.S Sele Besolu Pemerintah Kota Sorong berupa peralatan hemodialisis dengan BAST Nomor0889/SP/PENG-ALKES-RORS.

SELEBESOLU/SI/DKP2KB-PBD/ APBD-2024 (Lampiran III.c
Aset Tetap) pada:

a. Dinas Kesehatan,	Rp602.942.990,00
Pengendalian Penduduk dan	
Keluarga Berencana	

Jumlah	Rp602.942.990,00
---------------	-------------------------

6. Penambahan Aset Tetap karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) sebesar Rp385.926.451.279,75. Rekapitulasi perolehan aset tetap karena perolehan peraturan perundang-undangan menurut Objek pada Lampiran III.c Aset Tetap dan Rekapitulasi perolehan aset tetap karena perolehan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan per OPD pada Lampiran III.c Aset Tetap pada:

a. Dinas Pendidikan dan Rp 13.713.509.595,00	
Kebudayaan	
b. Dinas Kesehatan, Rp 2.370.867.999,45	
Pengendalian Penduduk	
dan Keluarga Berencana	
c. Dinas Sosial, Rp 599.905.000,00	
Pemberdayaan	



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Perempuan dan

Perlindungan Anak

- d. Dinas Lingkungan Hidup, Rp 37.100.616.524,00
Kehutanan, dan
Pertanahan
- e. Dinas Perhubungan Rp 134.588.417.139,10
- f. Dinas Komunikasi, Rp 500.000.000,00
Informatika, Statistik dan
Persandian
- g. Dinas Koperasi, Usaha Rp 14.622.167.966,00
Kecil Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
- h. Dinas Kepemudaan, Rp 48.039.799.345,00
Olahraga, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
- i. Dinas Pertanian, Pangan, Rp 134.391.167.711,20
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp 385.926.451.279,75

7. Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi tambah
sebesar Rp62.280.898.599,60 pada:

- a. Dinas Pendidikan dan Rp 3.369.549.347,60
Kebudayaan
- b. Dinas Pekerjaan Umum Rp 83.956.846.701,00
Dan Perumahan Rakyat
- c. Dinas Perhubungan Rp 397.635.000,00
- d. Dinas Pertanian, Pangan, Rp 318.459.000,00
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp 88.042.490.048,60



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Penjelasan atas mutasi kurang Aset Tetap sebesar Rp70.650.199.466,36 sebagai berikut:

1. Reklasifikasi kurang ke Aset Lainnya sebesar Rp4.997.368.000,00 pada:

a. Sekretariat DPRD	<u>Rp4.997.368.000,00</u>
Jumlah <u>Rp4.997.368.000,00</u>	
2. Reklasifikasi kurang karena adanya koreksi nilai perolehan karena adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.466.711.007,76 pada:

a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Rp 5.119.501.008,00
b. Sekretariat DPRD	Rp 139.860.000,00
c. Inspektorat Daerah	<u>Rp 207.350.000,00</u>
Jumlah <u>Rp 5.466.711.007,76</u>	
3. Reklasifikasi kurang ke Konstruksi Dalam Pengrajan sebesar Rp34.424.529.009,60 pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 3.369.549.347,60
b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Rp 30.534.013.650,00
c. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	<u>Rp 520.966.012,00</u>
Jumlah <u>Rp 34.424.529.009,60</u>	
4. Berkurang belanja modal Aset Tetap ke Ektrakomtabel sebesar Rp26.894.891.018,00 pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp4.752.420,00
------------------------------------	----------------



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- | | | |
|----|--|---------------------|
| b. | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rp41.625.000,00 |
| c. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Rp23.918.692.923,00 |
| d. | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah | Rp71.353.500,00 |
| e. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp27.723.000,00 |
| f. | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp2.216.541.680,00 |
| g. | Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan | Rp50.577.500,00 |
| h. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | Rp11.100.000,00 |
| i. | Dinas Perhubungan | Rp198.750.000,00 |



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	Dinas Komunikasi,	Rp32.923.700,00
j.	Informatika, Statistik dan Persandian	
	Dinas Penanaman	Rp20.669.000,00
k.	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Dinas Pertanian,	Rp136.841.855,00
l.	Pangan, Kelautan dan Perikanan	
m.	Sekretariat Daerah	Rp110.540.440,00
	Badan Pengelolaan	Rp 2.250.000,00
n.	Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
o.	Inspektorat Daerah	Rp44.550.000,00
	Badan Kesatuan	Rp6.000.000,00
p.	Bangsa Dan Politik	
	Jumlah	Rp 26.894.891.018,00

5. Berkurang belanja modal aset tetap ke barang persediaan sebesar Rp43.166.100,00 pada:

a.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp566.100,00
b.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Rp42.600.000,00
	Jumlah	Rp43.166.100,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

6. Berkurang Belanja Modal Aset Tetap ke barang persediaan yang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp17.383.843.259,00 pada:
- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp12.119.301.035,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rp3.637.087.000,00
 - c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Rp57.600.000,00
 - d. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Rp150.000.000,00
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Rp500.000.000,00
 - f. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp104.340.000,00
 - g. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Rp815.515.224,00
- Jumlah** **Rp17.383.843.259,00**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

7. Berkurang Belanja Modal Aset Tetap karena pembayaran hutang peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp 996.902.410,00 pada:

- a. Dinas Kesehatan, Rp955.954.410,00
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
- b. Sekretariat Daerah Rp40.948.000,00

Jumlah **Rp996.902.410,00**

8. Berkurang Belanja Modal Aset Tetap karena pembayaran hutang jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 sebesar Rp967.726.709,00 pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Rp967.726.709,00
Dan Perumahan Rakyat

Jumlah **Rp967.726.709,00**

5.3.1.2.1 Tanah

Saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.820.519.844,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
TANAH	88.820.519.844,95
Tanah	88.820.519.844,95
Tanah Persil	88.680.475.844,95
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	337.500.000,00
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	9.309.225.020,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	83.500.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	58.915.250.824,95



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	20.000.000.000,00
Tanah Persil Lainnya	35.000.000,00
Lapangan	140.044.000,00
Tanah Untuk Bangunan Air	75.044.000,00
Tanah Untuk Taman	65.000.000,00

Rincian saldo akhir Tanah per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian saldo akhir Tanah

NO	SKPD	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.043.857.200,00
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	-
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	-
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahanan	44.834.897.254,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
9	Dinas Perhubungan	907.374.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	500.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.663.486.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.000.000.000,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	9.222.669.735,95
15	Sekretariat Daerah	3.648.235.655,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

16	Sekretariat DPRD	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
20	Inspektorat Daerah	-
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	-
TOTAL		88.820.519.844,95

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Tanah tambah kurang disajikan pada Lampiran III.c Aset Tetap Rincian dan mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rekapitulasi penjelasan laporan

Aset Tetap Tanah tambah kurang

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	3.648.235.655,00
Mutasi tambah Tahun 2024	85.172.284.189,95
LRA Belanja Modal Tanah	43.659.119.434,00
Bertambah Aset Tetap Tanah dari perolehan karena peraturan perundang- undangan	41.513.164.755,95
Mutasi kurang Tahun 2024	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	88.820.519.844,95

Saldo awal Tahun 2024 sebesar Rp3.648.235.655,00 terdapat penambahan sebesar Rp85.172.284.189,95 karena adanya penanambahan dari:

1. Bertambah aset tetap tanah dari belanja modal tanah sebesar Rp43.659.119.434,00 (Lampiran III.c Aset Tetap) pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

a Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp7.043.857.200,00
b Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	Rp35.427.888.234,00
c Dinas Perhubungan	Rp907.374.000,00
d Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp 280.000.000,00
Jumlah	Rp43.659.119.434,00

2. Bertambah aset tetap tanah dari penyerahan aset tetap karena adanya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp41.513.164.755,95 yang berasal dari (Lampiran III.c Aset Tetap dan Lampiran III.c Aset Tetap):

a. Provinsi Papua Barat dengan Berita Acara Penyerahan Nomor 000.2.3.2/070/GPB-PB/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp21.513.164.755,95 pada:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Rp9.407.009.020,00
- 2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp500.000.000,00
- 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Rp2.663.486.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp8.942.669.735,95
	Jumlah Rp21.513.164.755,95
b. Kabupaten Sorong berupa tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga terbuka (Stadion Wombik Km.16) dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 000.2.5/3352 DAN 000.3.5/605 tanggal 5 September 2024, sebesar Rp20.000.000.000,00 pada:	
1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp20.000.000.000,00
	Jumlah Rp20.000.000.000,00

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, Biaya meliputi harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya yang tercantum di dalam kontrak/SPK untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan, Saldo peralatan dan mesin Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 sebesar Rp182.212.652.117,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Uraian	Nilai (Rp)
PERALATAN DAN MESIN	182.212.652.117,42
Alat Besar	3.941.066.292,19
Alat Angkutan	66.106.704.083,68
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.121.247.345,81
Alat Pertanian	378.536.790,28
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	32.195.582.883,32
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	26.021.806.917,82
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	904.382.000,00
Alat Laboratorium	10.598.724.307,82
Alat Persenjataan	473.034.725,28
Komputer	27.536.369.394,30
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	395.160.000,00
Alat Bantu Eksplorasi	9.114.600,00
Alat Keselamatan Kerja	588.700.398,00
Peralatan Proses/Produksi	7.739.998,92
Rambu - Rambu	11.919.919.180,00
Peralatan Olah Raga	14.563.200,00

Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.31 Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

NO	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.869.977.346,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.146.410.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	661.601.300,00
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	5.357.689.300,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.493.146.630,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	11.579.442.389,00
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	6.740.253.323,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	3.021.265.030,00
9	Dinas Perhubungan	37.034.549.430,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	19.850.269.844,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	953.884.466,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.110.057.354,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	785.413.486,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	21.279.775.957,72
15	Sekretariat Daerah	13.267.703.679,90
16	Sekretariat DPRD	5.146.056.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	1.689.294.720,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	32.850.987.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.135.594.000,00
20	Inspektorat Daerah	1.859.703.118,00
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	485.042.250,00
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	3.894.535.493,80
TOTAL		182.212.652.117,42

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tambah kurang disajikan pada Lampiran III.c ... Aset Tetap dan rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	70.620.798.374,90
Mutasi Tambah Tahun 2024	133.951.426.776,52



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

LRA Belanja Modal	
- Peralatan dan Mesin	77.635.099.069,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin dari belanja operasi barang dan jasa	1.727.928.395,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin dari belanja modal gedung dan bangunan	1.387.355.430,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	23.019.026.189,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin dari belanja modal aset tetap lainnya	139.000.000,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin dari dana BOS Pemerintah Pusat	62.809.680,00
Penambahan dari hutang	
- belanja persediaan yang diserahkan ke masyarakat	602.942.990,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin dari hutang belanja peralatan dan mesin	4.360.987.900,00
Penambahan peralatan dan	
- mesin karena perolehan peraturan perundang- undangan (DOB)	24.697.818.123,52
Penambahan peralatan dan	
mesin karena reklasifikasi	
- dari konstruksi dalam penggeraan ke peralatan dan mesin	318.459.000,00
Mutasi Kurang Tahun 2024	(22.359.573.034,00)
Peralatan dan Mesin berkurang karena	(4.997.368.000,00)
reklasifikasi ke aset lainnya	



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

-	Peralatan dan Mesin berkurang karena koreksi nilai perolehan	(347.210.000,00)
-	Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.264.020.000,00)
-	Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke ektrakomtabel Peralatan dan Mesin	(564.150.265,00)
-	Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke ektrakomtabel Gedung dan Bangunan	(50.000.000,00)
-	Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan	(43.166.100,00)
-	Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan yang diserahkan ke masyarakat	(13.096.756.259,00)
-	Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke pembayaran hutang peralatan dan mesin	(996.902.410,00)
	Tahun 2023	
Saldo Akhir per 31 Desember 2024		182.212.652.117,42

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.620.798.374,90 adalah saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2024 sesuai dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan mesin pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Data Tahun 2023 audited.

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp133.951.426.776,52 adalah sebagai berikut:

1. Bertambah dari belanja modal peralatan dan mesin Rp77.635.099.069,00 sesuai dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024.
2. Penambahan peralatan dan mesin dari belanja operasi pada barang dan jasa sebesar Rp1.727.928.395,00 adalah



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari realisasi belanja operasi pada belanja barang dan jasa, pada:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| a. | Dinas Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat | Rp7.437.000,00 |
| b. | Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan,
Penanggulangan Bencana
dan Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah | Rp5.000.000,00 |
| c. | Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan
Sumber Daya Mineral | Rp27.500.000,00 |
| d. | Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan, dan
Pertanahan | Rp1.386.200,00 |
| e. | Dinas Perhubungan | Rp1.098.000.000,00 |
| f. | Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian | Rp7.990.000,00 |
| g. | Dinas Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan | Rp52.565.625,00 |
| h. | Sekretariat Daerah | Rp120.912.960,00 |
| i. | Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah | Rp102.453.000,00 |
| j. | Inspektorat Daerah | <u>Rp304.683.610,00</u> |
| | Jumlah | Rp1.727.928.395,00 |



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

3. Penambahan peralatan dan mesin dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp1.387.355.430,00 adalah penambahan pengadaan peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan pada:
 - a. Dinas Komunikasi, Rp 395.160.000,00 Informatika, Statistik dan Persandian
 - b. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Rp 992.195.430,00
Jumlah Rp 1.387.355.430,00
4. Penambahan peralatan dan mesin dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp23.019.026.189,00 adalah penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Rp10.829.246.189,00 Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - b. Dinas Perhubungan Rp12.189.780.000,00
Jumlah Rp23.019.026.189,00
5. Penambahan peralatan dan mesin dari belanja aset tetap lainnya sebesar Rp139.000.000,00 adalah penambahan pengadaan peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal aset tetap lainnya, pada:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Rp20.000.000,00 Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp34.500.000,00
c. Sekretariat Daerah	Rp14.500.000,00
d. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	<u>Rp 70.000.000,00</u>
Jumlah	Rp139.000.000,00

6. Penambahan peralatan dan mesin dari Pengadaan dana BOS Pemerintah Pusat sebesar Rp65.109.680,00 adalah penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin dari dana BOS Pemerintah Pusat pada:
- a. SDLB Inpres 73 Malaingkedi Rp 29.975.680,00
Sorong
- b. SLB Negeri Kabupaten Rp 32.834.000,00
Sorong
- | | |
|---------------|----------------------------|
| Jumlah | Rp 29.975.680,00 |
|---------------|----------------------------|
7. Penambahan peralatan dan mesin dari hutang belanja aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp602.942.990 adalah penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari hutang belanja Tahun 2024 berupa persediaan diserahkan ke R.S Sele Besolu Pemerintah Kota Sorong berupa peralatan hemodialisis dengan BAST Nomor 0889/SP/PENG-ALKES-RORS. SELEBESOLU/SI/DKP2KB-PBD/ APBD-2024 menjadi hutang Tahun 2024 (Lampiran III.c Aset Tetap) pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp602.942.990,00
	Jumlah	Rp602.942.990,00
8.	Penambahan peralatan dan mesin dari hutang belanja peralatan dan mesin sebesar Rp4.360.987.900,00 (Lampiran III.d Aset Tetap) pada:	
a.	Dinas Perhubungan	Rp1.842.846.000,00
b.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp2.518.141.900,00
	Jumlah	Rp4.360.987.900,00
9.	Penambahan peralatan dan mesin karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) sebesar Rp24.697.818.123,52 adalah penambahan peralatan dan mesin karena adanya penyerahan aset dari Provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan rincian sebagai berikut (Lampiran III.c Aset Tetap dan Lampiran III.c Aset Tetap):	
a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp1.707.556.095,00
b.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp599.905.000,00
c.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	Rp5.913.916.993,00
d.	Dinas Perhubungan	Rp5.233.268.180,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Rp699.541.466,00
f. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp10.543.630.389,52
<hr/>	
Jumlah Rp24.697.818.123,52	

10. Penambahan peralatan dan mesin karena reklasifikasi dari konstruksi dalam penggerjaan ke peralatan dan mesin sebesar Rp318.459.000,00 adalah penambahan pada peralatan dan mesin dari konstruksi dalam penggerjaan yang merupakan biaya jasa konsultan perencana dan konsultan pengawasan untuk memperoleh peralatan dan mesin speed boat tersebut sampai siap pakai pada:

a. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp318.459.000,00
<hr/>	

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp22.359.573.034,00 adalah sebagai berikut:

1. Berkurang aset tetap peralatan dan mesin karena reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp4.997.368.000,00 pada:

a. Sekretariat DPRD	Rp 4.997.368.000,00
Jumlah	Rp 4.997.368.000,00

2. Berkurang aset tetap peralatan dan mesin karena koreksi nilai perolehan sebesar Rp347.210.000,00 pada:

a. Sekretariat DPRD	Rp139.860.000,00
b. Inspektorat Daerah	<u>Rp207.350.000,00</u>



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jumlah Rp347.210.000,00

3. Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap jalan, jaringan dan irrigasi sebesar Rp2.264.020.000,00 pada:
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Dinas Perhubungan | <u>Rp 2.264.020.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 2.264.020.000,00 |

Berkurangnya belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap jalan, jaringan dan irrigasi berupa instalasi lain berupa penerangan lampu jalan pada PJU Bandara Kambuya Kabupaten Maybrat sebesar Rp726.920.000,00 dan pemasangan PJU Jalan Provinsi Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp1.537.100.000,00.

4. Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke ektrakomtabel peralatan dan mesin sebesar Rp564.150.265,00 adalah pengurangan belanja modal peralatan dan mesin karena dibawah batas kapitalisasi pada:
- | | |
|--|------------------|
| a. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan | Rp 4.752.420,00 |
| b. Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana | Rp 41.625.000,00 |
| c. Dinas Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat | Rp 54.834.000,00 |
| d. Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan,
Penanggulangan
Bencana dan Satuan
Polisi Pamong Praja
Daerah | Rp 71.353.500,00 |



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

e.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	27.723.000,00
f.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	Rp	50.577.500,00
g.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Rp	11.100.000,00
h.	Dinas Perhubungan	Rp	750.000,00
i.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Rp	32.923.700,00
j.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	20.669.000,00
k.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp	134.501.705,00
l.	Sekretariat Daerah	Rp	60.540.440,00
m.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Rp	2.250.000,00
n.	Inspektorat Daerah	Rp	44.550.000,00
o.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	6.000.000,00
	Jumlah	Rp	564.150.265,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5. Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke ektrakomtabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp 50.000.000,00 pada:

a. Sekretariat Daerah	Rp50.000.000,00
Jumlah	Rp50.000.000,00

Berkurang menjadi gedung dan bangunaan ektrakomtabel sebesar Rp50.000.000,00 merupakan bangunan videotran/reklame untuk bangunan tempat pasang reklame.

6. Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan sebesar Rp43.166.100,00 pada:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp566.100,00
b. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Rp 42.600.000,00
Jumlah	Rp43.166.100,00

7. Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp13.096.756.259,00 pada:

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp12.119.301.035,00
b. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp57.600.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

c.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp104.340.000,00
d.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	Rp815.515.224,00
Jumlah		Rp13.096.756.259,00

Pengurangan belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan yang diserahkan sebesar Rp12.119.301.035,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diserahkan kepada:

- 1) RS. JP WANANE Pemerintah Kabupaten Sorong berupa peralatan dan mesin berupa alat kesehatan operasi bedah jantung dengan BAST Nomor 01/BAST/DKPPKB-PBD/XII/2024
- 2) R.S Sele Besolu Pemerintah Kota Sorong berupa alat kesehatan ruang operasi (peralatan hemodialisis) dengan BAST Nomor 02/BAST/DKPPKB-PBD/XII/2024
- 3) R.S Bintang Timur Kota Sorong berupa Mobil Ambulance dengan BAST Nomor 03 /BAST/DKPPKB-PBD/XII/2024



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4) R.S Sele Besolu Pemerintah Rp 602.942.990,00
Kota Sorong berupa
peralatan hemodialisis
dengan BAST Nomor
0889/SP/PENG-ALKES-
RORS.
SELEBESOLU/SI/DKP2KB-
PBD/ APBD-2024
merupakan hutang Tahun
2024

Jumlah Rp12.119.301.035,00

Pengurangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lancar berupa persediaan yang diserahkan sebesar Rp57.600.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral diserahkan kepada anggota pelatihan ketenagakerjaan berupa alat las dengan BAST Nomor 000.3/1469 Tanggal 25 November 2024.

Pengurangan belanja modal peralatan dan mesin menjadi aset persediaan yang diserahkan sebesar Rp104.340.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diserahkan kepada: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : B/SD/140/PM.01.01/D.5.5/2024 dengan BAST Nomor 000.4.2.08/BAST/DISPORA-PAREKRAF/XII/2024 tgl 23 Desember 2024

Pengurangan belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan yang diserahkan sebesar Rp815.515.224 pada



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan diserahkan kepada kelompok Masyarakat berupa perahu diserahkan kepada:

1) Pokmaswas Kareyopop	Rp	254.689.648,00
2) Pokmaswas -Deer	Rp	255.755.248,00
3) Pokmaswas Harapan Jaya	Rp	<u>305.070.328,00</u>
	Jumlah	Rp 815.515.224,00

Penyerahan kepada Pokmaswas Kareyopop dengan BAST Nomor 09/BA-Hibah/Perahu Balai-DAK/P2KP/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 Penyerahan kepada Pokmaswas-Deer Penyerahan kepada Pokmaswas Harapan Jaya dengan BAST Nomor 04/BA-Hibah/Perahu harapan Jaya/Kelautan/P2KP/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024

8. Berkurang belanja modal peralatan dan mesin ke pembayaran hutang peralatan dan mesin Tahun 2023 sebesar Rp996.902.410,00 pada:

a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 955.954.410,00
b. Sekretariat Daerah	<u>Rp 40.948.000,00</u>
	Jumlah Rp 996.902.410,00

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp244.927.263.932,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2024



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Uraian	Nilai (Rp)
GEDUNG DAN BANGUNAN	244.927.263.932,55
Bangunan Gedung	242.314.796.832,55
Monumen	595.284.000,00
Bangunan Menara	1.817.700.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	199.483.100,00

Rincian saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.34 Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD Per 31 Desember 2024

NO	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.475.015.345,60
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.370.867.999,45
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	77.185.600.598,98
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	388.488.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	22.020.077.170,95
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	19.327.493.311,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	995.800.000,00
9	Dinas Perhubungan	30.408.573.336,10
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	11.259.140.500,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	28.239.282.445,00
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	32.554.274.225,47
15	Sekretariat Daerah	-



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

16	Sekretariat DPRD	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.702.651.000,00
19	Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
20	Inspektorat Daerah	-
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	-
TOTAL		245.308.881.853,38

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tambah kurang disajikan pada Lampiran III.c ... Aset Tetap dan rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.35 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	42.216.423.663,81
Mutasi Tambah Tahun 2024	203.092.458.189,57
- LRA Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.008.318.942,60
- Penambahan gedung dan bangunan dari belanja operasi	14.554.984.000,00
- Penambahan gedung dan bangunan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	22.020.077.170,95
- Penambahan gedung dan bangunan dari hutang belanja aset tetap lainnya	82.000.000,00
- Penambahan gedung dan bangunan karena	120.683.382.217,02



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

perolehan peraturan perundang-undangan (DOB)	
- Penambahan gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan	23.319.856.997,60
Mutasi Kurang Tahun 2024	(13.576.161.138,60)
- Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin	(1.387.355.430,00)
- Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan	(4.529.829.211,00)
- Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan	(3.369.549.347,60)
- Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke ektrakomtabel peralatan dan Mesin	(2.340.150,00)
- Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke persediaan yang diserahkan ke masyarakat	(4.287.087.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	245.308.881.853,38

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.216.423.663,81 adalah saldo awal aset tetap Gedung dan bangunan per 1 Januari 2024 sesuai dengan saldo aset tetap gedung dan bangunan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Data Tahun 2023 *audited*.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp203.092.458.189,57 sebagai berikut:

1. Bertambah dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp36.008.318.942,60 sesuai dengan realisasi belanja modal Gedung dan bangunan Tahun 2024.
2. Penambahan gedung dan bangunan dari belanja operasi sebesar Rp14.554.984.000,00 adalah penambahan gedung dan bangunan dari realisasi belanja operasi pada belanja barang dan jasa pada:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Rp6.573.648.000,00 Perumahan Rakyat
 - b. Dinas Perhubungan Rp6.278.685.000,00
 - c. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Rp1.702.651.000,00 Aset Daerah

Jumlah Rp14.554.984.000,00

3. Penambahan gedung dan bangunan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp22.020.077.170,95 adalah penambahan gedung dan bangunan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Rp22.020.077.170,95 Sumber Daya Mineral

Jumlah Rp22.020.077.170,95

4. Penambahan gedung dan bangunan dari hutang belanja aset tetap lainnya sebesar Rp82.000.000,00 (Lampiran III.f Aset Tetap) pada:
 - a. Dinas Pertanian, Pangan, Rp 82.000.000,00 Kelautan dan Perikanan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jumlah Rp 82.000.000,00

5. Penambahan gedung dan bangunan karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) sebesar Rp120.683.382.217,02 adalah penambahan gedung dan bangunan karena adanya penyerahan aset dari Provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan rincian sebagai berikut (Lampiran III.c Aset Tetap dan Lampiran III.c Aset Tetap):

 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp12.005.953.500,00
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp2.370.867.999,45
 - c. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Rp18.727.493.311,00
 - d. Dinas Perhubungan Rp16.715.853.336,10
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Rp11.259.140.500,00
 - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp28.039.799.345,00
 - h. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Rp31.564.274.225,47

Jumlah Rp120.683.382.217,02



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

6. Penambahan gedung dan bangunan karena reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerajan ke gedung dan bangunan sebesar Rp23.319.856.997,60 pada:
- Dinas Pendidikan dan Rp 3.369.549.347,60 Kebudayaan
 - Dinas Pekerjaan Umum Dan Rp 19.950.307.650,00 Perumahan Rakyat

Jumlah Rp 23.319.856.997,60

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada dinas Pendidikan sebesar Rp3.369.549.347,60 karena telah selesai pembangunannya dan penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp19.950.307.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa bangunan Gedung Serba Guna di Kabupaten Tambrauw yang telah selesai pembangunannya.

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp381.617.920,83 dikarenakan adanya koreksi nilai perolehan akibat kekurangan volume pekerjaan.

- Dinas Pekerjaan Umum

Dan Perumahan Rakyat Rp 381.617.920,83
Jumlah Rp 381.617.920,83

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp22.359.573.034,00 adalah sebagai berikut:

- Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp1.387.355.430,00 adalah



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

pengurangan nilai belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengadaan peralatan dan mesin pada:

- a. Dinas Komunikasi, Rp 395.160.000,00
Informatika, Statistik dan
Persandian
- b. Dinas Pertanian, Pangan, Rp 992.195.430,00
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp1.387.355.430,00

2. Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.529.829.211,00 adalah pengurangan nilai belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengadaan jalan,irigasi dan jaringan pada:

- a. Dinas Perhubungan Rp499.600.000,00
- b. Dinas Pertanian, Pangan, Rp4.030.229.211,00
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp4.529.829.211,00

3. Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke konstruksi dalam penggerjaan sebesar Rp3.369.549.347,60 adalah pengurangan nilai belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengadaan konstruksi dalam penggerjaan pada:

- a. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Rp3.369.549.348,00

Jumlah Rp3.369.549.348,00

4. Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke ektrakomtabel peralatan dan Mesin sebesar Rp2.340.150,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

adalah pengurangan belanja modal gedung dan bangunan karena dibawah batas kapitalisasi pada:

- a. Dinas Pertanian, Pangan, Rp 2.340.150,00
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp 2.340.150,00

5. Berkurang belanja modal gedung dan bangunan ke persediaan yang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp4.287.087.000,00 adalah pengurangan nilai belanja modal gedung dan bangunan yang merupakan pengadaan barang persediaan pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Rp3.637.087.000,00
Perumahan Rakyat
b. Dinas Lingkungan Hidup, Rp 150.000.000,00
Kehutanan, dan Pertanahan
c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Rp 500.000.000,00
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

Jumlah Rp 4.287.087.000,00

Pengurangan belanja modal gedung dan bangunan ke persediaan yang diserahkan sebesar Rp3.637.087.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan diserahkan ke Yayasan panti asuhan, berupa gedung serba guna Poairud Tanjung Kauari dan pagar untuk panti asuhan dengan berita acara serah terima Nomor: 600/002/BAST-HIBAH/DPUPR-PBD/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 (Alamat Panti Asuhan SP 4), Nomor: 600/003/BAST-HIBAH/DPUPR-PBD/XII/2024 (Alamat Panti Asuhan di Aimas) dan Nomor:



600/004/BAST-HIBAH/DPUPR-PBD/2024 (Alamat Polairud).

Pengurangan belanja modal gedung dan bangunan ke persediaan yang diserahkan sebesar Rp150.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan diserahkan kepada ketua kelompok tani hutan berupa gedung dan bangunan pondok rumah kerja dengan berita acara serah terima Nomor : 54/BAST/XII/2023 Tanggal 8 Desember 2023 (Alamat Kab. Sorong), 55/BAST/XII/2023 (Alamat Kota Sorong), 56/BAST/XII/2023 (Alamat Kab. Raja Ampat), 57/BAST/XII/2023 (Alamat Kab. Maybrat), 58/BAST/XII/2023 (Alamat Kab. Sorsel), 59/BAST/XII/2023 (Alamat Kab. Tambrauw)

Pengurangan belanja modal gedung dan bangunan ke persediaan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong sebesar Rp500.000.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berupa Pasar Mama-mama di perbatasan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong selatan dengan berita acara serah terima nomor 000.4.4/690.1/BAST/KOPERINDAG/2024 Tanggal 19 Desember 2024

5.3.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.118.927.063.907,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
per 31 Desember 2024



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Uraian	Nilai (Rp)
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.118.927.063.907,21
Jalan Dan Jembatan	881.433.343.198,46
Bangunan Air	135.394.050.212,57
Instalasi	94.470.675.496,18
Jaringan	7.628.995.000,00

Rincian saldo akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.37 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi OPD

Per 31 Desember 2024

NO	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	902.671.014.498,07
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	-
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	36.301.536.025,88
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	3.052.197.200,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
9	Dinas Perhubungan	91.794.128.612,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	85.108.187.571,26
15	Sekretariat Daerah	-
16	Sekretariat DPRD	-



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
20	Inspektorat Daerah	-
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	-
TOTAL		1.118.927.063.907,21

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tambah kurang disajikan pada **Lampiran III.c ... Aset Tetap** dan rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.38 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	471.194.098.450,88
Mutasi Tambah Tahun 2024	763.492.403.735,21
- LRA Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	502.360.025.075,95
- Penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari belanja operasi	26.188.018.225,00
- Penambahan jalan. Irigasi dan jaringan dari belanja modal peralatan dan mesin	2.264.020.000,00
- Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.529.829.211,00
- Penambahan karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB)	162.241.849.172,26
- Penambahan jalan, jaringan dan irigasi dari hutang belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.504.488.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- Penambahan Jalan, Irigasi dan Irigasi karena Reklasifikasi	64.404.174.051,00
Mutasi Kurang Tahun 2024	(115.759.438.278,88)
- Berkurang jalan, jaringan dan irigasi karena koreksi nilai perolehan	(4.737.883.086,93)
- Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin	(23.019.026.189,00)
- Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke gedung dan bangunan	(22.020.077.170,95)
- Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam penggeraan	(38.736.324.520,00)
- Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke Ektrakomtabel Peralatan dan Mesin	(198.000.000,00)
- Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke Ektrakomtabel Jalan, jaringan dan Irigasi	(26.080.400.603,00)
- Berkurang pembayaran hutang Tahun 2023 aset tetap Jalan, jaringan dan Irigasi	(967.726.709,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	1.118.927.063.907,21

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp471.194.098.450,88 adalah saldo awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2024 sesuai dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Data Tahun 2023 audited.

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024 sebesar Rp763.492.403.735,21 sebagai berikut:

1. Bertambah dari belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp502.360.025.075,95 sesuai dengan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024.
2. Penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari belanja operasi sebesar Rp26.188.018.225,00 pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rp20.483.038.225,00
b. Dinas Perhubungan Rp5.704.980.000,00
Jumlah Rp26.188.018.225,00
3. Penambahan jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.264.020.000,00 pada:
a. Dinas Perhubungan Rp 2.264.020.000,00
Jumlah Rp 2.264.020.000,00
4. Penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 4.529.829.211,00 pada:
a. Dinas Perhubungan Rp499.600.000,00
b. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Rp4.030.229.211,00
Jumlah Rp4.529.829.211,00
5. Penambahan karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) sebesar Rp162.241.849.172,26 (Lampiran III.i Aset Tetap dan Lamiran 10 Aset Tetap) pada:
a. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Rp3.052.197.200,00
b. Dinas Perhubungan Rp78.111.693.612,00
c. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Rp81.077.958.360,26
Jumlah Rp162.241.849.172,26
6. Penambahan jalan, jaringan dan irigasi dari hutang belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 1.504.488.000,00 (Lampiran III.e Aset Tetap) pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

a.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Rp 1.061.448.000,00
b.	Dinas Perhubungan	Rp 443.040.000,00
	Jumlah	Rp 1.504.488.000,00

7. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi tambah sebesar Rp64.404.174.051,00 pada:
- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| a. | Dinas Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat | Rp64.006.539.051,00 |
| b. | Dinas Perhubungan | Rp397.635.000,00 |
| | Jumlah | Rp 64.404.174.051,00 |

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp64.006.539.051,00 berasal dari :

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| a. | Konstruksi
Pengerjaan | Dalam
Rp 36.149.297.449,00 |
| b. | Jaringan, Irigasi
Jaringan Ekstrakomtabel | Rp 27.857.241.602,00 |
| | Jumlah | Rp 64.006.539.051,00 |

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024 sebesar Rp115.759.438.278,88 sebagai berikut:

1. Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin sebesar Rp23.019.026.189,00 adalah pengurangan nilai belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengadaan peralatan dan mesin pada:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

b.	Dinas Perhubungan	Rp12.189.780.000,00
	Jumlah	Rp23.019.026.189,00

2. Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke gedung dan bangunan adalah pengurangan nilai belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengadaan gedung dan bangunan sebesar Rp22.020.077.170,95 pada:
- a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah Rp22.020.077.170,95

3. Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan adalah pengurangan nilai belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengadaan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp38.736.324.520,00 pada:

a.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Rp38.736.324.520,00
----	---	---------------------

Jumlah Rp38.736.324.520,00

4. Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.000.000,00 pada:

a.	Dinas Perhubungan	Rp 198.000.000,00
	Jumlah	Rp 198.000.000,00

5. Berkurang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ke Ekstrakomtabel Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp26.080.400.603,00 pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

a.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Rp23.863.858.923,00
b.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp2.216.541.680,00
		Jumlah Rp26.080.400.603,00

6. Berkurang pembayaran hutang Tahun 2023 aset tetap Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp967.726.709,00 pada:
- | | | |
|----|---|---------------------------------------|
| a. | Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Rp967.726.709,00 |
| | | Jumlah Rp967.726.709,00 |

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dari Konstruksi Dalam Pengrajan sebesar Rp36.149.297.449,00 merupakan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengrajan di Tahun 2023 yang direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Pembangunan Jembatan Kaisepo di Kabupaten Sorong Selatan, Jalan provinsi arteri berupa peningkatan/rekonstruksi jalan Klamalu- Bandara Segun dan Jalan provinsi arteri berupa peningkatan/rekonstruksi jalan Klasari-Seget sudah difungsikan di Tahun 2024.

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp27.857.241.602 karena penambahan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ekstrakomtabel.

Penambahan Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp397.635.000,00 karena penambahan dari Jalan, Irigasi dan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jaringan ekstrakomtabel yang merupakan biaya jasa konsultansi perencanaan.

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2024 sebesar Rp4.737.883.086,90 dikarenakan adanya koreksi nilai perolehan akibat kekurangan volume pekerjaan pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rp 4.737.883.086,93
Jumlah Rp 4.737.883.086,93

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.550.098.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
ASET TETAP LAIN	7.550.098.300,00
Bahan Perpustakaan	2.767.785.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	498.201.300,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.284.112.000,00

Rincian saldo akhir Aset lainnya per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian saldo akhir Aset Tetap Lainnya OPD Per 31 Desember 2024

No.	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.003.351.300,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	4.284.112.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	-
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	-
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	-
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
9	Dinas Perhubungan	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	2.262.635.000,00
15	Sekretariat Daerah	-
16	Sekretariat DPRD	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
20	Inspektorat Daerah	-
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	-
TOTAL		7.550.098.300,00

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Aset Lainnya tambah kurang disajikan pada Lampiran III.c Aset Tetap dan rincian mutasi Aset Tetap Aset Lainnya 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.41 Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	5.282.313.300,00
Mutasi Tambah Tahun 2024	2.406.785.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- LRA Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	139.000.000,00
Penambahan aset lainnya	
- dari dana Bos Pemerintah Pusat	5.150.000,00
Penambahan aset lainnya karena perolehan	
- peraturan perundang-undangan (DOB)	2.262.635.000,00
Mutasi Kurang Tahun 2024	(139.000.000,00)
Berkurang belanja modal	
- aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin	(139.000.000,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	7.550.098.300,00

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.282.313.300,00 adalah saldo awal aset tetap lainnya per 1 Januari 2024 sesuai dengan saldo aset tetap lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Data Tahun 2023 audited.

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap lainnya Tahun 2024 sebesar Rp2.267.785.000,00 sebagai berikut:

1. Bertambah dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp139.000.000,00 sesuai dengan realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024.
2. Penambahan aset tetap lainnya dari dana Bos Pemerintah Pusat sebesar Rp5.150.000,00 (Lampiran III.c Aset Tetap) pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp5.150.000,00
Jumlah Rp5.150.000,00
3. Penambahan aset lainnya karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) sebesar Rp2.262.635.000,00 (Lampiran III.c Aset Tetap dan Lampiran III.c Aset Tetap) pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- a. Dinas Pertanian, Pangan, Rp2.262.635.000,00
Kelautan dan Perikanan

Jumlah **Rp2.262.635.000,00**

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap lainnya Tahun 2024 sebesar Rp139.000.000,00 sebagai berikut:

1. Berkurang belanja modal aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin sebesar Rp139.000.000,00 adalah pengurangan nilai belanja modal aset tetap lainnya yang merupakan pengadaan peralatan dan mesin pada:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Rp20.000.000,00 Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Rp34.500.000,00 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Sekretariat Daerah Rp14.500.000,00
 - d. Badan Pengelolaan Pendapatan, Rp70.000.000,00 Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah **Rp139.000.000,00**

5.3.1.2.6 Konstruksi Dalam Penggerjaan

Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.219.000.481,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.42 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.471.407.531,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.471.407.531,00

Rincian saldo akhir Tanah per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.43 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

OPD Per 31 Desember 2024

NO	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	997.500.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	17.483.917.470,00
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	-
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	-
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	-
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-
9	Dinas Perhubungan	91.737.583.011,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	-
15	Sekretariat Daerah	-



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

16	Sekretariat DPRD	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
20	Inspektorat Daerah	-
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	-
TOTAL		110.219.000.481,00

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Kontruksi Dalam Penggeraan tambah kurang disajikan pada Lampiran III.c ... Aset Tetap dan rincian mutasi Aset Tetap Kontruksi Dalam Penggeraan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.44 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Penggeraan
Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	88.741.494.650,00
Mutasi Tambah 2024	81.663.626.289,60
- Penambahan konstruksi dalam penggeraan dari belanja operasi	520.966.012,00
- Penambahan konstruksi dalam penggeraan dari belanja modal gedung dan bangunan	3.369.549.347,60
- Penambahan konstruksi dalam penggeraan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	38.736.324.520,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

-	Penambahan gedung dan bangunan karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB)	34.527.602.011,00
-	Penambahan konstruksi dalam penggerjaan dari hutang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	4.509.184.399,00
Mutasi Kurang 2024		(60.186.120.458,60)
-	Pengurangan reklassifikasi konstruksi dalam penggerjaan ke peralatan dan mesin	(60.186.120.458,60)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024		110.219.000.481,00

Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.741.494.650,00 adalah saldo awal aset tetap konstruksi dalam penggerjaan per 1 Januari 2024 sesuai dengan saldo aset tetap konstruksi dalam penggerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Data Tahun 2023 audited.

Penjelasan atas mutasi tambah aset tetap konstruksi dalam penggerjaan Tahun 2024 sebesar Rp77.154.441.890,60 sebagai berikut:

1. Penambahan konstruksi dalam penggerjaan dari belanja operasi sebesar Rp520.966.012,00 pada:
 - a. Dinas Pertanian, Pangan, Rp520.966.012,00 Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp520.966.012,00

2. Penambahan konstruksi dalam penggerjaan dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp3.369.549.347,60 pada:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

a. Dinas Pendidikan dan Rp3.369.549.347,60
Kebudayaan

Jumlah Rp3.369.549.347,60

3. Penambahan konstruksi dalam penggerjaan dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp38.736.324.520,00 pada:

a. Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan Rp38.736.324.520,00
Sumber Daya Mineral

Jumlah Rp38.736.324.520,00

4. Penambahan kontruksi dalam penggerjaan karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) (Lampiran III.c Aset Tetap dan Lampiran III.c Aset Tetap) sebesar Rp34.527.602.011,00 pada:

a. Dinas Perhubungan Rp34.527.602.011,00
Jumlah Rp34.527.602.011,00

Penjelasan atas mutasi kurang aset tetap konstruksi dalam penggerjaan Tahun 2024 sebesar Rp60.186.120.458,60 sebagai berikut:

Pengurangan Konstruksi Dalam Penggerjaan karena reklassifikasi sebesar Rp60.186.120.458,60 pada:

a. Dinas Pendidikan dan Rp3.369.549.347,60
Kebudayaan
b. Dinas Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Rp56.295.605.099,00
c. Dinas Pertanian, Pangan, Rp520.966.012,00
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Rp60.186.120.458,60



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1. Pengurangan Konstruksi Dalam Penggerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.369.549.347 reklassifikasi ke gedung dan bangunan.
2. Pengurangan Konstruksi Dalam Penggerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebesar Rp56.295.605.099,00 reklassifikasi ke:
 - a. Gedung dan Bangunan Rp19.950.307.650,00
 - b. Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp36.149.297.449,00
 - c. Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp196.000.000,00Ekstrakomtabel
Jumlah Rp56.295.605.099,00
3. Pengurangan Konstruksi Dalam Penggerjaan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan sebesar Rp520.966.012,00 reklassifikasi ke:
 - a. Peralatan dan Mesin Rp318.459.000,00
 - b. Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp202.507.012,00Ekstrakomtabel
Jumlah Rp520.966.012,00

5.3.1.3 AKUMULASI PENYUSUTAN

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024.

Tabel 5.45 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

Uraian	



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)
AKUMULASI PENYUSUTAN	186.576.315.446,33
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	34.826.157.205,75
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	1.255.676.916,31
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	13.752.622.829,27
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	138.511.279,31
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	236.594.478,61
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	7.738.818.320,51
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	2.649.265.764,59
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Dan Kesehatan	208.780.800,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	1.907.843.524,53
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	46.722.549,39
Akumulasi Penyusutan Komputer	6.322.137.002,05
Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	6.586.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	1.974.830,00
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	82.849.555,57
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	3.224.999,55
Akumulasi Penyusutan Rambu - Rambu	473.334.756,07
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	1.213.600,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	28.954.836.074,34
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	28.300.608.315,51
Akumulasi Penyusutan Monumen	47.792.500,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	602.113.125,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.322.133,83
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	119.306.877.140,12
Akumulasi Penyusutan Jalan Dan Jembatan	97.904.466.254,98
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	13.253.125.388,71
Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Instalasi	7.885.748.607,53
Akumulasi Penyusutan Jaringan	263.536.888,89
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	3.488.445.026,11
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	3.488.445.026,11

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing OPD
Tahun 2024 dengan rincain sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.46 Nilai Akumulasi Penyusutan Per OPD Tahun 2024

No	Pengguna Barang dan Pengelola Barang	Akumulasi Penyusutan(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.285.141.984,10
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.405.356.802,33
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	54.860.531.231,91
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	627.898.018,93
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	777.940.331,73
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.911.788.983,69
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	9.254.601.341,65
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	746.212.504,65
9	Dinas Perhubungan	48.495.889.910,37
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.798.131.528,64
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.870.992.313,16
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	238.516.490,13
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.701.442.824,20
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	38.827.218.316,85
15	Sekretariat Daerah	2.001.125.859,67
16	Sekretariat DPRD	78.335.749,39
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	356.352.323,75
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	6.292.588.356,87
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	210.769.601,81
20	Inspektorat Daerah	234.505.252,21
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	121.083.519,17
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	479.892.201,11
JUMLAH		186.576.315.446,33

Saldo awal per aset tetap per 31 Desember 2024 perlu dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan yang diperoleh dari penyusutan audited tahun 2023. Hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan pada aplikasi e-BMD dikarena aplikasi sebelumnya (SIMDA BMD) ditemukan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

beberapa aset tetap terjadi kekeliruan dalam memperhitungkan masa manfaat yang dilalui.

Apabila disandingkan, maka akan diperoleh nilai buku saldo awal Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.47 Rincian Penyesuaian Perhitungan Penyusutan
Saldo Awal Aset Tetap Saldo Awal Aset Tetap**

Uraian	Aset Tetap Sebelum Penyesuaian				Aset Tetap Sesudah Penyesuaian			Selisih Akumulasi Penyusutan
	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)=(3)-(5)
ASET TETAP	681.703.364.094,59	16.295.364.778,00	16.329.881.905,00	665.373.482.189,59	681.703.364.094,59	15.703.441.472,72	665.999.922.621,87	626.440.432,28
Tanah	3.648.235.655,00			3.648.235.655,00	3.648.235.655,00	0,00	3.648.235.655,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	70.620.798.374,90	4.258.913.314,00	4.258.913.314,00	66.361.885.060,90	70.620.798.374,90	3.813.258.707,05	66.807.539.667,85	445.654.606,95
Gedung Dan Bangunan	42.216.423.663,81	5.775.472,00	5.775.472,00	42.210.648.191,81	42.216.423.663,81	99.194.316,11	42.117.229.347,70	(93.418.844,11)
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	471.194.098.450,88	12.029.886.205,00	12.029.886.205,00	459.164.212.245,88	471.194.098.450,88	11.623.214.694,57	459.570.883.756,31	406.671.510,43
Aset Tetap Lain	5.282.313.300,00	789.787,00	35.306.914,00	5.247.006.386,00	5.282.313.300,00	167.773.755,00	5.114.539.545,00	(132.466.841,00)
Konstruksi Dalam Pengajaran	88.741.494.650,00			88.741.494.650,00	88.741.494.650,00	0,00	88.741.494.650,00	0

Perbedaan nilai buku saldo awal Tahun 2024 sebelum dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan senilai Rp665.373.482.189,59 setelah dilakukan penyesuaian perhitungan penyusutan senilai Rp 665.999.922.621,87 terjadi selisih berkurang senilai Rp.626.440.432,28.

Perbedaan sebelumnya dilakukan penyesuaian atau sebelum koreksi pada Akumulasi penyusutan Saldo Awal Tahun 2024 atau per 31 Desember 2023 Audited dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akumulasi Penyusutan Sebelum Penyesuaian/Koreksi (16.329.881.905,00)
- b. Koreksi 626.440.432,28



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Jumlah (15.703.441.472,72)

Hal tersebut dikarenakan pada perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 *Audited* belum terhitung nilai penyusutannya, yaitu pada:

- a. Sekretariat Daerah terdapat 8 unit barang pada Peralatan Dan Mesin.
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 8 unit barang pada Gedung dan Bangunan.
- c. Dinas Perhubungan terdapat 1 barang pada Gedung dan Bangunan.

Adanya penyesuaian atau koreksi akumulasi penyusutan saldo awal Tahun 2024 atau per 31 Desember 2023 *Audited*, maka nilai buku Aset Tetap setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

a. Aset Tetap Per 31 Desember 2023	681.703.364.094,59
b. Akumulasi Penyusutan setelah koreksi	(15.703.441.472,72)
Jumlah	665.999.922.621,87

5.3.1.4 ASET LAINYA

Nilai Aset lainnya Tahun 2024 Propinsi Papua Barat Daya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.697.353.178,00.

Aset Lainnya	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
	Rp18.697.353.178,00	Rp3.208.987.839,63

Aset Lainnya Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 senilai Rp18.697.353.178,00. Mutasi aset lainnya di Tahun



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

2024 merupakan penambahan dari perolehan atas pelaksanaan program dan kegiatan dari perolehan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa aset tidak berwujud dan perolehan karena perturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)	Mutasi Kurang (Rp.)	Saldo Akhir
ASET TIDAK BERWUJUD	3.247.661.978,00	10.952.060.000,00	-	14.199.721.978,00
Aset Tidak Berwujud	3.247.661.978,00	10.952.060.000,00	-	14.199.721.978,00
ASET LAIN-LAIN	-	4.997.368.000,00	-	4.997.368.000,00
Aset Lain-Lain	-	4.997.368.000,00	-	4.997.368.000,00
Jumlah Aset Lainnya	3.247.661.978,00	15.949.428.000,00	-	19.197.089.978,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	(4.997.368.000,00)
ASET LAINNYA (NETTO)	3.247.661.978,00	3.247.661.978,00	-	18.697.353.178,00

Rincian saldo akhir Aset lainnya per 31 Desember 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Tabel 5.49 Aset Lainnya OPD Per 31 Desember 2024

NO	OPD	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-Lain	Total Aset Lainnya
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	10.110.234.978,00	-	10.110.234.978,00
2	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	-	248.085.000,00	-	248.085.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	791.938.000,00	-	791.938.000,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00
5	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	-	249.750.000,00	-	249.750.000,00
7	Sekretariat DPRD	-	-	4.997.368.000,00	4.997.368.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-	199.000.000,00	-	199.000.000,00
9	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		1.950.714.000,00	-	1.950.714.000,00
TOTAL		-	14.199.721.978,00	4.997.368.000,00	19.197.089.978,00

Rekapitulasi penjelasan laporan Aset Tetap Lainnya tambah kurang disajikan pada Lampiran III.q Aset Lainnya dan rincian mutasi Aset Tetap Aset Tetap Lainnya 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.50 Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Akhir per 31 Desember 2023	3.247.661.978,00
Mutasi Tambah 2024	15.949.428.000,00
- LRA Belanja Modal Aset Lainnya	1.888.887.000,00
- Penambahan aset lainnya dari belanja operasi	8.913.173.000,00
- Penambahan karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB)	150.000.000,00
- Penambahan aset lainnya karena reklasifikasi dari peralatan dan mesin	4.997.368.000,00
Mutasi Kurang 2024	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	19.197.089.978,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Penjelasan atas mutasi tambah aset lainnya pada aset tidak berwujud Tahun 2024 sebesar Rp15.949.428.000,00 adalah sebagai berikut:

1. Bertambah dari belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.888.887.000,00 sesuai dengan realisasi belanja modal aset lainnya Tahun 2024.
2. Penambahan aset lainnya dari belanja operasi sebesar Rp8.913.173.000,00 adalah penambahan aset lainnya pada aset tidak berwujud berupa hasil kajian dari relisasi belanja operasi pada belanja barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
3. Penambahan aset lainnya karena perolehan peraturan perundang-undangan (DOB) sebesar Rp150.000.000,00 dari Provinsi Papua Barat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan berupa aplikasi keuangan UPTD Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.
4. Penambahan aset lainnya karena adanya reklasifikasi peralatan dan mesin sebesar Rp 4.997.368.000,00 pada Sekretariat DPRD.

Penjelasan atas mutasi kurang aset lainnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 tidak ada pengurangan pada aset lainnya.

Saldo awal per aset lainnya perlu dilakukan penyesuaian perhitungan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud diperoleh dari penyusutan *audited* tahun 2023 di aset lainnya belum disajikan dengan memperhitungkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud, sehingga perhitungan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud terjadi perbedaan. Hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian perhitungan amortisasi aset tidak berwujud sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

**Tabel 5.51 Rincian OPD Penyesuaian Perhitungan Amortisasi
Saldo Awal Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud**

Uraian	OPD	Nilai Perolehan Saldo Awal (Rp)	Akumulasi Amortisasi sebelum Penyesuaian	Akumulasi amortisasi setelah Penyesuaian	Selisih
(1)	(2)	'(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
Aset Tidak Berwujud	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1.197.061.978,00	0	13.302.471,37	(13.302.471,37)
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	397.000.000,00	0	6.616.667,00	(6.616.667,00)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00	0	4.166.667,00	(4.166.667,00)
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	199.000.000,00	0	6.633.333,00	(6.633.333,00)
	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	954.600.000,00	0	7.955.000,00	(7.955.000,00)
Jumlah		3.247.661.978,00	0	38.674.138,37	(38.674.138,37)

Apabila disandingkan, maka akan diperoleh nilai buku saldo awal
Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.52 Rincian Saldo Awal Penyesuaian Perhitungan
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Aset Lainnya**

Uraian	Nilai Perolehan	Sebelum Penyesuaian/Koreksi		Setelah Penyesuaian/Koreksi		Selisih Akumulasi Amortisasi ATB
		Amortisasi ATB	Nilai Buku	Akumulasi Amortisasi ATB	Nilai Buku	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(2)-(5)	(7)=(3)-(5)
ASET TIDAK BERWUJUD	3.247.661.978,00	0,00	3.247.661.978,00	38.674.138,37	3.208.987.839,63	(38.674.138,37)
ASET TIDAK BERWUJUD	3.247.661.978,00	0,00	3.247.661.978,00	38.674.138,37	3.208.987.839,63	(38.674.138,37)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Perbedaan nilai buku saldo awal Tahun 2024 sebelum dilakukan penyesuaian perhitungan amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp3.247.661.978,00 setelah dilakukan penyesuaian perhitungan amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp3.208.987.839,63 terjadi selisih kurang nilai Rp38.674.138,37 Rincian aset lainnya yang dilakukan penyesuaian perhitungan amortisasi aset tidak berwujud pada lampiran Aset Lainnya dan Perhitungan Akumulasi Amortiasi aset tidak berwujud Tahun 2024.

Perbedaan sebelumnya dilakukan penyesuaian atau sebelum koreksi pada Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud pada saldo awal Tahun 2024 atau per 31 Desember 2023 Audited dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akumulasi Amortisasi ATB Sebelum Penyesuaian/Koreksi	0,00
b. Koreksi	(38.674.138,37)
Jumlah	(38.674.138,37)

Hal tersebut dikarenakan pada perhitungan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 Audited belum terhitung nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berupa kajian dan software, yaitu pada:

Tabel 5.53 Nilai Perolehan Saldo Akhir Aset Lainnya pada Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Rincian ATB	Nilai Perolehan
a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kajian	Rp1.197.061.978,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Software	Rp397.000.000,00
c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software	Rp500.000.000,00
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Software	Rp199.000.000,00
e. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Software	Rp954.600.000,00
JUMLAH		Rp3.247.661.978,00

Adanya penyesuaian atau koreksi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud saldo awal Tahun 2024 atau per 31 Desember 2023 Audited, maka nilai buku Aset Lainnya pada Aset setelah koreksi disajikan sebagai berikut:

a. Saldo Akhir Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 atau Saldo Awal Tahun 2024	3.247.661.978,00
b. Akumulasi Amortisasi ATB setelah koreksi	(38.674.138,37)
Jumlah (Nilai Buku)	3.208.987.839,63

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per masing-masing OPD sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.54 Rincian Akumulasi Amortisasi Per OPD

per 31 Desember 2024

NO	OPD	Uraian	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	ASET LAINNYA	308.563.420,11
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	308.563.420,11
2	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	ASET LAINNYA	2.067.375,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.067.375,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	ASET LAINNYA	49.607.819,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	49.607.819,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ASET LAINNYA	54.166.671,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	54.166.671,00
5	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	ASET LAINNYA	90.000.000,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	90.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	ASET LAINNYA	2.081.250,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.081.250,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	ASET LAINNYA	26.533.332,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	26.533.332,00
8	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	ASET LAINNYA	111.715.950,00
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	111.715.950,00
TOTAL AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD			644.735.817,11



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Rp54.210.508.954,40

Tuntutan Ganti kerugian Daerah per 31 Desember 2024
sebesar Rp. 54.210.508.954,40 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Tuntutan Ganti kerugian Daerah
per 31 Desember 2024

NO	OPD	TAHUN 2023	TAHUN 2024	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.303.743.666,00	10.262.395.119,93	18.566.138.785,93
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	522.008.769,00	3.045.367.331,00	3.567.376.100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.670.083.000,00	5.701.598.007,76	11.371.681.007,76
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	64.210.400,00	274.500.000,00	338.710.400,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	189.061.000,00	56.144.644,00	245.205.644,00
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.205.073.029,00	-	1.205.073.029,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	148.524.269,00	196.181.461,00	344.705.730,00
7	Dinas Perhubungan	2.307.119.972,00	285.921.541,71	2.593.041.513,71
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.136.905.515,00	-	1.136.905.515,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan EK	-	829.835.098,00	829.835.098,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

10	Sekretariat Daerah	1.044.370.000,00	2.107.940.008,00	3.152.310.008,00
11	Sekretariat DPRD	-	1.750.652.310,00	1.750.652.310,00
12	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	327.624.243,00	5.000.000.000,00	5.327.624.243,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93.400.000,00	-	93.400.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	828.853.530,00	66.913.327,00	895.766.857,00
15	Inspektorat Daerah	1.849.065.837,00	897.557.476,00	2.746.623.313,00
15	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Daya	45.459.400,00	-	45.459.400,00
JUMLAH		23.735.502.630,00	30.475.006.324,40	54.210.508.954,40

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.199.721.978,00 terdiri dari software dan kajian yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.56 Aset Tidak Berwujud

URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
Software	4.089.487.000,00	2.050.600.000,00
Kajian	10.110.234.978,00	1.197.061.978,00
JUMLAH	14.199.721.978,00	3.247.661.978,00

Nilai aset tidak berwujud berupa software sebesar Rp4.089.487.000,00 per OPD dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.57 Nilai Aset Tidak Berwujud

Berupa Software Per OPD

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	248.085.000,00
2	Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik Dan Persandian	791.938.000,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000.000,00
4	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	150.000.000,00
5	Sekretariat Daerah	249.750.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	199.000.000,00
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah	1.950.714.000,00
TOTAL		4.089.487.000,00

Nilai aset tidak berwujud berupa kajian Sebesar Rp 10.110.234.978,00 per OPD dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 5.58 Nilai Aset Tidak Berwujud Berupa Kajian Per OPD

NO	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	10.110.234.978,00
TOTAL		10.110.234.978,00

5.3.1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (644.735.817,11) dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.59 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(336.172.397,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(308.563.420,11)
TOTAL		(644.735.817,11)

5.3.1.4.4 Treasury Deposit Facility (TDF) Rp. 1.902.017.000,00

Dana TDF (Treasury Deposit Facility) adalah dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF. Saldo Per 31 Desember 2024 untuk TDF dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Aset Lainnya Dana TDF (<i>Treasury Deposit Facility</i>)	1.902.017.000,00
TOTAL		1.902.017.000,00

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.068.035.214,00. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.60 Kewajiban per 31 Desember 2024

NO	Uraian	Jumlah
1	Kewajiban Jangka Pendek	59.068.035.214,00



2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00
	Total	59.068.035.214,00

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek mencakup utang yang berasal dari Utang Belanja.

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 terdiri dari:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Rp3.603.220.700,00

Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, potongan PPh dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Taperum, Askes, juga termasuk pajak pusat. Rekapitulasi Buku PFK dapat dilihat pada Lampiran IV.a Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) adalah utang yang timbul karena pemerintah daerah bertindak sebagai pemotongan atau pemungutan pajak dan iuran lainnya, yang kemudian wajib disetor kepada pihak ketiga atau entitas lain. Berdasarkan kebijakan Akuntansi adalah merupakan utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Metode pengakuan Utang Fihak Ketiga dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas Pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai. Pengukuran Utang Fihak Ketiga nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

5.3.2.1.2 Utang Belanja Rp55.464.814.514,00

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang belanja ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Utang Belanja

NO	Uraian	OPD	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	PTSP, P2KP, dan KOMINFO	1.679.905.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Dinas Kesehatan, Kominfo, Dinas Perhubungan	4.963.930.890,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	BLUD pada Dinas P2KP	82.000.000,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Dinas Perhubungan, PUPR, Diskominfo	6.013.672.399,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota	BPPKAD	42.725.306.225,00
Total			55.464.814.514,00

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran IV.b Utang Belanja.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada



tanggal laporan. Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.228.935.441.471,86 dari Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.320.420.392.902,97. dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.62 Ekuitas Dana

NO	URAIAN	NILAI
1	Ekuitas	1.805.895.240.257,78
2	Surplus/Defisit-LO	423.040.201.214,08
Jumlah Ekuitas Dana		2.228.935.441.471,86

5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN MARING-MARING POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan– LO tahun 2024 sebesar Rp2.072.889.052.159,02 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO Rp298.442.296.588,02

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp298.442.296.588,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	237.523.287.632,00	70.686.128.349,00	166.837.159.283,00	70,24
2	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	60.919.008.956,02	4.232.890.597,00	56.686.118.359,02	93,05
JUMLAH		298.442.296.588,02	74.919.018.946,00	223.523.277.642,02	74,90

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 sebesar Rp237.523.287.632,00 Rincian nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.64 Pendapatan Pajak Daerah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	56.797.878.618,00	0,00	56.797.878.618,00	100
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	23.174.634.036,00	0,00	23.174.634.036,00	100
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO	101.964.059.707,00	58.708.969.559,00	43.255.090.148,00	42,42
4	Pajak Air Permukaan	9.652.100,00	0,00	9.652.100,00	100,00
5	Pajak Rokok – LO	55.577.063.171,00	11.977.158.790,00	43.599.904.381,00	78,45
JUMLAH		237.523.287.632,00	70.686.128.349,00	166.853.088.883,00	70,24



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5.4.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp60.919.008.956,02. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.65 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	Jasa Giro-LO	6.230.083.113,13	4.126.811.983,00	2.103.271.130,13	33,76
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	840.472.934,00	0,00	840.472.934,00	100,00
3	Pendapatan dari BLUD-LO	34.005.281.699,57	0,00	34.005.281.699,57	100,00
4	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	19.843.171.209,32	106.078.614,00	19.737.092.594,32	99,47
JUMLAH		60.919.008.956,02	4.232.890.597,00	56.686.118.359,02	93,05

5.4.1.1.3 Pendapatan Transfer – LO Rp1.744.714.515.603,00

Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Saldo Pendapatan Transfer – LO tahun 2024 sebesar Rp1.744.714.515.603,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	938.863.666.603,00	1.759.112.762.081,00	(820.249.095.478,00)	(46,62)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	805.850.849.000,00	956.503.417.000,00	(150.652.568.000,00)	(18,69)
JUMLAH		1.744.714.515.603,00	2.715.616.179.081,00	(970.901.663.478,00)	(35,75)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat tahun 2024

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Dana Bagi Hasil-LO	263.826.041.784,00	1.145.493.283.081,00	(881.667.241.297,00)	(76,97)
2	Dana Alokasi Umum (Dau)-LO	600.571.248.000,00	613.266.787.000,00	(12.695.539.000,00)	(2,11)
3	Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik-LO	68.128.220.609,00	0,00	68.128.220.609,00	100
3	Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik-LO	6.338.156.210,00	352.692.000,00	5.985.464.210,00	1697,08
4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	805.850.849.000,00	956.503.417.000,00	(150.652.568.000,00)	(15,75)
JUMLAH		1.744.714.515.603,00	2.715.616.179.081,00	4.460.330.694.684,00	(35,75)

**5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Rp.
29.732.239.968,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO. Saldo lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 sebesar Rp29.732.239.968,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 sebesar Rp29.732.239.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pendapatan Hibah	29.732.239.968,00	35.592.800.000,00	(5.860.560.032,00)	(16,47)
JUMLAH		29.732.239.968,00	35.592.800.000,00	(5.860.560.032,00)	(16,47)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024 menurut objek pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.69 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO tahun 2024

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO					
NO	URAIAN	KAB/KOTA	TANGGAL	2023	2024
1	Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	Kabupaten Tambrauw	9 Januari 2023	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
		Kabupaten Sorong	16 Februari 2023	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
		Kabupaten Raja Ampat	23 Februari 2023	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00
		Kabupaten Maybrat	2 Maret 2023	2.500.000.000,00	2.868.000.000,00
		Kabupaten Maybrat	14 Juni 2023	2.500.000.000,00	5.000.000.000
		Kota Sorong	12 April 2023	5.000.000.000,00	2.000.000.000
		Kabupaten Sorong Selatan	12 Juni 2023	5.000.000.000,00	663.039.968,00
2	Transfer Dana Paitua	Kabupaten Tambrauw	29 November 2023	507.600.000,00	1.794.000.000,00
		Kabupaten Sorong Selatan	21 November 2023	855.600.000,00	891.000.000,00
		Kabupaten Raja Ampat	1 Desember 2023	1.179.600.000,00	2.620.200.000,00
		Kabupaten Maybrat	15 Desember 2023	950.000.000,00	696.000.000,00
		Kota Sorong	30 Desember 2023	2.100.000.000,00	1.200.000.000,00
JUMLAH				35.592.800.000,00	29.732.239.968,00

5.4.2 BEBAN-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban tahun 2024 sebesar Rp1.647.991.169.794,94 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi **Rp1.200.824.817.892,43**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Saldo Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp1.200.824.817.892,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Beban Operasi

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	172.974.933.199,58	39.038.392.507,00	133.936.540.692,58	343,09
2	Beban Barang dan Jasa	725.088.020.507,78	593.800.663.207,17	131.287.357.300,61	22,11
3	Beban Hibah	263.802.583.035,07	155.598.294.707,86	108.204.288.327,21	69,54
4	Beban Bantuan Sosial	37.101.600.000,00	30.350.630.000,00	6.750.970.000,00	22,24
5	Beban Penyisihan Piutang	1.857.681.150,00	-	1.857.681.150,00	100
JUMLAH		1.200.824.817.892,4	818.787.980.422,03	380.179.156.320,40	46,66

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp172,974,933,199,58, dan tahun 2023 sebesar Rp39.038.392.507,00 hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai dari proses mutase ke Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sehingga mengakibatkan kenaikan beban pegawai. Rincian Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Beban Pegawai

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	86.190.475.007,00	14.504.447.107,00	71.686.027.900,00	494,23
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	52.374.919.116,00	21.075.235.000,00	31.299.684.116,00	148,51
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.053.024.599,00	3.308.710.400,00	3.744.314.199,00	113,17
4	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	500.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	233,33



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.516.407.500,00	0,00	5.516.407.500,00	100,00
6	Beban Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	14.163.501.480,00	0,00	14.163.501.480,00	100,00
7	Beban Pegawai BOS	357.850.000,00	0,00	357.850.000,00	100,00
8	Beban Pegawai BLUD	6.818.755.497,58	0,00	6.818.755.497,58	100,00
JUMLAH		172.974.933.199,58	39.038.392.507,00	133.936.540.692,58	343,09

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp725.088.020.507,78 Rincian Beban Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Beban Barang dan Jasa

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Barang	284.421.570.284,65	208.037.324.403,10	76.384.245.881,55	36,72
2	Beban Jasa	237.946.655.052,00	227.185.999.316,00	10.760.655.736,00	4,74
3	Beban Pemeliharaan	21.812.881.109,14	10.887.154.603,00	10.925.726.506,14	100,35
4	Beban Perjalanan Dinas	141.703.629.421,00	108.471.760.325,00	33.231.869.095,93	30,64
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.221.149.298,00	39.218.424.560,00	(12.997.275.262,00)	-33,14
6	Beban Barang dan Jasa BOS	1.091.497.141,00	0,00	1.091.497.141,00	100,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	11.890.638.201,99	0,00	11.890.638.201,99	100,00
JUMLAH		725.088.020.507,78	593.800.663.207,10	131.287.357.300,61	22,11

5.4.2.2 Beban Hibah

Saldo Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp263.802.583.035,07. Dengan rincian Beban Hibah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.73 Beban Hibah

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	6.912.376.100,00	0,00	6.912.376.100,00	100,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	256.890.206.935,07	155.598.294.707,86	101.291.912.227,21	65,10
JUMLAH		263.802.583.035,07	155.598.294.707,86	108.204.288.327,21	69,54

5.4.2.3 Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp37.101.600.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial menurut objek beban sebagai berikut:

Tabel 5.74 Beban Bantuan Sosial

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	39.106.200.000,00	22.785.000.000,00	16.321.200.000,00	71,63
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan	820.000.000,00	0,00	820.000.000,00	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	(2.824.600.000,00)	7.565.630.000,00	(10.390.230.000,00)	(137,33)
JUMLAH		37.101.600.000,00	30.350.630.000,00	6.750.970.000,00	22,24

5.4.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp170.891.169.358,43 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.75 Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.566.743.941,75	4.259.413.264,00	26.307.330.677,75	617,63
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.809.989.336,34	144.846.738,00	28.665.142.598,34	19789,98
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.413.224.028,12	11.893.528.112,00	95.519.570.916,12	803,12
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.456.476.235,11	31.968.791,00	3.424.507.444,11	10712,03
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	644.735.817,11	0,00	644.735.817,11	100,00
JUMLAH		170.891.169.358,43	16.329.756.905,00	154.561.287.453,43	946,50

5.4.2.5 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Beban Transfer tahun 2024 sebesar Rp276.817.863.694,08. Rincian nilai Beban Transfer tahun 2024 menurut objek beban sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Tabel 5.76 Beban Transfer

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	166.140.594.911,08	8.384.011.153,00	157.756.583.758,08	1881,64
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah	110.677.268.783,00	664.556.142.600,00	(553.878.873.817,00)	(83,35)
JUMLAH		276.817.863.694,08	672.940.153.753,00	(396.122.290.058,92)	(58,86)

5.4.2.6 Beban Tak Terduga

Beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan atau beban yang terjadi karena transaksi yang bukan merupakan operasional biasa/ tidak diharapkan.

Beban Tak Terduga adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas. Beban tak terduga diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Saldo Beban Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp 1.315.000.000,00.

5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN MARING-MARING POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan Arus Kas dari 4 (empat) aktivitas yaitu:

1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan
3. Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
4. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas atau dana yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya selama tahun anggaran 2024 sebesar **Rp658.774.443.000,37** dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	2.090.963.535.215,02
- Arus Kas Keluar	Rp	<u>1.432.189.092.214,65</u>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp658.774.443.000,37

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/*Investasi Non Keuangan*

Arus Kas dari aktivitas investasi/Investasi Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/Invsetasi Non Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya selama tahun anggaran 2024 sebesar minus Rp. **661.690.449.521,55** dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk	Rp	-
- Arus Kas Keluar	Rp	661.690.449.521,55

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp(661.690.449.521,55)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/*Pembiayaan*

Arus Kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan defisit atau surplus anggaran.

Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|-------|
| - Arus Keluar | Rp. - |
| - Arus Masuk | Rp. - |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp. -

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/*Non Anggaran*

Arus Kas dari aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya selama tahun anggaran 2024 sebesar **Rp(9.534.220.374,00)** dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - Arus Kas Masuk | Rp 113.031.200.593,00 |
| - Arus Kas Keluar | Rp 122.565.420.967,00 |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp(9.534.220.374,00)

5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023	2024
1	EKUITAS AWAL	5.000.410.956,00	1.320.420.392.902,97
	RK SKPD	0,00	0,00
	RK PPKD	0,00	0,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	1.315.419.981.946,97	423.040.201.214.08
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
	Koreksi Nilai Persediaan:		69.241.440.750,49
	Koreksi Nilai Aset Tetap		414.102.151.881,75
	Koreksi Nilai Aset Lainnya		150.000.000,00
	Koreksi Nilai Aset Lancar		1.981.254.722,57
4	EKUITAS AKHIR	1.320.420.392.902,97	2.228.935.441.471,86

Penjelasan:

1. Saldo awal ekuitas 2024 sebesar Rp1.320.420.392.902,97 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.
2. Surplus – LO sebesar Rp423.040.201.214.08 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.
3. Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.228.935.441.471,86, sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024.



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD

6.1 Kondisi Umum Provinsi Papua Barat Daya

Papua Barat Daya merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang menjadi provinsi ke enam dan disahkan melalui undang-undang. Provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Induk Papua Barat ini disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 17 November 2022. DPR RI menyatakan RUU Provinsi Papua Barat Daya kini telah sah menjadi UU. Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Dengan disahkannya Provinsi Papua Barat Daya ini menambah total jumlah provinsi di seluruh Indonesia menjadi 38 provinsi.

Batas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudra Pasifik
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Papua Barat
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Halmahera dan Laut Seram.

Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya berada di Kota Sorong. Total luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya yakni 38.820,90 Km².

Luas wilayah dan jumlah penduduk per Kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Daya

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kab. Sorong Selatan	6594,31	53.510
2	Kab. Kabupaten Sorong	6544,23	133.593
3	Kab. Raja Ampat	8034,44	66.426



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

4	Kab. Tambrauw	11529,18	30.639
5	Kab. Maybrat	5461,69	27.500
6	Kota Sorong	656,64	287.005
Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Daya		38820.49	598.673

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Papua Barat Daya - BPS Papua Barat 2023

6.2 Kondisi Umum Provinsi Papua Barat Daya

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat MRP, Badan dan Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintahannya. Dalam periode berjalan yaitu tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki susunan perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari;
 1. Biro Umum;
 2. Biro Organisasi;
 3. Biro Pemerintahan;
 4. Biro Hukum;
 5. Biro Perekonomian;
 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD);
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral;



7. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan;
 8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung;
 9. Dinas Perhubungan;
 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
 12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
 14. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan.
- e. Badan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Dasar Pelaksanaan Operasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan utama penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2023 juga didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 14 April 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 29 Tahun 2023 Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga dilandasi dengan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Asli Daerah serta Peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Berdasarkan pasal 404 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang.



BAB VII
PENUTUP

Dalam bab penutup ini diungkapkan berupa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan disusun memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010;
2. Laporan keuangan merupakan komponen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat;
4. Realisasi pendapatan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.090.963.535.215,02 atau 101,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.059.486.955.440,00.
5. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.093.879.541.736,20 atau 80,13% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp2.093.879.541.736,20;
6. Realisasi transfer sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.755.247.396.624,00 atau 99,43% dari anggaran transfer yang ditetapkan sebesar Rp1.765.220.920.000,00;
7. Berdasarkan realisasi total pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.090.963.535.215,02 total belanja selama tahun



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

anggaran 2024 sebesar Rp2.093.879.541.736,20 dan total transfer selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.755.247.396.624,00 maka Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengalami Defisit sebesar Rp(2.916.006.521,18)

8. Dalam tahun anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperoleh penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SilPA) sebesar Rp551.773.656.199,77 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00 sehingga pembiayaan netto Rp554.689.662.720,95 Jika diperhitungkan dengan surplus sebesar Rp(2.916.006.521,18) maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp551.773.656.199,77,-
9. Pendapatan-LO sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.072.889.052.159,02;
10. Beban Operasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.200.824.817.892,43;
11. Jumlah Pendapatan-LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.072.889.052.159,02; sedangkan total Beban selama tahun 2024 sebesar Rp1.649.848.850.944,94; sehingga terdapat Surplus-LO (Pendapatan-LO lebih dari Beban) sebesar Rp423.040.201.214,08;
12. Gambaran Neraca Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya per 31 Desember 2024 adalah total aset Rp2.288.001.623.468,86,- total kewajiban Rp59.066.181.997,00 dan total ekuitas Rp2.228.935.441.471,86;
13. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 menggambarkan saldo awal kas sebesar Rp567.783.046.655,38, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp658.774.443.000,37 arus kas bersih aktivitas



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

investasi/investasi non keuangan sebesar minus (661.690.449.521,55) dan arus kas bersih aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00 serta arus kas bersih aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(9.534.220.374,00) sehingga saldo akhir kas sebesar Rp555.375.023.682,77.

Dari angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar di atas, maka pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 secara umum berjalan lancar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Provinsi Papua Barat Daya.





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
RINCIAN PENERIMAAN JASA GIRO OPD PADA KAS DAERAH
Per 31 Desember 2024

NO. REKENING	SKPD	NILAI (Rp)
2000105000596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 5.822.717,00
2000105000456	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 3.803.171,00
2000105000386	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp 193.634,00
2000105000574	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 312.135,00
2000105000563	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp 546.496,00
2000105000655	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	Rp 1.530.220,00
2000105000552	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	Rp 341.638,00
2000105000482	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Rp 298.094,00
2000105000515	Dinas Perhubungan	Rp 743.119,00
2000105000541	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	Rp 269.345,00
2000105000633	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Rp 679.087,00
2000105000445	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 366.506,00
2000105000530	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp 705.448,00
2000105000611	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	Rp 192.529,00
2000105000434	Sekretariat Daerah	Rp 4.551.348,00
2000105000773	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya	Rp 4.305,00
2000105000666	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	Rp 1.564.977,00
2000105000644	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Rp 4.531.991,00
2000105000600	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 382.770,00
2000105000493	Inspektorat Daerah	Rp 82.680,00
2000105000460	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp 170.035,00
2000105000526	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Daya	Rp 695.327,00
2000105000670	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 428.703,00
Total		Rp 28.216.275,00



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
RINCIAN PENERIMAAN JASA GIRO PADA KAS DAERAH
Per 31 Desember 2024

NO REKENING	SKPD	NILAI (Rp)
2000102091222	REKENING KAS UMUM DAERAH PEMPROV. PAPUA BARAT DAYA (Bank Papua)	Rp 2.167.339.575,00
2000107000135	DANA OTSUS 1,25 % PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Rp 346.357.840,00
2000107000124	DANA OTSUS 1 % PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Rp 245.656.321,00
2000107000150	DBH MIGAS OTSUS PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Rp 321.366.488,00
2000107000146	DTI OTSUS PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Rp 565.843.224,00
-	REKENING PENERIMA BEASISWA UNGGULAN	Rp 9.315.903,13
2000105000622	PAD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	Rp 13.443.264,00
2000102000024	TITIPAN REKENING SILPA	Rp 2.496.382.066,00
31001004230309	REKENING PENAMPUNG PAITUA	Rp 36.162.157,00
	Total	Rp 6.201.866.838,13



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
LAMPIRAN PENDAPATAN DENDA
ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
Per 31 Desember 2024

Tanggal	Uraian	NILAI (Rp)
15 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK KEKU VOLUM PEK PENG MEUBELAIR KNTR INSPEKTORAT PBD/CV MEKAR MAFIF/YEFTA A	390.573.140,00
15 Januari 2024	Trf BMRIIDJA skngw1078807 BAWASLU PROW PAPUA BARAT DAYA	346.760.000,00
15 Januari 2024	STOR KEMB TEMUAN PEMER BPK KEL BYR JALDIS KEG BIMTEK PENG APIP DI BALI THN 2023/INSPEKTORAT	97.500.000,00
15 Januari 2024	STOR KEMB STSD TEMUAN PEMERIK BPK ATAS KEKU VOLUME PEKER PEK REHABILITSD GEDUNG KNTR INSPEKTORAT THN 2023/CV ACAMO LIFE/ROBEKA J	157.254.000,00
15 Januari 2024	STOR KEMB TEM PEMER BPK ATAS KEKU VOLUM PEK PENG PERALATAN & MESIN KNTR INSPEKTORAT PBD THN 2023/CV MEKAR MAFIF/YEFTA A	84.884.400,00
16 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK BEL JALDIS (PENGINAPAN) KEG DIKLAT AMDAL PENING KAPSITAS MHA & KEARIFAN LOKAL/LHKP PBD/WELMINCE ISIR	24.505.000,00
16 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK BEL JALDIS KEG PENYE DATA & INFOR WIL HUTAN PROSDUKSI/LHKP PBD/WELMINCE ISIR	36.000.000,00
16 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK BEL JALDIS KEG DIKLAT AMDAL PENING KAPSITAS MHA & KEARIFAN LOKAL/LHKP PBD/WELMINCE ISIR	7.250.000,00
16 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK HONOR TIM PELAK KEG FASILITAS PENY PERDA KAB/KOTA & PERDA BUP/WALKOT/DUKCAPIL & PMK PBD/YUSNIA	250.000,00
16 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK BEL KEG KNTR BHN CETAK KEG FASILITAS PENY PERDA KAB/KOTA & PERDA BUP/WALKOT/DUKCAPIL & PMK PBD/YUSNIA	45.320.000,00
16 Januari 2024	STOR KEMB TEM BPK BEL JALDIS BIASA KEG PENYE DATA & INFORMASI WIL HUTAN PRODUKSI /LHKP PBD/WELMINCE ISIR	8.640.000,00
12 Februari 2024	DNS KOPERINDAG/SET KEMBALI ATS BLNJ PD DPA PD SUB KEG OPERASI PASAR DLM RGK STBLSI HRG PGN PKOK YG DMPKNY BBRP DAERAH	514.640.000,00
12 Februari 2024	CV LAMBANAN/PEMBYRN DENDA KTRLBTAN PKT RYMAH PASTORI	30.008.000,00
16 Februari 2024	SETORANKEMBALI PERJALANAN DINAS BIASA KEG MRP DAU DARI KESBANGPOL	11.610.478,00
22 Februari 2024	CV ELISABET SETOR KETERLAMBATAN PERKERJAAN ATAS PEMBANGUNAN BREAKWATER DI PULAU BUAYA	29.549.000,00
23 Februari 2024	PT. TUGU MERAH PERKASA / SET. KETERLAMBATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MAPURA - KOKAS	65.792.125,00
28 Februari 2024	DINAS PUPR PROV PBD/ CV SEMESTA INDAH PAPUA/SETOR TEMUAN & KETERLAMBATAN ATAS PKRJN PEMB BOX CULVERT JL SAPTA	7.396.154,67
29 Februari 2024	DINAS PMPTSP SETOR KEMBALIBELANJAPLEDINS BIASA KEG PENYEDIA LKPPM TERHADAP PEL TERPADU PERIZINAN&NONPERIZINAN	1.137.100,00
29 Februari 2024	DIN PENANAMAN MODAL & PTSP SETOR KEMBALI BBM KEG PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMINMET PERIZINAN & NON PERIZINAN	4.750.000,00
29 Februari 2024	DINS PMPTSP SETOR KEMBALI ATAS BEL JALDIS BIASA KEG PENETAPAN FASILITAS/INSERTIF 2023	1.188.840,00
29 Februari 2024	CV MITRA PAPUA/PEMBY KTRLMBTN PKRJN PEMB JLN COR PONPER KM.16	22.833.360,00
29 Februari 2024	DIN PMPTSP SETOR KEMBALI BELANJA JALDIS BIASA KEG PEYIAPAN MATERI KRJ SAMA DGN DUNIA USAHA PROV PBD 2023	2.458.240,00
29 Februari 2024	CV HASTA PURWA MANDIRI/PEMBY KTRLMBTN PKRJN SPAM	27.961.070,00
29 Februari 2024	DIN PMPTSP SETOR KEMBALI ATAS BELANJA JALDIS BIASA KEG KOORDINASI &SINKRON PEMBINAAN PELAKSANA PM 2023 OSTUS SPECIFIK GRANT	587.700,00
29 Februari 2024	CV BHAKTI PAPUA ABADI/PEMB DENDA KTRLMBTN PENY PKRJN PEMBGN SLRN AIR KLWK KOTA SRG DR DINAS PUPR PBD	6.737.619,00
29 Februari 2024	DINS PENANAMAN MODAL & PTSP SETOR KEMBALI BEL MAKAN MINUM KEG PENYD LYN KONSUL & PNGADUAN MYRKT TRHDP PELIZINNONIZIN2023	5.000.000,00
1 Maret 2024	DNS PTSP/ROSSILIA AUNIM/SET KMBL BELANJA PERJALANAN DNS BIASA, KEG PENYELENGGARAAN RAPAT KOOR & KONSULTASI SKPD T.A 2023 (DAU)	2.356.000,00
4 Maret 2024	SETORAN KTRLMBTN PKRJAAN PEMB JMBTN JL.DANAU TEMPE/CV RANGGA BIMA	9.214.000,00
4 Maret 2024	PT SANTANA ADI DAYA SETORAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN PLTS KAB RAJA AMPAT	287.861.481,38
4 Maret 2024	PT SANTANA ADI DAYA SETORAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN PLTS KAB	265.423.490,57
6 Maret 2024	Trf BNINIDJA skngw1112218 SURYA TIMUR PAPUA	38.554.400,00
7 Maret 2024	PT CAHAYA ZAMRUD IND SETORAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN PLTS KAB TAMBAUW	233.562.730,93
13 Maret 2024	DINAS PUPR PROV PBD/ CV PAPUA ABADI SEMESTA/ SETOR KETERLMBTN PKRJN ATS PENATAAN KAWASAN PERKANTORAN KM 8/ METUSALA SARWOM	43.515.420,00
14 Maret 2024	SET KTLMBTN PKRJAAN PEMB SALURAN AIR BERSIH FATEGOMI CV MEKAR MAFIF	165.062.000,00
20 Maret 2024	PT PAPUA CREMONA SETORAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN FEF-ASE MARE TAMBAUW	140.646.100,00
26 Maret 2024	CV SULAWESI KARYA 88 SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK PEKERJAAN SARANA AIR BERSIH/WAISAI	149.638.000,00
28 Maret 2024	SET KTRLMBTN PKRJAAN BLNJ MODAL PEMBGN GEDUNG POLRESTA KOTA	86.565.945,95
28 Maret 2024	SET KTRLMBTN PKRJN BLNJ MODAL PRKUATAN TEBING POLRESTA SRG	107.685.225,23
2 April 2024	DISNAKER TRANSMIGRASI ENERGI & SDM SETORAN KETERLAMBATAN PEK PLTS KAB MAYBRAT PT SANTANA ADI DAYA	273.295.063,09

Tanggal	Uraian	NILAI (Rp)
2 April 2024	DISNAKER,TRANSMIGRASI ENERGI & SDM SETORAN KETERLAMBATAN PEK PLTS MORAID KAB TAMBRAUW	254.872.633,00
5 April 2024	CV WIRA KARYA SET KEMBALI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEK PEMELIHARAAN GEDUNG DEWAN KM 8	76.299.500,00
22 April 2024	TITIP 2000102091222-BMRIID	311.553.851,00
15 Mei 2024	DINAS PUPR PROV PBD CV PAPUA GEMILANG ABADI SET DENDA KETERLAMBATAN PEK DRAINASE JL PEND SEG II	4.047.600,00
15 Mei 2024	DINAS PUPR CV KEMBAR MALAMOI JAYA SET DENDA KETERLAMBATAN PEK DRAINASE JL PEND SEG I	23.880.900,00
5 Juni 2024	KELEBIHAN PEMBYRN PEK PENGKTN JLN TEMINABUAN(KEYEN) BOLDON- AYAMARU PT MARVIN PUTRA	200.000.000,00
13 Juni 2024	BPPKAD PROV PBD/SET KMBLI ATS SISA TU SUBKEG ANALISADAN PENGMBGN PJK DAERAH SRTA PENY KBJKN PJK DAERAH THN 24/HADI KISWANTO	430.982,00
27 Juni 2024	CV NABOR / SETORAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KAISEPO	88.085.000,00
30 Juni 2024	PENERIMAAN JASA GIRO DTI OTSUS BULAN JUNI 2024	47.539.209,00
3 Juli 2024	DPMPTSP SET KEMBALI JALDISBIASA TIKET 1 ORG KEG PNYDIAAN & PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI IZIN BERUSAHA	33.740,00
3 Juli 2024	DPMPTSP SETORAN KEMBALI JALDIS BIASA TIKET 2(DUA) ORG KEG PENYEDIAAN & PENGELOLAAN IZIN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	1.007.050,00
5 Juli 2024	DNS KOPERINDAG/SET KMBLI ATS BLNJ PD DPA KEG FSLTS PROMOSI DI DN DAN LN UTK PRDK IKM/SONYA M PATTY	45.000.000,00
22 Juli 2024	PT TOPS PAPUA JAYA/SET KTRLMBTN PKRN PEMB GDG SRBGN A KAB TAMBRAUW/JEMMY SUMARIO	320.000.000,00
23 Juli 2024	etoran pengembalian atau temuan bpk pada pekerjaan penataankawasan viktory tahun 2023	30.000.000,00
24 Juli 2024	DPUPR-CV WIRA KARYA JAYA SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DEWAN KM 8	50.510.000,00
24 Juli 2024	DPPLH KEHUTANAN & PERTANAHAN-CV SORONG FOTO BOOTH SETORAN KEMBALI ATAS DOUBLE POSTING SP2D TA 2023	142.908.750,00
26 Juli 2024	SET KMBLI ATS BDG PENGDN & PMBRHTIAN KPGWN ASN (KEG KRDNS & FSLTSI PNS DAN P3K, KEG PENGE DT KPGWN	184.922.880,00
26 Juli 2024	BAPPERINDA PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK RI SEWA KENDARAAN BERMOTOR TA 2023	152.800.000,00
26 Juli 2024	SEKRETARIAT DAERAH/SET KMBLI ATAS KEGIATAN FSLTSIPENATAAN WLYH : BLNJ PRJLANAN DNS KE KAB MAYBRAT DAN KAB SRG SLTN Rp.181.900	181.900.000,00
26 Juli 2024	BPPKAD SETORAN KEMBALI SISA TPP TA 2023	635.200.000,00
26 Juli 2024	DISNAKERTRANS ESDM SETORAN KEMBALI SP2D 001160/SP2D/TU/2.07.00.00.01.0000/12/2023	105.000.000,00
26 Juli 2024	BPPKAD SETORAN KEMBALI KEGIATAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	228.089.243,00
29 Juli 2024	BIRO ORGANISASI PENGEMBALIAN TEMUAN BPK TA 2023 PROV PBD	280.000.000,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG RENCANA KEG DAK IRIGASI 07-13AGS2023(SOQ-CGK)	392.002,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG PENAJAMAN USUSAN DAK FISIK INFRASTUKTUR (SOQ-CGK)	912.000,00
29 Juli 2024	SETDA BIRO PEMERINTAHAN SETORAN KEMBALI KEG JALDIS FASILITASI PENATAAN WILAYAH	9.628.480,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG DAK FISIK INFRASTRUKTUR TGL 4-9 JULI 2023 (SOQ-CGK)	1.442.153,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JALDISKEG VERIFIKASI DOK TEKNIS DAK BID JALAN TGL 02-06 OKT 2023 (SOQ-MKW)	764.000,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN SANITASI TGL 23-17 AGS 2023 (SOQ-CGK)	912.000,00
29 Juli 2024	DINAS INSPEKTORAT SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK BLJ BRG PAKAI HABIS TDK SESUAI DGN KONDISI SENYATANYA TA 2023	61.261.200,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG KOORDINASI MONITORING & EVALUASI PELAKSAAN DAK TGL 17 OKT (SOQ-MKW)	764.700,00
29 Juli 2024	SETDA BIRO PEMERINTAHAN SETORAN KEMBALI KEG FASILITAS PENATAAN WILAYAH KELEBIHAN TRANSPORTASI KE KAB MAYBRAT,KAB SORSEL	400.000.000,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR PROV PBD / AN CV MITRA PAPUA / SET KELEBIHAN PEMBYRN PEKERJAAN PEMB JLN COR PONPES KM. 16	50.000.000,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG FGD EKSPOS HASIL PENINJAUAN KEMBALI & REV TATARUANG PULAU PAPUA(SOQ-CGK)	912.000,00
29 Juli 2024	BAPPERIDA PROV PBD/STRN KMBLI A/TEMUAN BPK - RI PD PERJLNAN DNS BIASA YG TDK TERREALISASI PD TA 2023	257.106.145,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG RENCANA KEGIATAN DAK IRIGASI TGL 7-13 AGS 2023 (SOQ-CGK)	912.000,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JALDISKEG VERIFIKASI DOK TEKNIS DAK BID JALAN TGL 12-14 OKT 2023 (SOQ-MKW)	584.000,00
29 Juli 2024	DINAS PUPR SETORAN KELEBIHAN JALDIS KEG KOORDINASI DAK PADA BAPPENAS TGL 24-29 AGS 2023 (SOQ-CGK)	912.000,00
30 Juli 2024	DISKOMINFO SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK JALDISPAKET MEETING DALAM KOTA SUB KEG PENYEDIAAN ADM PELAKSAAAN TGS ASN	25.000.000,00
30 Juli 2024	BPPKAD PROV PBD / MAIKE YULITA DATUAN/ SET KEMBALI BLNJ KELEBIHAN PMBYRN TPP 2023	6.650.000,00
30 Juli 2024	DISDUKCAPIL & PMK PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT PENDUDUK TA 2023 (DAU)	29.107.472,00
30 Juli 2024	DISKOMINFO SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK JALDISBIASA SUB KEG PENYELENGGARAAN RAKOR & KONSULTASI SKPD	834.540,00
30 Juli 2024	DISKOMINFO PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK JALDIS BIASA SUB KEG KORDIN & SINKRONPENUMPLN,PEN GLOHAN, ANALISIS&DISEMINASISTAT IST	117.316.000,00
30 Juli 2024	DISKOMINFO SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK JALDISBIASA SUB KEG PLKSANAAN KEAMANAN INFO & PEMDA PROV BASIS ELEKTRONIK NON ELEKTRONIK	216.222.170,00

Tanggal	Uraian	NILAI (Rp)
31 Juli 2024	DINAS PNDDKN & KEBUD PROV PBD / NURSANTI SESA / SET KEMBALI BELANJA DPA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PEND	23.130.000,00
31 Juli 2024	SET KMBLI ATS KEG FSLTSI LMBG PROFESI ASN BLNJ ATK, SEWA KNDRN, DAN HONORARIUM	93.400.000,00
31 Juli 2024	SAMAUN SALIM/STAF BPPKAD PROV PBD/STRN KEMBLA/ KELEBHN PEMBYRN TPP 2023 AN. SAMAUN SALIM TAHUN 2023	6.650.000,00
31 Juli 2024	BPPKAD SETORAN KEMBALI KELEBIHAN BYR TPP TA 2023 AN TINA YUAN SYEBA JITMAU(MENINNGAL)	19.950.000,00
31 Juli 2024	DISDIK PROV PBD SETORAN KEMBALI ATAS (BELANJA DPA) KEG HIBAH KE YAYASAN PENDIDIKAN GOLDEN GATE UTAMA	514.457.834,00
31 Juli 2024	DISDIK PROV PBD SETORAN KEMBALI ATAS (BELANJA PADA DPA) KEG PENGADAAN ALAT MUSIK DI SLB KT SRG	6.050.000,00
31 Juli 2024	YULIANA IDYI/STAF DISDUKCAPIL PROV PBD/STRN KEMBLI A/ KELEBHN PEMBYRN TPP 2023 ANYULIANA IDYI THN 2023	19.950.000,00
2 Agustus 2024	BIRO ORGANISASI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA/PENGEMBALIAN TEMUAN BPK THN ANGGARAN 2023 PBD	200.000.000,00
5 Agustus 2024	SIPORA GEBSE/KESBANGPOL PROV PBD/STRN KEMBLI ATS BLNJ PERJALANAN DINAS (OTSUS)	5.000.000,00
5 Agustus 2024	DISDUKCAPIL SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK KEG PEMANTAUAN&EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN 2023(OTSUS UMUM)	35.768.000,00
5 Agustus 2024	DISDUKCAPIL SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK KEG BIMTEK PENCATATAN SIPIL (OTSUS BLOCGRANT)	96.002.440,00
5 Agustus 2024	DINKES & PENGENDALIAN PENDUDUK & KB PROV PBD/SET KEMBALI TEMUAN 2023 ATAS BELANJA KEG ADVOKASI, SOSIALISASI DAN PROMOSI IPK (PP ASI)	102.260.000,00
5 Agustus 2024	DINKES & PENGENDALIAN PENDUDUK & KB PROV PBD/ SET KEMBALI BELANJA BAHAN HABIS PAKAI T.A 2023	61.987.000,00
5 Agustus 2024	DISDUKCAPIL SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK KEG KOORD PENYELENGGARAAN ENCTTAN SIPIL KE PEMERINTAH PUSAT & KAB/KOTA DLM SATU PROVDAU	56.667.030,00
5 Agustus 2024	DPMPTSP PROV PBD / SETKEMBALI TEMUAN BPK SUB KEG PENYIAPAN MATERI KERJASAMA DGN DUNIA USAHA SESUAI KEWENANGAN PROV THN 2023	50.000.000,00
5 Agustus 2024	SETORAN KETERLAMBATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JL KLAMIT-TOFOT TEMINABUAN	250.000.000,00
5 Agustus 2024	PT. IRMAN JAYA MARTABE / SETORAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN ATAS PEKERJAAN PENINGKATAN YONAS MAMBRAS	200.000.000,00
6 Agustus 2024	DISDUKCAPIL SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK KEGIATAN SOSIALISASI PENDAFTARAN PENDUDUK (OTSUS BLOCGRANT)	29.107.472,00
6 Agustus 2024	DINKES & PENGENDALIAN PENDUDUK&KBPROVPBD/SET KEMBALI ATAS TEMUAN 2023 BELANJA KEG PENGE PLYNN KSHTN BAGI PENDUDUK TRDMPK KRISIS KSH	40.680.000,00
6 Agustus 2024	SETDA PROV PBD-CV REZKY INDAH PAPUA SETORAN KEMBALI ATAS TEMUAN BPK PEKERJAAN PENYEDIAAN MAKAN & MINUMAN	100.000.000,00
6 Agustus 2024	DNS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN/SET KMBLI ATS SISA DN HIBAH YG TDK DIGNKN PD KEG HIBAH UANG KPD SMKN AYAMARU/NURSANTI SESA	7.725.352,00
6 Agustus 2024	BIRO HUKUM PROV PBD / ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH / PENGEMBALIAN I TEMUAN BPK THN ANGGARAN 2023 PROV PBD	50.000.000,00
6 Agustus 2024	DISPORAPAREKRAF/NUR NTANG/SET KEMB MONITORING DN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN (OTSUS SPESIFIK GRANT)	3.349.700,00
6 Agustus 2024	DISPORAPAREKRAF SETORAN KEMBALI KEGIATAN PARTISIPAN & KEIKUTsertaan DLM KEG KEPRAMUKAAN (OTSUS SPESIFIK GRANAT)	133.346.000,00
6 Agustus 2024	DINAS P2KP PROV PBD SETORAN KEMBALI JALDIS BIASA BULAN CINTA LAUT (OTSUS SPESIFIK GRANT) TA 2023	50.000.000,00
6 Agustus 2024	BIRO ORGANISASI PROV PBD / FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN / PENGEMBALIAN TEMUAN BPK THN ANGGARAN 2023	229.970.000,00
6 Agustus 2024	DISPORAPAREKRAF/NUR INTANG/SET KEMB BLNJ KOORDNS, SINKR DN PENYELGRN PENGKTN KAPS DAYA SAING WIRAUSH MUDA (OTSUS SPESIFIK GRANT)	88.304.420,00
6 Agustus 2024	DISPORAPAREKRAF/NUR INTANG/SET KEMB PENYLGPN KEJUARAAN MULTI IVEN DN SINGLE IVENT (OTSUS SPESIFIK GRANT)	1.863.560,00
6 Agustus 2024	SETDA PROV PBD-CV PAPUALUWU RAYA SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK PEKERJAAN PENYEDIAAN MAKANAN& MINUMAN	180.000.000,00
6 Agustus 2024	DNS PNDDKN DAN KBDYAAN/SET KMBLI ATS DENDA KTRLMBTN PD KEG PENGDAAN ALT PRKTIKUM SMKS PELITA (CV FILYA SEHATI JAYA)/NURSANTI S	15.000.000,00
9 Agustus 2024	TITIP 2000107000146-BNINID 500jt,300jt,200jt	1.000.000.000,00
9 Agustus 2024	DINAS PUJP PROV PBD / PT. NESATA MAKERADI / SET KEMBALI KELEBIHAN PEMBYRN ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN	53.497.000,00
12 Agustus 2024	DINKES PENGENDALIAn PENDUDUK DAN KB PROV PBD / SETORAN KEMBALI BELANJA PERJALANAN DINAS TA 2023	317.081.769,00
13 Agustus 2024	DINAS PUJP CV PAPUA ABADI SEMESTA SETORAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN PERKANTORAN KM 8	100.000.000,00
14 Agustus 2024	SETDA SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK TA 2023	25.000.000,00
15 Agustus 2024	DLHPK PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK ATAS JALSDIS BIASA KEGIATAN PELAKSANAAN KLHS	24.000.000,00
19 Agustus 2024	KONI PROV PBD/STRN KEMBALI ATS KELEBIHAN PEMBYRN BENLANJA SEWA KENDRN OPRSIONAL	83.795.000,00
19 Agustus 2024	KONI PROV. PBD/STRN KEMBALI ATS KELEBIHAN PEMBYRN BELANJA BERBIE AQUA MAGIC& SACRET INVISIBLE INK	332.000,00
19 Agustus 2024	KONI PROV PBD/STRN KEMBLATS KELEBIHAN PEMBYRN BELANJA MAKAN MINUM	79.200.000,00
20 Agustus 2024	DISKOMINFO PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK JALDIS BIASA SUB KEG RAKOR & KONSULTASI SKPD (DAU)	15.460,00
20 Agustus 2024	MPR PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BELANJA DPA KEG PENINGKATAN KAPASITAS ASN TA 2023	40.271.150,00
20 Agustus 2024	DINAS PERHUB PROV PBD / SETORANKEMBALI BELANJA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PJK PERORANGAN DINAS T.A 2023	15.000.000,00
20 Agustus 2024	DLHPK PROV PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK ATAS BELANJA JALDIS BIASA KEG PENYIAPAN & PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL TA 2023	22.808.410,00
20 Agustus 2024	DHARMA WANITA PBD SETORAN KEMBALI TEMUAN BPK HIBAH DW KEG KOORNINASI & SINKS KSJRTAAN RYKT BID PEMBRDYAN PEREMPUA & PERLNNDNG A	4.172.443,00

Tanggal	Uraian	NILAI (Rp)
22 Agustus 2024	DINAS PERHUB PROV PBD / SETORAN KEMBALI BELANJA PEK. PEMB TERMINAL TYPE B TAHAN II KAB SORSEL	291.000.000,00
22 Agustus 2024	BIRO PEREKONOMIAN & ADM PEMBANGUNAN SETORAN KEMBALI JALDIS BIASA KEG FASILITASI KEBIJAKAN EKONOMI MIKRO TA 2023 (DAU)	4.750,00
22 Agustus 2024	BIRO HUKUM PROV PBD / PENGEMBALIAN SISA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023	432.000,00
22 Agustus 2024	BIRO PEREKONOMIAN & ADM PEMBANGUNAN SETORAN KEMBALI JALDIS BIASA KEG KOORDINASI,SINKS & EVALUASI KEBIJAKAN PRTANIAN KEHTNAN	30.480,00
23 Agustus 2024	DINS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN PROV PBD/SETORN KMBLI ATS BELANJ HIBAH UANG KPD UNIV WERISAR	100.000.000,00
23 Agustus 2024	DINS PENDDKAN & KEBUDYAAN PROV.PBD/STRN KMBL ATS DENDA KETRLMBTN/HIBAH UANG KPD SMK PELAYARAN PUTRASAMUDRA(CV ARAUNA MANDIRI)	10.000.000,00
26 Agustus 2024	CV NABOR (MERI T. KOMBONG) / SET. KET. PEK. PEMBANGUNAN JEMBATAN KAISEPO	300.000.000,00
26 Agustus 2024	SEKRETARIAT DAERAH/SETORAN PENGEMBALIANATAS TEMUAN BPK TA.2023/BELANJA HONORARIUM PERANGKAT UKPBJ	30.000.000,00
26 Agustus 2024	DINAS PERTANIAN KELAUTAN & PERIKANAN SETORAN KEMBALI KEG BULAN CINTA LAUT OTSUS	100.000.000,00
27 Agustus 2024	DLHKP CV PERMATA PAPUASETORAN KEMBALI TEMUAN BPK PEKERJAAN PEMBUATAN TAMAN HUTAN RAKYAT	21.700.000,00
3 September 2024	YAYASAN BALAK BILEAM PAPUA/ SET KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA BANTUAN MODAL USAHA OAP	120.000.000,00
3 September 2024	SET KMBLI TEMUAN BPK ATS SP2D NO:001257/SP2D/TU/2.12.2.13.0.00.01.0000/12/2023	40.000.000,00
3 September 2024	CV PAPUA LUWU RAYA/SET KMBLI ATS TMUAN PMRKSAAAN BPK PD PKRJN PENYEDIAAN MKNAN DAN MNMAN	210.000.000,00
3 September 2024	CV REZKY INDAH PAPUA/SET KMBLI ATS TMUAN PMRKSAAAN BPK PD PKRJN PENYEDIAAN MKNAN DAN MNM/DANCE	180.000.000,00
3 September 2024	SET KMBLI ATS SP2D NO.000540/SP2D/TU/3.27.09.3.25.01.0000/11/2023/PASKALINA BARU/DNSP2KP	100.000.000,00
5 September 2024	DINAS SOSIAL / SETORAN KEMBALI ANGSURAN PERTAMA TEMUAN BPK BLNJ PERJALANAN DINAS KEG PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PKRJA SOSIAL	20.150.000,00
6 September 2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV PBD / SET KEMBALI (BELANJA PADA DPA) KEGIATAN HIBAH KE YAYASAN PENDIDIKAN GOLDEN GATE UTAMA	1.419.885.646,00
10 September 2024	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROV.PAPUA BARAT DAYA / SET KEMBALI TEMUAN (BLNJ PD DPA) KEGIA PENINGKATAN KAPASITAS ASN 2024	18.364.000,00
11 September 2024	YAYASAN SORAYA MANDIRI/SETOR KEMBALI TEMUAN BPK A/BANTUAN SOASIAL(DANA HIBAH)	20.000.000,00
12 September 2024	DINAS PUPR PROV PBD/SET KELEBIHANPEMBAYARAN PEKERJAAN PERJALANANDINASPUPR KEGIATAN FGD EKSPOS	912.000,00
13 September 2024	DISDUKCAPIL & PMK PROVINSI PAPUA BARAT DAYA / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEG PELAK PEMBINAAN UMUM KOOR BDG KERJASAMA THN 2023	64.610.591,00
13 September 2024	FORUM FINYA MANA SAURO MAYBRAT/STRN KEMB TEMUAN BPK ATS BELNJ KOORDNS SIONKRONISASI DA CAPAIAN KINRJ KEBIJKN KESEJHTRN RAKYAT	35.542.000,00
13 September 2024	SEKRETARIAT DAERAH/STRAN PENGEMBALIAN ATS TEMUAN BPK TA.2023	20.000.000,00
18 September 2024	CV MITRA PAPUA/SETORAN KELEBIHAN PEMBYRN ATS PEKERJAAN PEMBANGUNANJALANCOR POMPES KM16	100.000.000,00
19 September 2024	SET KTRLMBTN PKRJN PMBGN GDG SERBAGUNA KAB TAMBRAUW/PT TOPS PAPUAJAYA/JEMMY SUMARIO	1.011.671.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK/SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL THN ANGG 2023	10.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD THN ANGGARAN 2023	10.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEG PENYEDIAANLAYANAN KONSULTASI & PENGELOLAAN PENG MSYKT THN ANGGARAN 2023	10.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI & PENGE MSYKRT THN ANGGARAN 2023	10.029.800,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENG MSYRKT THN ANGG 2023	10.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MDDAL KEWE PROV THN ANGGARAN 2023	10.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DLM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF THN ANGG 2023	50.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK CV KARABAS AYAMI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGistik KANTOR THN ANGGARAN 2023	10.000.000,00
20 September 2024	SET KTRLMBTN PKRJN PEMB SLRN SUNGAI KLAGISON/PT NESATA MAKERADI/ERNES YAUWALATA	756.809.110,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN PENYEDEIAN LAYANAN KONSULTASI & PENGELOLAAN PENG MSYRKT THN ANGG 2023	10.000.000,00
20 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD THN ANGGARAN 2023	10.000.000,00
21 September 2024	DPMPTSP / SET KEMBALI TEMUAN BPK SUB KEGIATAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM THN ANGG 2024	10.000.000,00
23 September 2024	DINAS PUPR PROV PBD/CV. PAPUAABADI SEMESTA/SET KELBHN PEMBY PEKRN PENATAAN KAWASAN PERKNTRN KM.8	434.599.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:96.00/04.0/001030/SP2D/TU SUB KEG PENYIAPAN MATERI KERJSM DGN DUNIA USAHA TA 2023	200.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUANBPKATSSP2D NO:96.00/04.0/001030/SP2D/TU SUB KEG PENYIAPAN MATERI KERJSM DGN DUNIA USAHA TA 2023	10.800.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUANBPKATSSP2D NO:96.00/04.0/001030/SP2D/TU SUB KEG PENYIAPAN MATERI KERJSM DGN DUNIA USAHA TA 2023(DAU)	20.000.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:CV KARANAS AYAMI SUB KEG PENYDN BHN LOGSTIK KNTR TA 2023 (DAU)	20.000.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:96.00/04.0/000236/SP2D/GU SUB KEG PENYLGRN RAPAT KOORDNS DN KONS LTS SKPD TA 2023(DAU)	20.000.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KEMBL TEMUANBPKATSSP2D NO:96.00/04.0/0001030/SP2D /TU SUB KEG PNYDIAN LYN KONS LT DN PENGLN PENGADUAN MSYRK TA2023	20.000.000,00

Tanggal	Uraian	NILAI (Rp)
26 September 2024	DPMPTSP/SET KEMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:96.00/04.0/0001030/SP2D/TU PD SUB KEG PNYDIAN LYN KONSLT DN PENGLN PENGADN MSYRK TA2023	20.000.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:96.00/04.0/000722/SP2D/TU SUB KEG PENTPN KEBJKN DAERAH DLM PEMBRN FASLTS/INSENTIF TA2023	40.000.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:96.00/04.0/000236/SP2D/GU SUB KEG PENYELGRN RAPAT KOORDNS DN KONSLTS SKPD TA 2023	20.000.000,00
26 September 2024	DPMPTSP/SET KEMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:96.00/04.0/0001030/SP2D/TU PD SUB KEG PNYDIAN LYN KONSLT DN PENGLN PENGADN MSYRK TA2023	20.000.000,00
27 September 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATS SP2D NO:REK 2000102091222 (RKUD PBD) SUB KEG KOORDS&SINKRNS PEMNTAUAN PLKS PENANMAN MDAL TA2023	9.000.000,00
27 September 2024	PT PULAUDUA SENTOSA/DISHUB/SET KMBLI KTRLMBTN WKT PKRN PEMBTRMNL TIPE B KT SRG	358.673.004,00
30 September 2024	SEKRETARIAT DAERAH/SET PENGEMBLIAN TEMUAN BPK TA 2023 BLNJ HONORARIUM PERNGKAT UKPBJ/RINAWATY PASARIBU	16.800.000,00
10 Oktober 2024	DPMPTST PBD SET KMBL PD SUB KGTN PNYEDIAAN BHN LOGistik KNTR THN ANGG 2023	12.250.000,00
10 Oktober 2024	DPMPTSPBBD SET KMBL PD SUB KGATAN PENTAPN BJKN DAERAH DLM PMBRAN FSLTS/INSNTF&KMDHN PENMN MODAL ANGGRAN 2023	50.000.000,00
10 Oktober 2024	DPMPTST PBD SET KMBL PD SUB KGTN PNYLANGGARAANRPT-RPT KRDNASI&KNSLTS SKPD THN ANG 2023	50.000.000,00
10 Oktober 2024	DPMPTST PBD SET KMBL PD SUBKGTN PNYDAAN LYNN KNSLTS&PNGLOAAN PNGDN MSYRK TRHDP PLYNN TRPDU PERIZINAN&NON PERIZINAN THN ANG 23	20.000.000,00
10 Oktober 2024	DPMPTST PBD SET KMBL PD SUB KGTN PNYIAPAN MTRI KRJSM DNG DΝΙΑ USH SESAI KWNGAN PROV THN ANG 2023	47.750.000,00
10 Oktober 2024	DPMPTSP/SET KMBL TEMUAN BPK ATAS SP2D PD SUB KGTAN PNYDIAAN LYANAN KNSLTSI&PNGELOAAN PNGDAN MSYRK TRHDP PLYNN TRPD PRZMAN&NON	20.000.000,00
15 Oktober 2024	DINKES,PENG PDDK & KB/SET KMBL KEG PENYUSUNAN DOK PERENCNN PERANGKAT DAERAH TA 2024/ABNER NAA	857.772,00
23 Oktober 2024	DINAS LHKP PROV PBD SET KMBLI TEMUAN BPK ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG PNYPN DN PNGMBANGAN PRHTNAN SOSIAL T,A 2023/WELMINCE	30.000.000,00
24 Oktober 2024	INSPEKTORAT PROV PBD/DORTHEUS D. JITMAU/SET KEMBALI TEMUAN PEMERIKSAAN BPKYGTDKIDUKUNG BUKTI-BUKTI	355.737.017,00
25 Oktober 2024	BIRO HKUM PROV PBD/ SET PENGEM TEMUAN BPK THN ANGGRN 2023 PROV PBD/HENRY V KAMBU	130.379.700,00
25 Oktober 2024	SETDA PROV PBD/SET KMBLI ATS BLNJ KLBHN PMBYRN TPP 2023/ AN YAN PIET MOSO	2.975.000,00
25 Oktober 2024	BAPERIDA PROV PBD/ ST KMBLI HSL TMUAN BPK-RI PD BLNJ SEWA KNDRN BRMTR PNMPNG YG TDK SSUAI PNGGNN PD ANGRN 2023/RITA F WAMBRAUW	163.600.000,00
28 Oktober 2024	DINAS LHKP PROV PBD/STRAN KEMBALI TEMUAN BPK ATS BELANJA PERJALANAN DIANS BIASA KEGIATN PELAKSANA KLHS	101.491.590,00
28 Oktober 2024	SEKDA/BIRO PEMERINTAHAN/SETRN KEMBALI A/ KEG FASILITASI PENATAAN WLYH/KELEBNH PEMBYRN TRANSPORT RENTAL KE KAB MAYBRAT & SORSEL	300.000.000,00
28 Oktober 2024	DORTHEUS D DJITMAU/INSPEKTORAT PBD/SET KMBLI ATS TMUAN PMRKSBN BPK, PRJLN DNS TDK SES DGN KNDSI SNYTANYA 602.982.080	202.986.080,00
31 Oktober 2024	DNS SOSIALPMBDYAAN PRM DN ANK ANGSKEDUA TMUAN ATS BLJA PD DPA BLNJ PRJLNN DNS KEG PNKTN KMPUAN PNTNS PKRJ SOSIAL MSYRK/ROLAND	44.060.400,00
31 Oktober 2024	DORTHEUS D DJITMAU/INSPEKTORAT PROV PBD/SET KMBLI TMUAN PMRKSAN BPK, REALISASI BLNJ PRJLN DNS MLBH KTNTUAN	98.870.000,00
1 November 2024	SETDA PROV PBD/SET BLI ATS TEMUAN BPK TRKAIT KLBHN PMBYRN TPP THN 2023/ DR.GEORGE	2.975.000,00
1 November 2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/ SETORAN KEMBALI ATS BELANJA PERJALANAN DNAS (OTSUS)	15.000.000,00
1 November 2024	DINAS PERHUBUNGAN/SETORN KEMBALI ATS KEGIATN PENYEDIAAN PERLENGKPN JALAN DI JLN PROVINSI THN 2023 SUMBER DANA DAU	150.000.000,00
4 November 2024	DINAS P2KP/STRN KEMBALI ATS SP2D NO.000954/SP2D/TU/3.27.09.3.25.01.0000/11/2023 ATS KEG BULN CINTA LAUT (BCL) TA 2023	124.719.300,00
4 November 2024	DLHPK PROV PBD/STRN KEMBALI TEMUAN BPK ATS BELNJ PERJLNAN DINAS BIASA PD KEG PENYIAPAN & PENGEMBGN pERHUTANAN SIASIAL TA 2023	20.260.000,00
4 November 2024	YAYASAN CIPTA WARIS PAPUA/SET KELEBIHAN PEMBY BELANJA BANTUAN KEG.YAYASAN	1.000.000,00
4 November 2024	DINAS P2KP/SETOR KEMBALI ATS SP2D NO.000540/SP2D/TU/3.27.09.3.25.01.0000/11/2023 ATS KEG PEMBERIAN PENDAMPING KEMUDHN AKSES ILMU	70.113.200,00
4 November 2024	PT PAPUAINDO KARYA MANDIRI/EMA R WANGGAY/SET KLBHN PEMBY PKRJN PNGKTN JLN MEGA-SAUSAPOR	431.699.000,00
4 November 2024	2000107000146-CENAID	200.000.000,00
4 November 2024	DINAS PURP / PT. MARVIN PUTRA MANOKWARI / SET KEKURANGAN VOLUME PKRJAAN PENINGKATAN JLN TEMI(KEYEN)-BOLDON AYAMARU	226.699.000,00
4 November 2024	DINAS PERHUBUNGAN PROV PBD/SETORN KEMBALI ATS KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKPN JALAN DI JLN PROV THN 2023 SMBER DANA DAU	215.335.972,00
4 November 2024	PT CEMPaka JAYA/KUATNO RAHANYANAT/SET KLBHN PEMBY PKRJN PNGKTN JLN FEF-MIYAH	1.055.440.000,00
4 November 2024	DLHPK PROV PBD/STRN KEMBALI TEMUAN BPK ATS BELNJ PERJLNAN DINAS BIASA PD KEG PENYIAPAN & PENGEMBGN PERHTANAN SOSIAL TA 2023	7.298.499,00
4 November 2024	DLHPK PROV PBD/STRN KEMBALI TEMUAN BPK ATS BELNJ PERJLNAN DINAS BIASA PD KEG PENYEDIAAN DATA & INFMSI WILY USAHA DI KWSAN HTN PR	49.524.300,00
4 November 2024	SEKRETARIAT MRP PROV PBD/ STRN KEMBALI ATS BELANJA PD KEG PENUNJANG FUNSI ALAT KELKPN PLNTKN UNUSR PEMIMPIN & RAKOOR MRP SEPPUA	2.350.800,00
4 November 2024	DINAS P2KP/STRN KEMBALI ATS SP2D NO.222925/SP2D/TU/3.27.09.3.25.01.0000/11/2023 ATS KEG MONITORING KKPD KE KEPULAUAN RAJA AMPAT	132.300.000,00
4 November 2024	YUSUF ABD KARIM/SETDA PROV PBD/SET KMBLI PEMBY TRANSPORTASI KE KAB MAYBRAT DAN SORSEL, KLBHN PEMB HTL PTJLN DNS	50.200.000,00
5 November 2024	PT SANTANA ADI DAYA/WAHYUDI GOLY/SET KMBLI BLNJ MDL PAKET PKRJN INSTALASI PLTS MORAID KAB TAMBARUW	209.061.000,00
5 November 2024	NSPEKTORAT PROV PBD/SETRN KEMBALI ATS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK BELANJ PERJLNAN DINAS TDK SESUAI DGN KONDISI SYARATNYA	200.000.000,00
5 November 2024	DINAS PENDIDIKAN PROV PBD / SET KEMBALI KEKURANGAN VOLUME & KETIDAKSESUAIAN BELANJA KPD SMK N AYAMARU	70.000.000,00

Tanggal	Uraian	NILAI (Rp)
5 November 2024	DINAS PENDIDIKAN PROV PBD/SET KEMBALI DENDA KETERLAMBATAN KEG PENGADAAN ALAT PRAKTIKUM KPD SMKS PELITA (CV. FILYA SEHATI JAYA)	15.000.000,00
5 November 2024	DISPEN & KEBUD PROV PBD/ SET KMBLI ATS (BLNJ PADA DPA) KEG HIBAH KE YAYASAN PENDIDIKAN GOLDEN GATE	514.457.834,00
6 November 2024	DPMPTSP/KEG PLKSNN PROMOSI PNNMN MDL KWNNGN PROVINSI PADA SP2DTHN2023	20.830.034,00
6 November 2024	DPMPTSP/SET KMBL ATS KEG PNTPN KBJKN DR DLM PMBRIAN FASILITAS & KMDHN PNNMN MDL PD SP2D THN 2023	52.093.516,00
6 November 2024	DPMPTSP/KEG KRDNSI & SKRNSS PMNTAUAN PLKSNN PNNMN MDL PADA SP2D PADA THN 2023	34.560.450,00
6 November 2024	DPMPTSP/KEG BLNJ RJLNN DINAS ATS KEG PNYDAAN LYNN KNSLTSI & PNGLLN PNGDNMSYRKT PD SP2D THN 2023	75.000.000,00
6 November 2024	DPMPTSP/KEG PMNTN PMNHN KMTMN PERIZINAN & NON PRZNN PNNMN MDL PD SP2D THN 2023	17.516.000,00
7 November 2024	DKPPKB SET KEMBALI ATS BELANJA, BLNJ BHN ATK,KTR LANNYA SEMINAR KIT, BLNJ BHN CETAK, BLNJ MKN& MINM RAPAT, PERJALANAN DINAS	64.000,00
14 November 2024	SET KEMBALI ATS HSL TEMUAN BPK-RI PD SU KEG PNGLLN DT DLM SISTEM IFRMS PMRNTHN DRH DI BDG PMBNGNN DRH	408.147.385,00
18 November 2024	DLPH PBD/SET KMBL TMUAN BPK ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG PNYPN DN PENGEM PRHTNN SOSIAL T A 2023/WELMINCE ISIR	6.600.000,00
18 November 2024	DLHP BPD/SET KMBLI TMUAN BPK ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG PNYIAPN DN PENGMBGN PRHTANAN DN PENGEM PRHUTNAN SOSIAL T.A 2023	52.276.598,00
18 November 2024	DLHP BPD/SET KMLI TMUAN BPK ATS BLNJ PRJLNN DNS PD KEG PNYIAPN DN PNGMBGN PRHTNN SOSIAL T A 2023/WELMINCE ISIR	640.700,00
18 November 2024	DLHP BPD/SET KMBL TMUAN BPK ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG PNYIAPN DN PNGMBN PRHTNN SOSIAL T A 2023/WELMINCE ISIR	1.257.608,00
18 November 2024	DLHP BPD/SET KMBLI TMUAN BPK ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG PNYIAPN DN PENGEM PRHUTANAN SOSIAL T.A2023/WELMINCE ISIR	6.504.000,00
19 November 2024	DISPORA & PARIWISATA / NUR INTANG/SETORAN KEMBALI BELANJA TAGIHAN LISTRIK	1.628.374,00
20 November 2024	DINAS PENDIDIKAN PROV PBD / NURSANTI SESA / SET KMBLI BLNJ HIBAH UANG KPD UNIV WERISAR (UNSAR)	561.575.000,00
20 November 2024	TITIP SALDO NOVEMBER 2024	521.260.654,00
22 November 2024	SET KMBLI ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA KEG PNGKTN KPSTS DN KMPTNSI PNYLH KHTNN DN SDM BDNG	38.693.880,00
22 November 2024	CV. PAPUA PERKASA /SETORAN KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN PEMBYRNBLNJAMODAL	231.311.000,00
22 November 2024	SET KEMBALI AT TU-01 UTK KEG PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I MAJARAN UTK DINAS PUPR PROV PBD	802.400,00
22 November 2024	PENGEMBALIAN TPP AN. BPK YAKOB KARETH THNN2023	2.975.000,00
22 November 2024	DLHP/ SET KMBL ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG PNGKTN KPSTS DN KMPTNSI PNYULUH KHTNAN DN SDM/ WELMINCE ISIR	26.820.000,00
22 November 2024	DLHP BPD/ SET KMBL ATS BLNJ PRJLNN DNS BIASA PD KEG MONITORING DN EVALUASI TRHDP PEMEGANG PRSTUJUAN KWSN HTN/ WELMICE ISIR	15.120.000,00
28 November 2024	SETDA PROV PBD / YUSUF /SET KEMBALI SISA UANG PERSEDIAAN UTK UP/GU NIHIL KEG PNYEDIAAN BHN LOGistik KNT	80.141,00
6 Desember 2024	INSPEKTORAT PROV PBD / SET KEMBALI TEMUAN BPK, BLNJA PERJALANAN DINAS TDK SESUAI DGN KONDISI SENYATANYA	200.000.000,00
30 Desember 2024	TIM KERJA SABALO LMA MALAMOI/PENGEMBALIAN/PTYORAN TEMUAN BPK/CARTENSZ I. O MALIBELA/30 DES 2024	284.475.000,00
30 Desember 2024	PT IRMA JAYA MARTABE/STRN KELEBHN PEMBYRN PEKRJAAN ATS PEKERJAAN PENINGKATAN YONAS MAMBRASAR (WAISAI)	150.000.000,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	1,00
31 Desember 2024	DINAS P2KP/SET KEMBALI KE KASDA	8.485.713,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	7.221.600,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	75.369,00
31 Desember 2024	JUKOR PENGAJUAN PEMBAYARAN LS ATAS HONOR PENGELOLA KEUANGAN SKPD BULAN JANUARI - DESEMBER 2024 Cair ke SKPD netto, tapi BANK OBMPN nya ke	5.664.000,00
31 Desember 2024	koreksi KURANG CATAT DI SIPKD BKPSDM PBD/SET KEM KEG PNGLOLAAN PROMOSI ASN/MUHAMMAD ZULFIAN/31 DES 2024 belum dicatat STS nya oleh Bendahan	250.400,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	125.800,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	6.111.600,00
31 Desember 2024	Belum di STS-kan, SET KMBL ATS BLNJ BHN UTK KEG KNTR LAINNYA THN 2024	1.982.600,00
31 Desember 2024	Jurnal DINKES & PENGENDALIAN PENDUDUK&KBPROVPBD / SET KEMBALI BELANJA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT KECACINGAN Be	49.324.420,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	100.000,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	34.840.000,00
31 Desember 2024	JUKOR Setoran yang tidak ada STS nya	472,00
31 Desember 2024	JUKOR PENGAJUAN PEMBAYARAN LS UNTUK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10,00
31 Desember 2024	Pendapatan yang belum dicatat pada Sekretariat Daerah senilai Rp100.000.000,00	100.000.000,00
31 Desember 2024	JUKOR SET KEMBLATS KEG FASILITASI PENATAAN WILAYAH	100.000.000,00
	TOTAL	27.265.490.894,32



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 2024

BAGI HASIL	KABUPATEN/KOTA	PERIODE	DASAR	JUMLAH
PAJAK ROKOK	KAB. SORONG SELATAN	TRIWULAN IV TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/81/8/2024	608.173.609,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/165/11/2024	572.930.176,67
		TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/164/11/2024	885.619.134,68
		TRIWULAN II TA.2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/10/3/2023	807.281.458,00
		TRIWULAN III TA.2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/33/5/2024	718.754.395,00
	KAB. MAYBRAT	TRIWULAN II TA.2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/10/3/2023	726.475.059,00
		TRIWULAN III TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/33/5/2024	646.809.284,00
		TRIWULAN IV TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/81/8/2024	547.297.295,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/165/11/2024	515.581.622,20
		TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/164/11/2024	796.971.374,01
	KAB. RAJA AMPAT	TRIWULAN II TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/10/3/2023	906.793.201,00
		TRIWULAN III TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/33/5/2024	807.353.609,00
		TRIWULAN IV TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/81/8/2024	683.141.782,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/165/11/2024	643.553.971,53
		TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/164/11/2024	994.787.383,53
	KAB. SORONG	TRIWULAN II TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/10/3/2023	1.371.766.762,00
		TRIWULAN III TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/33/5/2024	1.221.337.836,00
		TRIWULAN IV TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/81/8/2024	1.033.434.292,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/165/11/2024	973.547.162,46
		TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/164/11/2024	1.504.881.451,00
	KAB. TAMBRAUW	TRIWULAN II TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/10/3/2023	601.897.816,00
		TRIWULAN III TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/33/5/2023	535.893.270,00
		TRIWULAN IV TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/81/8/2024	453.445.776,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/165/11/2024	427.168.763,17
		TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/164/11/2024	660.305.296,89
	KOTA SORONG	TRIWULAN II TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/10/3/2023	2.784.736.310,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/33/5/2024	2.479.360.132,00
		TRIWULAN IV TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/81/8/2024	2.097.909.118,00
			SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/165/11/2024	1.976.336.071,57
		TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/164/11/2024	3.054.963.960,39

BAGI HASIL	KABUPATEN/KOTA	PERIODE	DASAR	JUMLAH
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	KAB. RAJA AMPAT	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/13/4/2024	1.633.186.588,30
		TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/71/8/2024	1.837.111.039,33
		SILPA TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/136/10/2024	3.412.691.584,44
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/146/10/2024	1.608.411.283,27
	KOTA SORONG	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/13/4/2024	14.826.100.985,20
		TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/71/8/2024	10.736.901.513,80
		SILPA TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/136/10/2024	19.746.038.970,32
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/146/10/2024	8.302.230.915,93
	KAB. TAMBRAUW	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/13/4/2024	454.835.042,60
		TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/71/8/2024	1.122.525.438,44
		SILPA TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/136/10/2024	2.144.097.674,57
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/146/10/2024	919.854.850,56
	KAB. SORONG	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/13/4/2024	2.405.780.043,50
		TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/71/8/2024	2.222.181.603,88
		SILPA TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/136/10/2024	4.190.102.463,79
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/146/10/2024	2.004.550.346,32
	KAB. SORONG SELATAN	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/13/4/2024	969.542.989,50
		TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/71/8/2024	1.541.417.848,74
		SILPA TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/136/10/2024	2.803.321.817,63
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/146/10/2024	1.348.360.241,15
	KAB. MAYBRAT	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/13/4/2024	351.645.798,40
		TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/71/8/2024	1.095.923.325,21
		SILPA TA. 2023	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/136/10/2024	2.069.813.688,78
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/146/10/2024	939.188.636,12
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	KAB. MAYBRAT	TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/52/7/2024	3.662.169.105,00
		TRIWULAN IV TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/178/11/2024	2.092.668.060,00
	KAB. RAJA AMPAT	TRIWULAN II TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/52/7/2024	3.662.169.105,00
		TRIWULAN IV TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/178/11/2024	2.092.668.060,00
	KOTA SORONG	TRIWULAN IV TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/178/11/2024	2.092.668.060,00
	KAB. SORONG	TRIWULAN IV TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/178/11/2024	13.951.120.400,00
	KAB. SORONG SELATAN	TRIWULAN IV TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/178/11/2024	2.092.668.060,00
	KAB. TAMBRAUW	TRIWULAN IV TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/178/11/2024	2.092.668.060,00

BAGI HASIL	KABUPATEN/KOTA	PERIODE	DASAR	JUMLAH
PAJAK BBNKB	KAB. TAMBRAUW	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/179/11/2024	256.503.200,25
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/186/12/2024	228.868.245,75
	KAB. RAJA AMPAT	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/179/11/2024	184.593.777,00
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/186/12/2024	186.640.821,00
	KAB. SORONG	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/179/11/2024	504.634.002,75
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/186/12/2024	445.381.175,25
	KOTA SORONG	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/179/11/2024	1.328.561.889,00
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/186/12/2024	1.204.077.591,00
	KAB. MAYBRAT	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/179/11/2024	165.314.052,90
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/186/12/2024	147.122.837,25
PAJAK KENDARAAN BERMOtor	KAB. TAMBRAUW	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/180/11/2024	363.766.617,00
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/185/12/2024	435.114.131,25
	KAB. MAYBRAT	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/180/11/2024	235.935.946,20
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/185/12/2024	286.951.025,25
	KAB. SORONG SELATAN	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/180/11/2024	294.142.225,00
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/185/12/2024	383.767.314,75
	KAB. RAJA AMPAT	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/180/11/2024	252.374.248,50
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/185/12/2024	322.850.908,50
	KAB. SORONG	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/180/11/2024	706.737.378,00
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/185/12/2024	828.256.632,75
	KOTA SORONG	TRIWULAN I TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/180/11/2024	1.992.668.314,50
		TRIWULAN III TA. 2024	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/185/12/2024	2.513.917.597,50
TOTAL				166.140.594.911,08



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

BAGI HASIL	PERIODE	DASAR	JUMLAH
KABUPATEN MAYBRAT MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN I	LAMPIRAN SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024	2.092.668.060,00
KOTA SORONG MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN I	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024	2.092.668.060,00
KAB.SORONG SELATAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN I	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024	2.092.668.060,00
KAB. TAMBRAUW MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN I	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024	2.092.668.060,00
KOTA RAJA AMPAT MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN I	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024	2.092.668.060,00
KABUPATEN SORONG MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN I	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/8/3/2024	13.951.120.400,00
KAB TAMBRAUW MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN II	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/52/7/2024	3.662.169.105,00
KABUPATEN SORONG SELATAN MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN II	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/52/7/2024	3.662.169.105,00
KABUPATEN SORONG MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN II	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/52/7/2024	12.207.230.350,00
KOTA SORONG MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN II	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/52/7/2024	3.662.169.105,00
KABUPATEN SORONG MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN IV	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/12/2024	1.845.088.076,00
KOTA SORONG MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN IV	SK GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/12/2024	11.551.845.655,00
KOTA RAJA AMPAT MINYAK BUMI DAM GAS	TRIWULAN IV	SK GUBERNUR NOMOR	1.365.026.713,00

BAGI HASIL	PERIODE	DASAR	JUMLAH
KABUPATEN SORONG SELATAN MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN IV	NOMOR 100.3.3.1/12/2024	1.500.020.713,00
KABUPATEN SORONG SELATAN MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN IV	SK GUBERNUR NOMOR NOMOR 100.3.3.1/12/2024	915.188.330,00
KAB TAMBRAUW MINYAK BUMI DAM GAS ALAM	TRIWULAN IV	SK GUBERNUR NOMOR NOMOR 100.3.3.1/12/2024	389.563.277,00
KABUPATEN MAYBRAT MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	TRIWULAN IV	SK GUBERNUR NOMOR NOMOR 100.3.3.1/12/2024	297.106.429,00
BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA			3.979.945.713,00

**RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN DAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2024**

URAIAN PIUTANG PAJAK	SALDO AWAL AUDITED		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PIUTANG PENDAPATAN	UMUR (TAHUN)	PENYISIHAN PENDAPATAN UMUR PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	NILAI BUKU PIUTANG PAJAK DAN DENDA
							LANCAR	KURANG LANCA	DIRAGUKAN	MACET		
							0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun		
	Tahun	Rp	Rp	Rp	Rp		0%	10%	50%	100%		
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	2013		99.687.900,00	227.000	99.460.900	11				99.460.900	99.460.900,00	-
	2014		238.287.300,00	-	238.287.300	10				238.287.300	238.287.300,00	-
	2015		222.547.400,00	5.040.000	217.507.400	9				217.507.400	217.507.400,00	-
	2016		313.879.800,00	1.342.500	312.537.300	8				312.537.300	312.537.300,00	-
	2017		366.987.700,00	2.802.000	364.185.700	7				364.185.700	364.185.700,00	-
	2018		151.797.200,00	3.007.500	148.789.700	6				148.789.700	148.789.700,00	-
	2019		156.000,00	-	156.000	5				156.000	156.000,00	-
	2020		46.632.200,00	-	46.632.200	4				46.632.200	46.632.200,00	-
	2021		43.155.800,00		43.155.800	3				21.577.900	21.577.900,00	21.577.900,00
	2022		67.177.300,00	5.005.600	62.171.700	2				31.085.850	31.085.850,00	31.085.850,00
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	2023		10.461.500,00	-	10.461.500			1.046.150			1.046.150,00	9.415.350,00
			1.560.770.100	17.424.600	1.543.345.500		-	#####	#####	#####	1.481.266.400,00	62.079.100,00
	2013		3.896.000,00		3.896.000	11				3.896.000	3.896.000,00	-
	2014		13.301.000,00		13.301.000	10				13.301.000	13.301.000,00	-
	2015		78.441.300,00		78.441.300	9				78.441.300	78.441.300,00	-
	2016		3.865.000,00		3.865.000	8				3.865.000	3.865.000,00	-
	2017		2.257.000,00		2.257.000	7				2.257.000	2.257.000,00	-
	2018		32.170.000,00		32.170.000	6				32.170.000	32.170.000,00	-
	2019		291.000,00		291.000	5				291.000	291.000,00	-
	2020		2.180.000,00		2.180.000	4				2.180.000	2.180.000,00	-
DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	2021		-		-	3					-	-
	2022		1.630.000,00		1.630.000	2			815.000		815.000,00	815.000,00
	2023		-		-		-	-	-		-	-
			138.031.300	-	138.031.300		-	-	815.000,00	136.401.300,00	137.216.300,00	815.000,00
	2013		20.871.600,00	18.500,00	20.853.100	11				20.853.100	20.853.100,00	-
	2014		32.410.600,00		32.410.600	10				32.410.600	32.410.600,00	-
	2015		41.601.700,00	1.184.400,00	40.417.300	9				40.417.300	40.417.300,00	-
	2016		41.535.300,00	234.400,00	41.300.900	8				41.300.900	41.300.900,00	-
	2017		66.186.400,00	646.500,00	65.539.900	7				65.539.900	65.539.900,00	-
	2018		25.738.700,00	577.000,00	25.161.700	6				25.161.700	25.161.700,00	-
	2019		-	-	-	5				-	-	-
	2020		58.900,00	-	58.900	4				58.900	58.900,00	-
	2021		1.761.400,00	-	1.761.400	3			880.700		880.700,00	880.700,00
	2022		1.808.600,00	69.400,00	1.739.200	2			869.600		869.600,00	869.600,00
DENDA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	2023		29.500,00	-	29.500			2.950			2.950,00	26.550,00
			232.002.700	2.730.200	229.272.500		-	2.950,00	1.750.300,00	225.742.400,00	227.495.650,00	1.776.850,00
	2013		1.756.400,00		1.756.400	11				1.756.400	1.756.400,00	-
	2014		3.784.400,00		3.784.400	10				3.784.400	3.784.400,00	-
	2015		6.162.000,00		6.162.000	9				6.162.000	6.162.000,00	-
	2016		-		-	8				-	-	-

URAIAN PIUTANG PAJAK	SALDO AWAL AUDITED		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PIUTANG PENDAPATAN	UMUR (TAHUN)	PENYISIHAN PENDAPATAN UMUR PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG	NILAI BUKU PIUTANG PAJAK DAN DENDA
							LANCAR	KURANG LANCA	DIRAGUKAN	MACET		
							0 s.d 1 Tahun	1 s.d 2 Tahun	2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun		
	Tahun	Rp	Rp	Rp	Rp		0%	10%	50%	100%		
2017		-			-	7				-	-	-
2018		8.479.000,00			8.479.000	6					-	8.479.000,00
2019		94.400,00			94.400	5					-	94.400,00
2020		-			-	4					-	-
2021		-			-	3					-	-
2022		570.500,00			570.500	2					-	570.500,00
2023		-			-						-	-
		- 20.846.700		- 20.846.700			-	-	-	11.702.800,00	11.702.800,00	9.143.900,00
TOTAL PIUTANG PAD		- 1.951.650.800	20.154.800	1.931.496.000			- #####	#####	#####	#####	1.857.681.150,00	73.814.850,00

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAFTAR PENYELESAIAN SISA KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran II.b

NO.	NAMA SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2024				PENYETORAN/PENYELESAIAN 2025				SISA UYHD PER 31 Maret 2025			
		SISA UYHD	JASA GIRO	KOREKSI LAINNYA/PFK	TOTAL	UYHD	JASA GIRO	KOREKSI LAINNYA/PFK	TOTAL	SISA UYHD	JASA GIRO	KOREKSI LAINNYA /PFK	TOTAL
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10=(7+8+9)	11=(3-7)	12=(4-8)	13=(5-9)	14=(6-10)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.863.742.010	-		2.863.742.010	2.840.612.010			2.840.612.010	23.130.000	-	-	23.130.000
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.572.628	-		18.572.628	18.572.628			18.572.628	-	-	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.000.000	-		2.000.000	2.000.000			2.000.000	-	-	-	-
4	Dinas Kebakaran Dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana Dan Satuan Polisi Pamong Praja	-	-		-				-	-	-	-	-
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-		-				-	-	-	-	-
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral	204.884.000	-		204.884.000	204.484.000			204.484.000	400.000	-	-	400.000
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertanahan	1.902.380	-		1.902.380	1.902.380			1.902.380	-	-	-	-
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	-	-		-				-	-	-	-	-
9	Dinas Perhubungan	-	-		-				-	-	-	-	-
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	-	-		-				-	-	-	-	-
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	-	-		-				-	-	-	-	-
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.032.693	-		16.032.693	16.032.693			16.032.693	-	-	-	-
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	-		-				-	-	-	-	-
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan	-	-		-				-	-	-	-	-
15	Sekretariat Daerah	5.479.411	-		5.479.411				-	5.479.411	-	-	5.479.411
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	-	-		-				-	-	-	-	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	-	-		-				-	-	-	-	-
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	1.135.323	-		1.135.323	1.135.323			1.135.323	-	-	-	-
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.695.600	-		49.695.600				-	49.695.600	-	-	49.695.600
20	Inspektorat Daerah	-	-		-				-	-	-	-	-
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	222.000	-		222.000	222.000			222.000	-	-	-	-
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Daya	-	-		-				-	-	-	-	-
	TOTAL KESELURUHAN	3.163.666.045	-		3.163.666.045	3.084.961.034	-	-	3.084.961.034	78.705.011	-	-	78.705.011



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
PERHITUNGAN PERSEDIAAN
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

Lampiran II.c

NO	SKPD	SALDO AWAL 2024				PENAMBahan 2024				PENGURANGAN SALDO AWAL 2024				PENGURANGAN 2024				PERSEDIAAN AKHIR PER 31 DESEMBER 2024								
		BELANJA BARANG PAKAI HABIS	OBAT-OBATAN	REKLASIFIKASI ASET TETAP	HBAH BARANG	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	OBAT-OBATAN	REKLASIFIKASI ASET TETAP	HBAH BARANG	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	OBAT-OBATAN	REKLASIFIKASI ASET TETAP	HBAH BARANG	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	OBAT-OBATAN	REKLASIFIKASI ASET TETAP	HBAH BARANG	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	OBAT-OBATAN	REKLASIFIKASI ASET TETAP	HBAH BARANG	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	OBAT-OBATAN	REKLASIFIKASI ASET TETAP	HBAH BARANG	TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	1.181.393.478,00	-	-	-	1.181.393.478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	DINAS KESATUAN, PENGETAHUAN PENDIDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.521.785.405,00	14.528.151.086,00	29.049.936.471,00	49.403.434.399,00	1.263.293.522,00	51.425.059.921,00	-	758.332.000,00	14.521.785.405,00	-	12.598.354.838,51	27.120.140.243,51	-	1.263.293.522,00	28.475.159.245,50	-	758.332.000,00	30.498.784.767,50	-	20.928.275.153,50	-	1.929.796.227,49	22.858.071.380,99	-	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAYAT	-	-	-	-	314.265.480,00	-	-	-	314.265.480,00	-	-	-	-	-	-	312.852.040,00	-	-	312.852.040,00	-	1.813.440,00	-	-	-	
4	DINAS KEARIFAN RAKYAT DAN PENGETAHUAN, RENCANA DAN SATUAN POLISI PEMERINTAH PRAJA	-	-	645.366.570,00	-	5.000.000,00	2.000.000,00	652.366.570,00	-	-	-	-	-	645.366.570,00	-	5.000.000,00	2.000.000,00	652.366.570,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	526.779.388,00	-	1.671.072.994,00	2.197.849.379,00	-	-	-	-	-	-	525.435.885,00	-	1.671.072.994,00	2.199.500.879,00	-	1.340.500,00	-	-	-	-	-	-	
6	DINAS STNKDA, TRANSFORMASI ENERGI DAN KONSEP KERAMAHAN	-	-	377.453.975,00	-	4.114.302.493,00	4.491.756.468,00	-	-	-	-	-	-	377.453.975,00	-	4.114.302.493,00	4.491.756.468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	DINAS LINGKUNG HIDUP, KESIHATAN DAN PERTANIAN	38.840.000,00	38.840.000,00	656.753.380,00	-	-	-	656.753.380,00	-	-	-	38.840.000,00	38.840.000,00	656.753.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS PENDIDIKAN, PENGETAHUAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	98.600.000,00	98.600.000,00	1.634.774.630,00	-	284.000.000,00	1.918.774.630,00	-	-	98.600.000,00	98.600.000,00	1.571.945.130,00	-	-	284.000.000,00	1.855.945.130,00	-	62.831.500,00	-	-	-	-	-	-	62.831.500,00	-
9	DINAS PERKELBANGKAN	-	-	89.098.150,00	-	64.400.904.523,00	64.490.003.673,00	-	-	-	-	-	-	89.098.150,00	-	-	89.098.150,00	-	-	64.400.904.523,00	64.400.904.523,00	-	-	-	-	
10	DINAS KOMINIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERBANJUAN	-	-	397.468.500,00	-	2.910.740.000,00	3.308.205.500,00	-	-	-	-	-	-	397.468.500,00	-	-	397.468.500,00	-	-	2.910.740.000,00	2.910.740.000,00	-	-	-	-	
11	DINAS KOPERASI, USHA KECHI DAN PERDAGANGAN, BUMN DAN PERDAGANGAN	5.607.200.000,00	5.607.200.000,00	731.944.805,00	-	7.618.530.000,00	8.350.474.805,00	-	-	5.607.200.000,00	5.607.200.000,00	731.944.805,00	-	-	6.659.530.000,00	7.391.474.805,00	-	-	-	-	959.000.000,00	959.000.000,00	-	-	-	-
12	DINAS PENANAMAN MUDA, DAN DINAS PENGETAHUAN, RAKYAT DAN KAMPUNG	-	-	263.775.429,00	-	167.100.000,00	430.875.429,00	-	-	-	-	-	-	261.527.484,00	-	-	261.527.484,00	-	-	2.247.945,00	-	-	167.100.000,00	169.347.945,00	-	
13	DINAS KEPERDAMIAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	1.193.795.116,00	-	457.965.000,00	1.651.360.616,00	-	-	-	-	-	-	1.193.795.116,00	-	-	457.965.000,00	1.651.360.616,00	-	-	-	-	-	-	-	
14	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.125.106.721,00	6.125.106.721,00	231.818.700,00	-	10.786.399.501,00	11.018.218.207,00	-	-	6.125.106.721,00	6.125.106.721,00	159.291.700,00	-	-	10.545.124.908,00	10.704.416.612,00	2.727.020,00	-	-	241.274.595,00	313.801.595,00	-	-	-	-	
15	SEKRETARIAAT DAERAH	18.851.562,00	-	18.851.562,00	-	9.620.006.752,00	9.620.006.752,00	-	-	18.851.562,00	-	-	-	-	18.851.562,00	9.590.807.952,00	-	-	-	9.590.807.952,00	20.198.800,00	-	-	-	20.198.800,00	-
16	SEKRETARIAAT DPR	-	-	2.765.644.880,00	-	638.000.000,00	3.403.644.880,00	-	-	-	-	-	-	2.765.644.880,00	-	-	638.000.000,00	3.403.644.880,00	-	-	-	-	-	-	-	
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, BUDGETING DAN MONITORING SISTEM PENGETAHUAN DAN KELENGKAPAN DAN ASET DAERAH	-	-	1.052.826.289,00	-	5.649.920.000,00	6.702.746.289,00	-	-	-	-	-	-	1.052.826.289,00	-	-	5.649.920.000,00	6.702.746.289,00	-	-	-	-	-	-	-	
18	BADAN PENGETAHUAN DAN MONITORING SISTEM PENGETAHUAN DAN KELENGKAPAN DAN ASET DAERAH	29.738.000,00	-	29.738.000,00	8.006.086.369,00	-	8.006.086.369,00	29.738.000,00	-	-	-	-	-	29.738.000,00	7.896.314.369,00	-	109.772.000,00	-	-	-	-	109.772.000,00	-	-	-	
19	BADAN KEPERGAWAIAN DAN PENGELABUAN SUMBER DAYA	-	-	216.714.400,00	-	-	216.714.400,00	-	-	-	-	-	-	216.714.400,00	-	-	216.714.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	719.259.046,00	-	-	-	719.259.046,00	-	-	-	-	-	-	719.259.046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	225.053.452,00	-	-	-	225.053.452,00	-	-	-	-	-	-	225.053.452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	SEKRETARIAAT MAJELIS RAYAKAT PAPUA BARAT DAYA	-	-	1.344.499.770,00	-	-	1.344.499.770,00	-	-	-	-	-	-	1.344.499.770,00	-	-	1.344.499.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		48.589.562,00	14.521.785.405,00	-	26.397.897.787,00	40.968.272.754,00	33.458.067.064,00	49.403.434.399,00	5.000.000,00	99.458.967.011,00	182.329.368.474,00	48.589.562,00	14.521.785.405,00	-	24.468.101.559,51	39.038.476.526,51	33.197.535.879,00	28.476.159.245,50	5.000.000,00	30.779.847.893,00	92.447.543.017,50	270.531.185,00	20.928.275.153,50	70.608.815.345,49	91.807.621.683,99	-

Lampiran III.a Aset Tetap

REKAPITULASI PENGADAAN BMD BERUPA ASET TETAP MENURUT JENIS

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

No	Nama Pengguna Barang	Jumlah (Rp)						Total	Keterangan
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.993.498.851,00	3.099.512.498,00	-	5.150.000,00	3.369.549.347,60	8.467.710.696,60	
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	3.804.153.000,00	-	-	-	-	3.804.153.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	7.043.857.200,00	205.010.500,00	24.609.805.306,00	411.182.396.109,00	-	43.245.508.919,00	486.286.578.034,00	
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	-	2.364.820.800,00	388.488.000,00	-	-	-	2.753.308.800,00	
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	137.293.000,00	-	-	-	-	137.293.000,00	
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	-	10.876.519.889,00	22.020.077.170,95	-	-	-	32.896.597.059,95	
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	35.427.888.234,00	455.196.030,00	-	-	-	-	35.883.084.264,00	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	-	423.946.600,00	-	-	-	-	423.946.600,00	
9	Dinas Perhubungan	907.374.000,00	24.136.836.750,00	6.278.685.000,00	10.612.200.000,00	-	-	41.935.095.750,00	
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	9.238.083.934,00	-	-	-	-	9.238.083.934,00	
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	55.708.000,00	-	-	-	-	55.708.000,00	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	317.141.600,00	-	-	-	-	317.141.600,00	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	75.536.000,00	-	-	-	-	75.536.000,00	
14	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	280.000.000,00	10.137.199.875,00	990.000.000,00	4.030.229.211,00	-	520.966.012,00	15.958.395.098,00	
15	Sekretariat Daerah	-	8.027.552.090,00	-	-	-	-	8.027.552.090,00	
16	Sekretariat DPRD	-	10.283.284.000,00	-	-	-	-	10.283.284.000,00	
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	-	686.843.000,00	-	-	-	-	686.843.000,00	
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	-	4.091.797.000,00	1.702.651.000,00	-	-	-	5.794.448.000,00	

19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	551.280.500,00	-	-	-	-	-	551.280.500,00	
20	Inspektorat Daerah	-	1.569.991.000,00	-	-	-	-	-	1.569.991.000,00	
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	119.260.000,00	-	-	-	-	-	119.260.000,00	
22	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya	-	2.369.202.200,00	-	-	-	-	-	2.369.202.200,00	
	TOTAL	43.659.119.434,00	91.920.154.619,00	59.089.218.974,95	425.824.825.320,00	5.150.000,00	47.136.024.278,60	667.634.492.626,55		

Lampiran III.b Aset Tetap

LAPORAN PENGADAAN BMD BERUPA ASET TETAP PERALATAN & MESIN DARI DANA BOS PUSAT

INTRAKOMPTABEL

01.00.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01.2.22.0.00.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang					Spesifikasi Nama Barang	Merek/Tipe	Jumlah Barang	Satuan Barang	Harga Satuan Rp.	Total Nilai Barang Rp.	Total Biaya Atribusi Rp.	Nilai Perolehan Barang Rp.	Harga Satuan Perolehan Rp.	Sub Kegiatan dan Rekening Anggaran Belanja Daerah Atas Pengadaan Barang				Tgl Perolehan	Dokumen Sumber Perolehan			Keterangan			
														Sub Kegiatan		Rekening Belanja Daerah			Bentuk Kontrak	Nama Penyedia	Nomor				
Kode Barang		Nama Barang													Kode	Nama	Kode	Uraian							
1	3	2	04	01	04	004	Rak-Rak Penyimpan	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	3.449.880,00	3.449.880,00	-	3.449.880,00	3.449.880,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	04	01	04	004	Rak-Rak Penyimpan	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	3.449.880,00	3.449.880,00	-	3.449.880,00	3.449.880,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	01	05	078	Papan Tulis	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	Lembar	1.054.500,00	1.054.500,00	-	1.054.500,00	1.054.500,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	01	05	078	Papan Tulis	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	Lembar	1.054.500,00	1.054.500,00	-	1.054.500,00	1.054.500,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	01	05	078	Papan Tulis	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	Lembar	1.054.500,00	1.054.500,00	-	1.054.500,00	1.054.500,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	01	05	078	Papan Tulis	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	Lembar	1.054.500,00	1.054.500,00	-	1.054.500,00	1.054.500,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	01	05	078	Papan Tulis	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	Lembar	1.054.500,00	1.054.500,00	-	1.054.500,00	1.054.500,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	01	031	Kursi Tamu	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	05	02	01	031	Kursi Tamu	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	05	02	01	031	Kursi Tamu	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	1.900.000,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	05	02	04	004	A.C. Split	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	8.793.420,00	8.793.420,00	-	8.793.420,00	8.793.420,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	04	004	A.C. Split	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	5.106.000,00	5.106.000,00	-	5.106.000,00	5.106.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	1.332.000,00	1.332.000,00	-	1.332.000,00	1.332.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	1.332.000,00	1.332.000,00	-	1.332.000,00	1.332.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	1.332.000,00	1.332.000,00	-	1.332.000,00	1.332.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	1.332.000,00	1.332.000,00	-	1.332.000,00	1.332.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	04	006	Kipas Angin	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	unit	1.332.000,00	1.332.000,00	-	1.332.000,00	1.332.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	04	006	Tiang Bendera	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG		1	Btg	2.350.000,00	2.350.000,00	-	2.350.000,00	2.350.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB INPRES 73 MALAINGKEDI SORONG	60400464	
1	3	2	05	02	06	089	Pompa Air	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	3.330.000,00	3.330.000,00	-	3.330.000,00	3.330.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	08	07	05	035	Refrigerator/Freezer	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	3.663.000,00	3.663.000,00	-	3.663.000,00	3.663.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	10	01	02	001	P.C Unit	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	14.985.000,00	14.985.000,00	-	14.985.000,00	14.985.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	
1	3	2	10	02	03	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	PENGADAAN BELANJA MODAL DANA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG		1	unit	1.950.000,00	1.950.000,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22/02/2024	Kuitansi	BENDAHARA BOS SLB NEGERI KABUPATEN SORONG	69728503	

Lampiran III.c Aset Tetap

LAPORAN PENGADAAN BMD BEBUPA ASET TETAP |AINNYA DARI DANA BOS PUSAT

INTRAKOMPTABEI

INTRAKOMI TABEL

00 - Dinas Pendidikan

AKHIR TAHUN

REKAPITULASI GABUNGAN PENERIMAAN BMD BERUPA ASET TETAP

MENURUT JENIS

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

No		Uraian	Jumlah Penerimaan Dari Cara Perolehan (Rp)										Jumlah Total (Rp)
			Pengadaan APBD	Hibah	Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Putusan Pengadilan	Divestasi	Hasil Inventarisasi	Hasil Tukar Menukar	Pembatalan Penghapusan	Perolehan Lainnya	
1	4	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP	8.467.710.696,60	-	-	13.713.509.595,00	-	-	-	-	-	-	22.181.220.291,60
		PERALATAN DAN MESIN	1.993.498.851,00	-	-	1.707.556.095,00	-	-	-	-	-	-	3.701.054.946,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	3.099.512.498,00	-	-	12.005.953.500,00	-	-	-	-	-	-	15.105.465.998,00
		ASET TETAP LAIN	5.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.150.000,00
		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	3.369.549.347,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.369.549.347,60
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ASET TETAP	3.804.153.000,00	-	-	2.370.867.999,45	-	-	-	-	-	-	6.175.020.999,45
		PERALATAN DAN MESIN	3.804.153.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.804.153.000,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	2.370.867.999,45	-	-	-	-	-	-	2.370.867.999,45
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	ASET TETAP	481.777.393.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.777.393.635,00
		TANAH	7.043.857.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.043.857.200,00
		PERALATAN DAN MESIN	205.010.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.010.500,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	24.609.805.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.609.805.306,00
		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	411.182.396.109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.182.396.109,00
		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	38.736.324.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.736.324.520,00
4	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	ASET TETAP	2.753.308.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.753.308.800,00
		PERALATAN DAN MESIN	2.364.820.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.364.820.800,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	388.488.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.488.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ASET TETAP	137.293.000,00	-	-	599.905.000,00	-	-	-	-	-	-	737.198.000,00
		PERALATAN DAN MESIN	137.293.000,00	-	-	599.905.000,00	-	-	-	-	-	-	737.198.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	ASET TETAP	32.896.597.059,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.896.597.059,95
		PERALATAN DAN MESIN	10.876.519.889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.876.519.889,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	22.020.077.170,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.020.077.170,95
7	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	ASET TETAP	35.883.084.264,00	-	-	37.100.616.524,00	-	-	-	-	-	-	72.983.700.788,00
		TANAH	35.427.888.234,00	-	-	9.407.009.020,00	-	-	-	-	-	-	44.834.897.254,00
		PERALATAN DAN MESIN	455.196.030,00	-	-	5.913.916.993,00	-	-	-	-	-	-	6.369.113.023,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	18.727.493.311,00	-	-	-	-	-	-	18.727.493.311,00
		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	3.052.197.200,00	-	-	-	-	-	-	3.052.197.200,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	ASET TETAP	423.946.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.946.600,00
		PERALATAN DAN MESIN	423.946.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.946.600,00
9	Dinas Perhubungan	ASET TETAP	41.935.095.750,00	-	-	134.588.417.139,10	-	-	-	-	-	-	176.523.512.889,10
		TANAH	907.374.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907.374.000,00
		PERALATAN DAN MESIN	24.136.836.750,00	-	-	5.233.268.180,00	-	-	-	-	-	-	29.370.104.930,00
		GEDUNG DAN BANGUNAN	6.278.685.000,00	-	-	16.715.853.336,10	-	-	-	-	-	-	22.994.538.336,10
		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	10.612.200.000,00	-	-	78.111.693.612,00	-	-	-	-	-	-	88.723.893.612,00
		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	34.527.602.011,00	-	-	-	-	-	-	34.527.602.011,00

Lampiran III.d Aset Tetap

DAFTAR RINCIAN HUTANG BELANJA MODAL PERLATAN DAN MESIN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

1. DINAS PERHUBUNGAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.02.18.01.0003.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi di Tambrauw	CV. TAKASIMA JAYA	640/17/SPK/XI/DISHUB/PBD/2024	15-Nov-24	1.324.350.000	529.740.000	794.610.000	100			
5.2.02.18.01.0003.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi Sorong Selatan	CV. TAKASIMA JAYA	500/06/DISHUB/PBD/XI/2024	15-Nov-24	1.515.360.000	1.363.824.000	151.536.000	100			
5.2.02.18.01.0003.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengawasan Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi Sorong Selatan	CV.NUSAKONSULTASI PEMBANGUNAN	500.11/SPK/193/DISHUB-PBD/IX/2024	18-Nov-24	198.000.000	-	198.000.000	100			
5.2.02.18.01.0003	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan PJU Kab. Sorong - DTI (DISHUB) CV.JUSNIC	CV. JUSNIC	640/002/SPK/DISHUB/C.V.JUSNIC/BLMP/IX/2024	16-Aug-24	698.700.000	-	698.700.000	100			
NILAI TOTAL						3.736.410.000	-	1.842.846.000				

2. DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.02.06.01.0002	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan TIK Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (OTSUS DTI)	PT SURYA INTI ARTHA			640/875/2023 06 Juni 2023	-	20.325.200,00	100			
5.2.02.06.02.0010.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internet Kampung 2 Titik (OTSUS DTI)	PT YEDUA YAWADATUM PAPUA				-	459.200.000,00	100			
5.2.02.10.02.0004	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan TIK Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (OTSUS DTI)	PT SURYA INTI ARTHA				-	1.759.918.700,00	100			
5.2.02.10.02.0004.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internet Kampung 2 Titik (OTSUS DTI)	PT YEDUA YAWADATUM PAPUA			640/1579/VII/2023 21 Juli 2023 04/07/2023/MIGAS	-	120.698.000,00	100			
5.2.02.10.02.0005.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengadaan Harddisk Network Video Recorder CCTV Internet Kampung (OTSUS DTI)	PT CIPTA APRINDO PRATAMA			OTSUS/2023	-	158.000.000,00	100			
NILAI TOTAL						-	-	2.518.141.900				
JUMLAH TOTAL HUTANG ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN								4.360.987.900				

Lampiran III.e Aset Tetap

**DAFTAR RINCIAN HUTANG BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TA. 2024**

1. DINAS PEKERJAAN UMUM

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.04.01.01.0002.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Di Petrocina / Jalan Lingkar Belakang Kantor Gubernur Papua Barat Daya (DTI-OTSUS)	CV. DHANI KARYA CONSULINDO	049.C/KNTRK/WAS-BM/DTI-OTSUS/600/XI/2024	29-Oct-24	197.718.000	-	197.718.000	100			
5.2.04.01.01.0002.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Jefilio Paket 1 (DTI-OTSUS)	CV. ANGGOS MBAWE	005.B.31/KNTRK/FIS-BM/DTI-OTSUS/600/XI/2024	11-Nov-24	299.400.000	89.820.000	209.580.000	100			
5.2.04.01.01.0002.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pekerjaan Peningkatan Opritan Box Culvert Jalan Sapta Taruna (Lanjutan) (DTI-OTSUS)	CV. SA PAPUA SEJAHTERA	046.A/KNTRK/FIS-BM/DTI-OTSUS/600/XI/2024	05-Nov-24	934.500.000	280.350.000	654.150.000	100			
5.2.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan	Pekerjaan Peningkatan Opritan Box Culvert Jalan Sapta Taruna (Lanjutan) (DTI-OTSUS)	CV TJ	03.04/KONTRK-FSK/DPUPR-PBD/VI/2024	45468	12.898.913.644	10.319.130.915	2.579.782.729	100	01/414/BASTP- -PHO/PUPR-PBD/II/2025	15/02/2025	
5.2.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Klasari	PT LUA	03.03/KONTRKFSK/DPUPR-PBD/VI/2024	45469	12.862.677.805	10.933.276.135	1.929.401.670	100	01/655/BASTP- -PHO/PUPR-PBD/XII/2024	19/12/2024	
NILAI TOTAL						1.431.618.000	370.170.000	5.570.632.399				

2. DINAS PERHUBUNGAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.04.04.02.0002.		Pemasangan PJU Solar Cell 80 WatRuas 059 (Ayamaru- Sauf – Wehali - Bts Sorsel)	CV.TAKASIMA JAYA	640/02/SP/DISHUB/PBD/XI/2024	11-Nov-24	4.430.400.000	3.987.360.000	443.040.000	100			
NILAI TOTAL						4.430.400.000	3.987.360.000	443.040.000				
JUMLAH TOTAL HUTANG JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN									6.013.672.399			

Lampiran III.f Aset Tetap

**DAFTAR RINCIAN HUTANG BELANJAA MODAL ASET TETAP LAINNYA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Pembangunan Gedung	CV. Rumah Kayu Papua	523.1/002 /SKKS/KKP-RA/XII/2024	18 Desember 2024	820.000.000,00	738.000.000,00	82.000.000,00	100	523.1/001 /BAST/KKP-RA/II/2025	14 Februari 2025	
NILAI TOTAL						820.000.000,00	738.000.000,00	82.000.000,00				
JUMLAH TOTAL HUTANG ASET TETAP LAINNYA								82.000.000,00				

Lampiran III.g Aset Tetap

**DAFTAR RINCIAN HUTANG BELANJAA MODAL ASET PERALATAN KE PESERDIAAN YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.02.07.02.0005	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Sele Be Solu Kota Sorong	PT. SOMETECH INDONESIA	0889/SP/PENG-ALKES-RO RS.SELEBESOLU/SI/DK P2KB-PBD/APBD-2024	13-Nov-24	602.942.990,00	-	602.942.990,00	100	0889/SP/PENG-ALKES-RO RS.SELEBESOLU/SI/DK P2KB-PBD/APBD-2024	17 Desember 2024	
NILAI TOTAL						602.942.990,00	-	602.942.990,00				
JUMLAH TOTAL HUTANG ASSET TETAP PERALATAN DAN MESIN KE PERSEDIAAN YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT										602.942.990,00		

Lampiran III.h Aset Tetap

DAFTAR RINCIAN HUTANG ASSET TETAP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TA. 2024

1. DINAS PERHUBUNGAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.02.18.01.0003.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi di Tambrauw	CV. TAKASIMA JAYA	640/17/SPK/XII/DISHUB/PBD/2024	15-Nov-24	1.324.350.000	529.740.000	794.610.000	100			
5.2.02.18.01.0003.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi Sorong Selatan	CV. TAKASIMA JAYA	500/06/DISHUB/PBD/XI/2024	15-Nov-24	1.515.360.000	1.363.824.000	151.536.000	100			
5.2.02.18.01.0003.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengawasan Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi Sorong Selatan	CV.NUSAKONSULTASI PEMBANGUNAN	500.11/SPK/193/DISHUB-PBD/IX/2024	18-Nov-24	198.000.000	-	198.000.000	100			
5.2.04.04.02.0002.		Pemasangan PJU Solar Cell 80 WatRuas 059 (Ayamaru- Sauf - Wehali - Bts Sorsel)	CV.TAKASIMA JAYA	640/02/SPK/DISHUB/PBD/XI/2024	11-Nov-24	4.430.400.000	3.987.360.000	443.040.000	100			
5.2.02.18.01.0003	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan PJU Kab. Sorong - DTI (DISHUB) CV.JUSNIC	CV. JUSNIC	640/002/SPK/DISHUB/C.V.JUSNIC/BLMP/IX/2024	16-Aug-24	698.700.000	-	698.700.000	100			
NILAI TOTAL						8.166.810.000	-	2.285.886.000				

2. DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Pembangunan Gedung	CV. Rumah Kayu Papua	523.1/002/SKKS/KKP-RA/XII/2024	18 Desember 2024	820.000.000	738.000.000	82.000.000	100	523.1/001 /BAST/KKP-RA/XII/2025	14 Februari 2025	
NILAI TOTAL						820.000.000	738.000.000	82.000.000				

3. DINAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.02.06.01.0002	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan TIK Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (OTSUS DTI)	PT SURYA INTI ARTHA			640/875/2023 06 Juni 2023	-	20.325.200,00	100			
5.2.02.06.02.0010.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internet Kampung 2 Titik (OTSUS DTI)	PT YEDIJA YAWADATUM PAPUA				-	459.200.000,00	100			
5.2.02.10.02.0004	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan TIK Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (OTSUS DTI)	PT SURYA INTI ARTHA				-	1.759.918.700,00	100			
5.2.02.10.02.0004.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internet Kampung 2 Titik (OTSUS DTI)	PT YEDIJA YAWADATUM PAPUA			640/1579/VII/2023 21 Juli 2023	-	120.698.000,00	100			
5.2.02.10.02.0005.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengadaan Harddisk Network Video Recorder CCTV Internet Kampung (OTSUS DTI)	PT CIPTA APRINDO PRATAMA			640/1454/VIGAS OTSUS/2023	-	158.000.000,00	100			
NILAI TOTAL						-	-	2.518.141.900				

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.04.01.01.0002.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Jalan Di Petrocina / Jalan Lingkar Belakang Kantor Gubernur Papua Barat Daya (DTI-OTSUS)	CV. DHANI KARYA CONSULINDO	049.C/KNTR/WAS-BM/DTI-OTSUS/600/XI/2024	29-Oct-24	197.718.000	-	197.718.000	100			
5.2.04.01.01.0002.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pekerjaan Peningkatan Jalan Jl. Jeflio Paket 1 (DTI-OTSUS)	CV. ANGGOS MBAWE	005.B.31/KNTRK/FIS-BM/DTI-OTSUS/600/XI/2024	11-Nov-24	299.400.000	89.820.000	209.580.000	100			
5.2.04.01.01.0002.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pekerjaan Peningkatan Opritan Box Culvert Jalan Septa Taruna (Lanjutan) (DTI-OTSUS)	CV. SA PAPUA SEJAHTERA	046.A/KNTRK/FIS-BM/DTI-OTSUS/600/XI/2024	05-Nov-24	934.500.000	280.350.000	654.150.000	100			
5.2.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan	Pekerjaan Peningkatan Opritan Box Culvert Jalan Septa Taruna (Lanjutan) (DTI-OTSUS)	CV TJ	03.04/KONTRK-FSK/DPUPR-PBD/VII/2024	45468	12.898.913.644	10.319.130.915	2.579.782.729	100	01/414/BASTP-PHO/PUPR-PBD/II/2025	15/02/2025	
5.2.04.01.01.0002	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Klasari	PT LUA	03.03/KONTRKFSK/DPU PR-PBD/VII/2024	45469	12.862.677.805	10.933.276.135	1.929.401.670	100	01/655/BASTP-PHO/PUPR-PBD/XII/2024	19/12/2024	
NILAI TOTAL						1.431.618.000	370.170.000	5.570.632.399				

5. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Rekening Belanja	SUB KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	NAMA REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK LAPANGAN (%)	BAST/PHO		KET
				NOMOR	TANGGAL		REALISASI DANA	SISA DANA YANG BELUM TERBAYARKAN		NOMOR	TANGGAL	
5.2.02.07.02.0005	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Sele Be Solu Kota Sorong	PT. SOMETECH INDONESIA	0889/SP/PENG-ALKES-RO RS.SELEBESOLU/SI/DK P2KB-PBD/APBD-2024	13-Nov-24	602.942.990	-	602.942.990	100	0889/SP/PEN-G-ALKES-RO RS.SELEBES OLU/SI/DKP2K B-PBD/APBD-2024	17 Desember 2024	
NILAI TOTAL						602.942.990	-	602.942.990				
JUMLAH TOTAL HUTANG ASSET TETAP								Rp 11.059.603.289				

Lampiran III.i Aset Tetap

**REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN BMD BERUPA ASET TETAP
DENGAN CARA PEROLEHAN KARENA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT
OBJEK
INTRAKOMPTABEL**

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN
TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang				Jumlah Barang	Jumlah (Rp)
Kode Barang		Nama Barang			
1		2		3	4
1	3			ASET TETAP	3208
1	3	1		TANAH	27
1	3	1	01	TANAH	27
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	3018
1	3	2	01	ALAT BESAR	156
1	3	2	02	ALAT ANGKUTAN	47
1	3	2	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	27
1	3	2	04	ALAT PERTANIAN	15
1	3	2	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	444
1	3	2	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	84
1	3	2	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	62
1	3	2	08	ALAT LABORATORIUM	30
1	3	2	10	KOMPUTER	115
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1
1	3	2	18	RAMBU - RAMBU	2037
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	108
1	3	3	01	BANGUNAN GEDUNG	106
1	3	3	02	MONUMEN	1
1	3	3	03	BANGUNAN MENARA	1
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	40
1	3	4	01	JALAN DAN JEMBATAN	26
1	3	4	02	BANGUNAN AIR	12
1	3	4	03	INSTALASI	2
1	3	5		ASET TETAP LAIN	4
1	3	5	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	4
1	3	6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	11
1	3	6	01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	11

Lampiran III.j Aset Tetap

REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN BMD BERUPA ASET TETAP
DENGAN CARA PEROLEHAN KARENA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT JENIS
INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN
TAHUN 2024

Pengguna Barang/Pengelola Barang	Penggolongan dan Kodeifikasi Barang			Jumlah Barang	Jumlah (Rp)
	Kode Barang	Nama Barang			
01.00.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 3	ASET TETAP		6	13.713.509.595
	1 3 2	PERALATAN DAN MESIN		4	1.707.556.095
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		2	12.005.953.500
02.00.00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 3	ASET TETAP		8	2.370.867.999
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		8	2.370.867.999
05.00.00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 3	ASET TETAP		96	599.905.000
	1 3 2	PERALATAN DAN MESIN		96	599.905.000
07.00.00 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian	1 3	ASET TETAP		238	37.100.616.524
	1 3 1	TANAH		6	9.407.009.020
	1 3 2	PERALATAN DAN MESIN		187	5.913.916.993
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		38	18.727.493.311
	1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		7	3.052.197.200
09.00.00 Dinas Perhubungan	1 3	ASET TETAP		2068	134.588.417.139
	1 3 2	PERALATAN DAN MESIN		2037	5.233.268.180
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		6	16.715.853.336
	1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		14	78.111.693.612
	1 3 6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		11	34.527.602.011
10.00.00 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1 3	ASET TETAP		1	500.000.000
	1 3 1	TANAH		1	500.000.000
11.00.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1 3	ASET TETAP		13	14.622.167.966
	1 3 1	TANAH		2	2.663.486.000
	1 3 2	PERALATAN DAN MESIN		7	699.541.466
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		4	11.259.140.500
13.00.00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 3	ASET TETAP		4	48.039.799.345
	1 3 1	TANAH		1	20.000.000.000
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		3	28.039.799.345
14.00.00 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1 3	ASET TETAP		774	134.391.167.711
	1 3 1	TANAH		17	8.942.669.736
	1 3 2	PERALATAN DAN MESIN		687	10.543.630.390
	1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN		47	31.564.274.225
	1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		19	81.077.958.360
	1 3 5	ASET TETAP LAIN		4	2.262.635.000

Lampiran III.k Aset Tetap

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH KURANG

ASET TETAP TANAH

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)						Mutasi Kurang (Rp.)					Saldo Akhir
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9-14
1 3	ASET TETAP	3.648.235.655,00	85.172.284.189,95	-	-	-	-	85.172.284.189,95	-	-	-	-	-	88.820.519.844,95
1 3 1	TANAH	3.648.235.655,00	85.172.284.189,95	-	-	-	-	85.172.284.189,95	-	-	-	-	-	88.820.519.844,95
1 3 1 01	TANAH	3.648.235.655,00	85.172.284.189,95	-	-	-	-	85.172.284.189,95	-	-	-	-	-	88.820.519.844,95

Lampiran III.I Aset Tetap

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH KURANG

ASET TETAP PERALATAN & MESIN

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)						Mutasi Kurang (Rp.)				Saldo Akhir	
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9-14
1 5 1	ASET TETAP	70.620.798.374,90	116.617.972.742,52	-	-	-	318.459.000,00	116.936.431.742,52	-	347.210.000,00	4.997.368.000,00	-	5.344.578.000,00	182.212.652.117,42
1 5 2	PERALATAN DAN MESIN	70.620.798.374,90	116.617.972.742,52	-	-	-	318.459.000,00	116.936.431.742,52	-	347.210.000,00	4.997.368.000,00	-	5.344.578.000,00	182.212.652.117,42
1 5 2 01	ALAT BESAR	1.177.047.800,00	2.764.018.492,19	-	-	-	-	2.764.018.492,19	-	-	-	-	-	3.941.066.292,19
1 5 2 02	ALAT ANGKUTAN	37.124.012.000,00	28.804.093.083,68	-	-	-	318.459.000,00	29.122.552.083,68	-	139.860.000,00	-	-	139.860.000,00	66.106.704.083,68
1 5 2 03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	41.244.700,00	1.080.002.645,81	-	-	-	-	1.080.002.645,81	-	-	-	-	-	1.121.247.345,81
1 5 2 04	ALAT PERTANIAN	177.708.026,00	200.828.762,28	-	-	-	-	200.828.762,28	-	-	-	-	-	378.536.790,28
1 5 2 05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	9.376.444.539,12	28.023.856.344,20	-	-	-	-	28.023.856.344,20	-	207.350.000,00	4.997.368.000,00	-	5.204.718.000,00	32.195.582.883,32
1 5 2 06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.728.697.623,12	22.293.109.294,70	-	-	-	-	22.293.109.294,70	-	-	-	-	-	26.021.806.917,82
1 5 2 07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	132.102.000,00	772.280.000,00	-	-	-	-	772.280.000,00	-	-	-	-	-	904.382.000,00
1 5 2 08	ALAT LABORATORIUM	612.744.414,46	9.985.979.893,36	-	-	-	-	9.985.979.893,36	-	-	-	-	-	10.598.724.307,82
1 5 2 09	ALAT PERSENJATAAN	106.034.725,28	367.000.000,00	-	-	-	-	367.000.000,00	-	-	-	-	-	473.034.725,28
1 5 2 10	KOMPUTER	14.820.568.798,00	12.715.800.596,30	-	-	-	-	12.715.800.596,30	-	-	-	-	-	27.536.369.394,30
1 5 2 13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	395.160.000,00	-	-	-	-	395.160.000,00	-	-	-	-	-	395.160.000,00
1 5 2 14	ALAT BANTU EKSPLORASI	9.114.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.114.600,00
1 5 2 15	ALAT KESELAMATAN KERJA	181.839.148,00	406.861.250,00	-	-	-	-	406.861.250,00	-	-	-	-	-	588.700.398,00
1 5 2 17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7.739.998,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.739.998,92
1 5 2 18	RAMBU - RAMBU	3.125.500.000,00	8.794.419.180,00	-	-	-	-	8.794.419.180,00	-	-	-	-	-	11.919.919.180,00
1 5 2 19	PERALATAN OLAH RAGA	-	14.563.200,00	-	-	-	-	14.563.200,00	-	-	-	-	-	14.563.200,00

Lampiran III.m Aset Tetap

**REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH KURANG
ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
MENURUT OBJEK
INTRAKOMPTABEL
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
AKHIR TAHUN
TAHUN 2024**

Lampiran III.n Aset Tetap

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH KURANG
ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

MENURUT OBJEK
INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
AKHIR TAHUN
TAHUN 2024

Kode Barang	Nama Barang	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)					Mutasi Kurang (Rp.)					Saldo Akhir	
			Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9+14
1 5 4	ASET TETAP	471.194.098.450,88	588.066.674.492,26	-	-	-	64.404.174.051,00	652.470.848.543,26	-	4.737.883.086,93	-	-	4.737.883.086,93	1.118.927.063.907,21
1 5 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	471.194.098.450,88	588.066.674.492,26	-	-	-	64.404.174.051,00	652.470.848.543,26	-	4.737.883.086,93	-	-	4.737.883.086,93	1.118.927.063.907,21
1 5 4	01 JALAN DAN JEMBATAN	342.648.352.500,00	482.012.431.163,39	-	-	-	61.510.442.622,00	543.522.873.785,39	-	4.737.883.086,93	-	-	4.737.883.086,93	881.433.343.198,46
1 5 4	02 BANGUNAN AIR	84.818.564.925,00	47.885.103.858,57	-	-	-	2.695.381.429,00	50.580.485.287,57	-	-	-	-	-	135.394.050.212,57
1 5 4	03 INSTALASI	36.301.536.025,88	58.169.139.470,30	-	-	-	-	58.169.139.470,30	-	-	-	-	-	94.470.675.496,18
1 5 4	04 JARINGAN	7.430.645.000,00	-	-	-	-	198.350.000,00	198.350.000,00	-	-	-	-	-	7.628.995.000,00

Lampiran III.o Aset Tetap

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH KURANG

ASET TETAP LAINNYA

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)						Mutasi Kurang (Rp.)				Saldo Akhir	
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9-14
1 3	ASET TETAP	5.282.313.300,00	2.267.785.000,00	-	-	-	-	2.267.785.000,00	-	-	-	-	-	7.550.098.300,00
1 3 5	ASET TETAP LAIN	5.282.313.300,00	2.267.785.000,00	-	-	-	-	2.267.785.000,00	-	-	-	-	-	7.550.098.300,00
1 3 5 01	BAHAN PERPUSTAKAAN	500.000.000,00	2.267.785.000,00	-	-	-	-	2.267.785.000,00	-	-	-	-	-	2.767.785.000,00
1 3 5 02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	498.201.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498.201.300,00
1 3 5 07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	4.284.112.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.284.112.000,00

Lampiran III.p Aset Tetap

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET TETAP MUTASI TAMBAH KURANG
ASET TETAP KONTRUKSI DALAM PENERJAAN
 MENURUT OBJEK
 INTRAKOMPTABEL
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 AKHIR TAHUN
 TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)							Mutasi Kurang (Rp.)					Saldo Akhir
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/ Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9+14	
1 3	ASET TETAP	88.741.494.650,00	81.663.626.289,60	-	-	-	-	81.663.626.289,60	-	-	60.186.120.458,60	-	60.186.120.458,60	110.219.000.481,00	
1 3 6	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	88.741.494.650,00	81.663.626.289,60	-	-	-	-	81.663.626.289,60	-	-	60.186.120.458,60	-	60.186.120.458,60	110.219.000.481,00	
1 3 6 01	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	88.741.494.650,00	81.663.626.289,60	-	-	-	-	81.663.626.289,60	-	-	60.186.120.458,60	-	60.186.120.458,60	110.219.000.481,00	

Lampiran III.q Aset Lainnya

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET LAINNYA MUTASI TAMBAH KURANG

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)						Mutasi Kurang (Rp.)				Saldo Akhir	
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/ Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9-14

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET LAINNYA MUTASI TAMBAH KURANG

ASET TIDAK BERWUJUD

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)						Mutasi Kurang (Rp.)				Saldo Akhir	
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/ Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9-14
1 5 1	ASET LAINNYA	3.247.661.978,00	10.952.060.000,00	-	-	-	-	10.952.060.000,00	-	-	-	-	-	14.199.721.978,00
1 5 3	ASET TIDAK BERWUJUD	3.247.661.978,00	10.952.060.000,00	-	-	-	-	10.952.060.000,00	-	-	-	-	-	14.199.721.978,00
1 5 3 01	ASET TIDAK BERWUJUD	3.247.661.978,00	10.952.060.000,00	-	-	-	-	10.952.060.000,00	-	-	-	-	-	14.199.721.978,00

REKAPITULASI PENJELASAN LAPORAN ASET LAINNYA MUTASI TAMBAH KURANG

ASET LAIN-LAIN

MENURUT OBJEK

INTRAKOMPTABEL

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

AKHIR TAHUN

TAHUN 2024

Penggolongan dan Kodefikasi Barang		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp.)						Mutasi Kurang (Rp.)				Saldo Akhir	
Kode Barang	Nama Barang		Penerimaan dari Cara Perolehan	Penerimaan Internal Pengguna Barang	Penyerahan/ Pengalihan Status Penggunaan	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah Mutasi Tambah	Pengeluaran Internal Pengguna Barang	Koreksi	Reklasifikasi	Penghapusan	Jumlah Mutasi Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	11	12	13	14=10+11+12+13	15=3+9-14
1 5 1	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	4.997.368.000,00	4.997.368.000,00	-	-	-	-	4.997.368.000,00
1 5 4	ASET LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	4.997.368.000,00	4.997.368.000,00	-	-	-	-	4.997.368.000,00
1 5 4 01	ASET LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	4.997.368.000,00	4.997.368.000,00	-	-	-	-	4.997.368.000,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
REKAPITULASI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)**

No	Uraian	TAHUN	Saldo Awal	UTANG PAJAK PADA BENDAHARA PENGELOUARAN							SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN (2023 + 2024)	KOREKSI JURNAL	Audited (Jumlah)			
				PENYELESAIAN PAJAK 2023		PENYELESAIAN PAJAK 2024										
				SETORAN PFK 2023 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2023	TOTAL UTANG PAJAK TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2025	SISA SETORAN PAJAK TAHUN 2024							
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9	10 = 7-(8+9)	11 = (6+10)	12	13=11+12				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
	PPH 21	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	60.907.500			Rp	60.907.500	Rp	60.907.500	60.907.500			
	PPH 22	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	5.666.087			Rp	5.666.087	Rp	5.666.087	5.666.087			
	PPH 23	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	8.956.400			Rp	8.956.400	Rp	8.956.400	8.956.400			
	PPH 4 (2)	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	42.210.670			Rp	42.210.670	Rp	42.210.670	42.210.670			
	PPN Dalam Negeri	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	256.398.548			Rp	256.398.548	Rp	256.398.548	Rp 346.847 256.745.395			
	JKK	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	321.915			Rp	321.915	Rp	321.915	321.915			
	JKM	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	965.721			Rp	965.721	Rp	965.721	965.721			
	BPJS	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	6.580.707			Rp	6.580.707	Rp	6.580.707	6.580.707			
	IWP		Rp	- Rp	- Rp	13.281.374			Rp	13.281.374	Rp	13.281.374	13.281.374			
											Rp	395.288.922	395.635.769			
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA															
	PPH 21												-			
	PPH 22												-			
	PPH 23											404.760	404.760			
	PPH 4 (2)												-			
	PPN Dalam Negeri												-			
	JKK	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	681.320			Rp	681.320	Rp	681.320	681.320			
	JKM	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	2.043.959			Rp	2.043.959	Rp	2.043.959	2.043.959			
	BPJS	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	14.153.050			Rp	14.153.050	Rp	14.153.050	14.153.050			
	IWP	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	28.159.159			Rp	28.159.159	Rp	28.159.159	28.159.159			
											Rp	45.037.488	45.442.248			
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
	PPH 21	2023											-			
	PPH 22	2023											-			
	PPH 23	2023											-			
	PPH 4 (2)	2023	Rp 289.560.028	Rp 289.560.028	Rp	22.932.526			Rp	22.932.526	Rp	22.932.526	22.932.526			
	PPN Dalam Negeri	2023	#####	Rp 1.195.631.622	Rp	104.754.671			Rp	104.754.671	Rp	104.754.671	104.754.671			
	JKK	2023	Rp	- Rp	- Rp	416.932			Rp	416.932	Rp	416.932	416.932			
	JKM	2023	Rp	- Rp	- Rp	1.250.778			Rp	1.250.778	Rp	1.250.778	1.250.778			
	BPJS	2023	Rp	- Rp	- Rp	8.673.889			Rp	8.673.889	Rp	8.673.889	8.673.889			
	IWP	2023	Rp	- Rp	- Rp	17.417.840			Rp	17.417.840	Rp	17.417.840	17.417.840			
											Rp	155.446.636	155.446.636			
4	DINAS KEBAKARAN, PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP															
	PPH 21												-			
	PPH 22	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	7.296.432			Rp	7.296.432	Rp	7.296.432	7.296.432			
	PPH 23	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	13.271.351			Rp	13.271.351	Rp	13.271.351	13.271.351			

No	Uraian	TAHUN	Saldo Awal	UTANG PAJAK PADA BENDAHARA PENGELOUARAN						SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN (2023 + 2024)	KOREKSI JURNAL	Audited (Jumlah)			
				PENYELESAIAN PAJAK 2023		PENYELESAIAN PAJAK 2024									
				SETORAN PFK 2023 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2023	TOTAL UTANG PAJAK TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2025	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2024						
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9	10 = 7-(8+9)	11 = (6+10)	12	13=11+12			
	PPH 4 (2)		Rp - Rp	- Rp	- Rp	2.099.608		Rp - Rp	- Rp	2.099.608	Rp 2.099.608		2.099.608		
	PPN Dalam Negeri												-		
	JKK	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	511.211		Rp - Rp	- Rp	511.211	Rp 511.211		511.211		
	JKM	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	1.533.648		Rp - Rp	- Rp	1.533.648	Rp 1.533.648		1.533.648		
	BPJS	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	11.135.746		Rp - Rp	- Rp	11.135.746	Rp 11.135.746		11.135.746		
	IWP					Rp 21.943.029		Rp - Rp	- Rp	21.943.029	Rp 21.943.029		21.943.029		
											Rp 57.791.025		57.791.025		
5	DINAS SOSIAL PEMERDIDATAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	PPH 21												-		
	PPH 22	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	1.879.315		Rp - Rp	- Rp	1.879.315	Rp 1.879.315		1.879.315		
	PPH 23												-		
	PPH 4 (2)												-		
	PPN Dalam Negeri	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	13.781.648		Rp - Rp	- Rp	13.781.648	Rp 13.781.648		13.781.648		
	JKK	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	341.351		Rp - Rp	- Rp	341.351	Rp 341.351		341.351		
	JKM	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	1.024.023		Rp - Rp	- Rp	1.024.023	Rp 1.024.023		1.024.023		
	BPJS	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	6.899.327		Rp - Rp	- Rp	6.899.327	Rp 6.899.327		6.899.327		
	IWP	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	8.390.937		Rp - Rp	- Rp	8.390.937	Rp 8.390.937		8.390.937		
											Rp 32.316.601		32.316.601		
6	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER														
	PPH 21														
	PPH 22											970.150	970.150		
	PPH 23											69.036	69.036		
	PPH 4 (2)												-		
	PPN Dalam Negeri												-		
	JKK	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	178.650		Rp - Rp	- Rp	178.650	Rp 178.650		178.650		
	JKM	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	535.954		Rp - Rp	- Rp	535.954	Rp 535.954		535.954		
	BPJS	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	3.906.710		Rp - Rp	- Rp	3.906.710	Rp 3.906.710		3.906.710		
	IWP	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	6.472.652		Rp - Rp	- Rp	6.472.652	Rp 6.472.652		6.472.652		
											Rp 11.093.966		12.133.152		
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN														
	PPH 21												-		
	PPH 22												-		
	PPH 23												-		
	PPH 4 (2)												-		
	PPN Dalam Negeri												-		
	JKK	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	1.860.446		Rp - Rp	- Rp	1.860.446	Rp 1.860.446		1.860.446		
	JKM	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	5.581.305		Rp - Rp	- Rp	5.581.305	Rp 5.581.305		5.581.305		
	BPJS	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	39.067.006		Rp - Rp	- Rp	39.067.006	Rp 39.067.006		39.067.006		
	IWP	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	77.264.354		Rp - Rp	- Rp	77.264.354	Rp 77.264.354		77.264.354		
											Rp 123.773.111		123.773.111		
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PMK														
	PPH 21	Rp - Rp	- Rp	- Rp	- Rp	32.280.000		Rp - Rp	- Rp	32.280.000	Rp 32.280.000		32.280.000		

No	Uraian	TAHUN	Saldo Awal	UTANG PAJAK PADA BENDAHARA PENGELOUARAN								SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN (2023 + 2024)	KOREKSI JURNAL	Audited (Jumlah)	
				PENYELESAIAN PAJAK 2023				PENYELESAIAN PAJAK 2024							
				SETORAN PFK 2023 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2023	TOTAL UTANG PAJAK TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2025	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2024						
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9	10 = 7-(8+9)	11 = (6+10)	12	13=11+12			
	<i>PPN Dalam Negeri</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 88.815.600		Rp -	Rp 88.815.600	Rp 88.815.600			88.815.600		
	<i>JKK</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21.744		Rp -	Rp 21.744	Rp 21.744			21.744		
	<i>JKM</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 65.234		Rp -	Rp 65.234	Rp 65.234			65.234		
	<i>BPJS</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 717.146		Rp -	Rp 717.146	Rp 717.146			717.146		
	<i>IWP</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.328.002		Rp -	Rp 1.328.002	Rp 1.328.002			1.328.002		
										Rp 90.947.726			90.947.726		
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI														
	<i>PPH 21</i>	2023	Rp 17.206.500	Rp 17.206.500	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -			-		
	<i>PPH 22</i>	2023	Rp 1.384.162	Rp 1.384.162	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -			-		
	<i>PPH 23</i>	2023											-		
	<i>PPH 4 (2)</i>	2023											-		
	<i>PPN Dalam Negeri</i>	2023	Rp 10.150.523	Rp 10.150.523	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -			-		
	<i>JKK</i>	2023	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 419.387		Rp -	Rp 419.387	Rp 419.387			419.387		
	<i>JKM</i>	2023	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.258.132		Rp -	Rp 1.258.132	Rp 1.258.132			1.258.132		
	<i>BPJS</i>	2023	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.710.265		Rp -	Rp 8.710.265	Rp 8.710.265			8.710.265		
	<i>IWP</i>	2023	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.361.821		Rp -	Rp 17.361.821	Rp 17.361.821			17.361.821		
										Rp 27.749.605			27.749.605		
18	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
	<i>PPH 21</i>													-	
	<i>PPH 22</i>												-		
	<i>PPH 23</i>												-		
	<i>PPH 4 (2)</i>												-		
	<i>PPN Dalam Negeri</i>												-		
	<i>JKK</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 414.241		Rp -	Rp 414.241	Rp 414.241			414.241		
	<i>JKM</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.242.737		Rp -	Rp 1.242.737	Rp 1.242.737			1.242.737		
	<i>BPJS</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.775.228		Rp -	Rp 8.775.228	Rp 8.775.228			8.775.228		
	<i>IWP</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.670.324		Rp -	Rp 17.670.324	Rp 17.670.324			17.670.324		
										Rp 28.102.530			28.102.530		
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA														
	<i>PPH 21</i>													-	
	<i>PPH 22</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.026.850		Rp -	Rp 6.026.850	Rp 6.026.850			6.026.850		
	<i>PPH 23</i>												-		
	<i>PPH 4 (2)</i>												-		
	<i>PPN Dalam Negeri</i>												-		
	<i>JKK</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 210.187		Rp -	Rp 210.187	Rp 210.187			210.187		
	<i>JKM</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 630.561		Rp -	Rp 630.561	Rp 630.561			630.561		
	<i>BPJS</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.254.670		Rp -	Rp 4.254.670	Rp 4.254.670			4.254.670		
	<i>IWP</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.804.396		Rp -	Rp 9.804.396	Rp 9.804.396			9.804.396		
										Rp 20.926.664			20.926.664		
20	INSPEKTORAT														
	<i>PPH 21</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26.366.819		Rp -	Rp 26.366.819	Rp 26.366.819			26.366.819		
	<i>PPH 22</i>												-		
	<i>PPH 23</i>												-		
	<i>PPH 4 (2)</i>												-		
	<i>PPN Dalam Negeri</i>		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.339.450		Rp -	Rp 100.339.450	Rp 100.339.450			100.339.450		

No	Uraian	TAHUN	Saldo Awal	UTANG PAJAK PADA BENDAHARA PENGELOUARAN						SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN (2023 + 2024)	KOREKSI JURNAL	Audited (Jumlah)			
				PENYELESAIAN PAJAK 2023		PENYELESAIAN PAJAK 2024									
				SETORAN PFK 2023 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2023	TOTAL UTANG PAJAK TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2024	SETORAN PFK 2024 YANG DISETOR DI TAHUN 2025	SISA SETORAN PFK PAJAK TAHUN 2024						
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9	10 = 7-(8+9)	11 = (6+10)	12	13=11+12			
	JKK	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	368.026		Rp	- Rp	368.026	Rp	368.026			
	JKM	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	1.107.893		Rp	- Rp	1.107.893	Rp	1.107.893			
	BPJS	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	7.644.268		Rp	- Rp	7.644.268	Rp	7.644.268			
	IWP	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	16.279.695		Rp	- Rp	16.279.695	Rp	16.279.695			
											Rp	152.106.151			
												152.106.151			
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	PPH 21											-			
	PPH 22											-			
	PPH 23											-			
	PPH 4 (2)											-			
	PPN Dalam Negeri											-			
	JKK	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	248.545		Rp	- Rp	248.545	Rp	248.545			
	JKM	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	745.626		Rp	- Rp	745.626	Rp	745.626			
	BPJS	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	5.135.682		Rp	- Rp	5.135.682	Rp	5.135.682			
	IWP	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	8.509.150		Rp	- Rp	8.509.150	Rp	8.509.150			
											Rp	14.639.003			
												14.639.003			
22	SEKRETARIAT MASYARAKAT RABIA														
	PPH 21	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	35.850.000		Rp	- Rp	35.850.000	Rp	35.850.000			
	PPH 22											-			
	PPH 23											-			
	PPH 4 (2)											-			
	PPN Dalam Negeri											-			
	JKK	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	203.877		Rp	- Rp	203.877	Rp	203.877			
	JKM	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	611.618		Rp	- Rp	611.618	Rp	611.618			
	BPJS	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	4.225.006		Rp	- Rp	4.225.006	Rp	4.225.006			
	IWP	Rp	- Rp	- Rp	- Rp	8.495.465		Rp	- Rp	8.495.465	Rp	8.495.465			
											Rp	49.385.966			
												49.385.966			
	TOTAL	2.246.787.857	2.224.159.479	22.628.378	3.599.167.419			-	3.599.167.419	Rp	3.621.795.797	Rp	3.601.367.483		



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DAFTAR UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran IVb

NO.	URAIAN	HUTANG		BAST	JENIS BELANJA
			Hutang Belanja		
I	DINAS KESEHATAN	602.942.990,00			
1	Pembayaran 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RS Sele Be Solu Kota Sorong - PT. SOMETECH INDONESIA	602.942.990,00	Terutang 2024	<u>0889/BA/PENG-ALKES-RO-RS.SELEBESOLU/SI/DKP2KB</u>	BELANJA MODAL
II	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.061.448.000,00			
1	Peningkatan Opritan Box Culvret jln Sapta Taruna (lanjutan)	654.150.000,00	Terutang 2024	<u>600/644/BASTP/DPUPR-PBD/XII/2024</u>	BELANJA MODAL
2	Peningkatan Jln Kantor Lingkungan Hidup	209.580.000,00	Terutang 2024	<u>600/749/BAST/DPUPR-PBD/XII/2024</u>	BELANJA MODAL
3	Peningkatan Jalan Di Petrocina	197.718.000,00	Terutang 2024	<u>600/637/BAST/DPUPR-PBD/X/2024</u>	BELANJA MODAL
III	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42.725.306.225,00			
1	Transfer DBH OTSUS Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan III - Kabupaten Sorong Selatan	3.662.169.105,00	Terutang 2024	<u>100.3.3.1/BA/KABUPATEN SORONG SELATAN/TW3/12/2024</u>	BELANJA TRANSFER
2	Transfer DBH OTSUS Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan III - Kabupaten Sorong	24.414.460.700,00	Terutang 2024	<u>100.3.3.1/BA/KABUPATEN SORONG/TW3/12/2024</u>	BELANJA TRANSFER
3	Transfer DBH OTSUS Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan III - Kota Sorong	3.662.169.105,00	Terutang 2024	<u>100.3.3.1/BA/KOTA SORONG/TW3/12/2024</u>	BELANJA TRANSFER
4	Transfer DBH OTSUS Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan III - Raja Ampat	3.662.169.105,00	Terutang 2024	<u>100.3.3.1/BA/KABUPATEN RAJA AMPAT/TW3/12/2024</u>	BELANJA TRANSFER
5	Transfer DBH OTSUS Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan III - Kota Tambrauw	3.662.169.105,00	Terutang 2024	<u>100.3.3.1/BA/KABUPATEN TAMBRAUW/TW3/12/2024</u>	BELANJA TRANSFER

NO.	URAIAN	HUTANG		BAST	JENIS BELANJA
		Hutang Belanja			
6	Transfer DBH OTSUS Minyak Bumi dan Gas Alam Triwulan III - Kota Maybrat	3.662.169.105,00	Terutang 2024	<u>100.3.3.1/BA/KABUPATEN MAYBRAT/TW3/12/2024</u>	BELANJA TRANSFER
IV	DINAS PERHUBUNGAN	2.285.886.000,00			
1	Tagihan 100% Belanja Modal Pengadaan PJU Kab. Sorong	698.700.000,00	Terutang 2024	640/002/ADD-SPK/DISHUB/CV.JUSNIC/BLMP/IX/2024	BELANJA MODAL
2	Tagihan 100% Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi, Sorong Selatan	151.536.000,00	Terutang 2024	00089/SPP/LS/2.15.00.00.00.01.0000/B03/12/2024	BELANJA MODAL
3	90% Pembangunan Guardrail pada jalan Provinsi di Tambrauw	794.610.000,00	Terutang 2024	00090/SPP/LS/2.15.00.00.00.01.0000/B03/12/2024	BELANJA MODAL
4	100% Pemasangan PJU Solar Cell 80 WatRas 059 (Ayamaru - Sauf - Wehali - Bts Sorse)	443.040.000,00	Terutang 2024	00087/SPP/LS/2.15.00.00.00.01.0000/B03/12/2024	BELANJA MODAL
5	Tagihan 100% Pengawasan Pembangunan Guardrail pada Jalan Provinsi, Sorong Selatan	198.000.000,00	Terutang 2024	500.11/193/BAKP/DISHUB-PAD/XII/2024	BELANJA MODAL
V	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.518.141.900,00			
1	Pengadaan Peralatan TIK Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (OTSUS DTI)	1.780.243.900,00	Terutang 2024	900.15.1/09/BAP-DISKOMINFO/ 2024	BELANJA MODAL
2	Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internet Kampung 2 Titik (OTSUS DTI)	579.898.000	Terutang 2024	900.1.15.1/10/BAP-DISKOMINFO/ 2024	BELANJA MODAL
3	Pengadaan Hardisk Network Video Recorder CCTV Internet Kampung (OTSUS DTI)	158.000.000,00	Terutang 2024	500.12.2.1/43.a/P-DISKOMINFO/ 2024	BELANJA MODAL
4	Belanja Pekerjaan Pengadaan Peralatan Internet Kampung 2 Titik (OTSUS DTI)	167.100.000,00	Terutang 2024	500.12.2.1/43.a/P-DISKOMINFO/ 2024	BELANJA BARANG DAN JASA
VI	P2KP	275.230.000,00			
1	BLUD	82.000.000,00	Terutang 2024		BELANJA BARANG DAN JASA
2	BLUD	193.230.000,00	Terutang 2024		BELANJA BARANG DAN JASA
VII	PTSP	147.500.000,00			

NO.	URAIAN	HUTANG		BAST	JENIS BELANJA
		Hutang Belanja			
1	Pembayaran Liputan Media Elektronik DPM-PTSP (LS OTSUS SPESIFIC GRANT)	147.500.000,00	Terutang 2023	04/ESB/BASTB-SRG/XII/2023	BELANJA BARANG DAN JASA
	TOTAL	49.616.455.115,00			

**LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN BLUD
UPTD PENGELOLAAN KKP
KEPULAUAN RAJA AMPAT**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

**BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP
KEP. RAJA AMPAT**

BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP

Kepulauan Raja Ampat

Daftar Isi

Surat Pernyataan

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

- Laporan Realisasi Anggaran	1
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
- Neraca	3
- Laporan Operasional	4
- Laporan Perubahan Ekuitas	5
- Laporan Arus Kas	6

Catatan Atas Laporan Keuangan

- Gambaran Umum	7
- Kebijakan Akuntansi	11
- Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran	16
- Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Keuangan	21

Lampiran

- Analisa Rasio Keuangan
- Daftar Persediaan
- Daftar Aset Tetap

BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP

Kepulauan Raja Ampat

Laporan Auditor Independen

Laporan Auditor Independen

Nomor : 00094/2.0938/AU.5/11/0789-3/1/VI/2025

Kepada Yth.
Kepala
BLUD UPTD Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat
di Raja Ampat – Papua Barat

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat terlampir, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran serta laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap **BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat** berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan etika tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen **BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat** bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen **BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat** bertanggung jawab untuk menilai kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi **BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat** atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan **BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat**.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksiya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal BLUD UPTDP Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen BLUD UPTDP Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BLUD UPTDP Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BLUD UPTDP Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Surakarta, 04 Juni 2025

Kantor Akuntan Publik

"WARTONO & REKAN"



Dr. Wartono, M.Si., Akt., CPA., CA., CGAA

NIAP : AP. 0789

Izin Usaha : KEP-106/KM.1/2013



BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP

Kepulauan Raja Ampat

Surat Pernyataan Direksi



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN
KEPULAUAN RAJA AMPAT
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Waisai – Distrik Waisai Kota – Kabupaten Raja Ampat

SURAT PERNYATAAN KEPALA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP KEP. RAJA AMPAT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafri, S.Pi.
Alamat : Perumahan 200, Kelurahan Bonkawir, Kec. Kota Waisai, Raja Ampat
Jabatan : Kepala

Menyatakan Bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat;
2. Laporan keuangan UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Badan Layanan Umum dan Permendagri.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Waisai, 04 Juni 2025

Kepala,



Syafri, S.Pi.

BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP

Kepulauan Raja Ampat

Laporan Keuangan

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Catt	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN	3				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.1	16.877.000.000	22.529.643.978	133%	17.870.126.668
Pendapatan Hibah	3.2	600.000.000,00	-	-	896.792.000
Pendapatan Usaha Lainnya	3.3	-	85.666.127	#DIV/0!	15.079.448
JUMLAH PENDAPATAN		17.477.000.000	22.615.310.105	129%	18.781.998.117
BELANJA	4				
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	4.1	7.213.200.000	6.818.755.498	95%	4.112.438.542
Belanja Barang dan Jasa	4.2	18.597.287.273	11.963.165.202	64%	6.831.068.513
Jumlah Belanja Operasi		25.810.487.273	18.781.920.700	73%	10.943.507.056
BELANJA MODAL	4.3				
Belanja Tanah		300.000.000	280.000.000	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin		1.908.700.000	1.738.044.200	91%	962.066.000
Belanja Gedung dan Bangunan		380.000.000	908.000.000	239%	153.000.000
Belanja Aset Tetap Lainnya		450.000.000	-	-	311.250.000
Jumlah Belanja Modal		3.038.700.000	2.926.044.200	96%	1.426.316.000
JUMLAH BELANJA		28.849.187.273	21.707.964.900	75%	12.369.823.056
SURPLUS/DEFISIT	5	(11.372.187.273)	907.345.205	-8%	6.412.175.061
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		-	11.389.971.595	-	4.977.796.534
Jumlah Penerimaan		-	11.389.971.595	-	4.977.796.534
PENGELUARAN					
Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
Pembayaran Netto		-	11.389.971.595	-	4.977.796.534
SISA LEBIH/(KURANG)		(11.372.187.273)	12.297.316.800	-108%	11.389.971.595

Lihat Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Waisai, 04 Juni 2025
BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

Syafri, S.Pi.
Kepala

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	11.389.971.595	4.977.796.534
Penggunaan SAL	(11.389.971.595)	(4.977.796.534)
Sub Jumlah	-	-
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	12.297.316.800	11.389.971.595
Sub Jumlah	12.297.316.800	11.389.971.595
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	12.297.316.800	11.389.971.595

Waisai, 04 Juni 2025

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

 Syafri, S.Pi.

Kepala

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
N E R A C A

Per 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan	Catt.	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	6	12.297.316.800	11.389.971.595
Piutang Pelayanan	7	50.000.000	-
Persediaan	8	72.527.000	50.103.000
Jumlah Aset Lancar		<u>12.419.843.800</u>	<u>11.440.074.595</u>
ASET TETAP			
Tanah	9.1	763.500.000	483.500.000
Peralatan dan Mesin	9.2	5.767.673.756	4.029.629.556
Gedung dan Bangunan	9.3	2.869.289.500	1.879.289.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.4	1.621.133.000	1.621.133.000
Jumlah Aset Tetap		<u>11.021.596.256</u>	<u>8.013.552.056</u>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.5	(2.744.790.558)	(2.133.679.609)
Nilai Buku Aset		<u>8.276.805.698</u>	<u>5.879.872.447</u>
ASET LAINNYA			
	10	565.000.000	565.000.000
JUMLAH ASET			
		<u>21.261.649.498</u>	<u>17.884.947.042</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	11	3.000.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka	12	64.280.246	26.015.457
Utang Belanja	13	193.230.000	94.028.000
Beban Yang Masih Harus Dibayar	14	82.000.000	355.750.000
Jumlah Kewajiban		<u>342.510.246</u>	<u>475.793.457</u>
EKUITAS			
Ekuitas	15	20.919.139.252	17.409.153.585
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		<u>21.261.649.498</u>	<u>17.884.947.042</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
 Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Waisai, 04 Juni 2025
BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

 Syafri, S.Pi.
 Kepala

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
LAPORAN OPERASIONAL

Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan	Catt.	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
A. Pendapatan Operasional	16		
- Pendapatan Operasional	16.1	22.490.879.189	17.815.011.211
- Pendapatan Hibah	16.2	-	896.792.000
- Pendapatan Operasional Lainnya	16.3	86.166.127	15.979.448
Jumlah Pendapatan Operasional		22.577.045.316	18.727.782.660
B. Beban Operasional	17		
- Beban Pegawai	17.1	6.813.147.190	4.112.438.542
- Beban Persediaan	17.2	3.147.053.768	1.971.367.016
- Beban Jasa	17.3	2.628.879.572	2.124.676.665
- Beban Pemeliharaan	17.4	1.536.241.418	594.881.985
- Beban Langganan Daya dan Jasa	17.5	523.575.558	387.740.326
- Beban Perjalanan Dinas	17.6	3.807.051.194	2.092.742.521
- Beban Penyusutan, Penyisihan, & Amortisasi	17.7	611.110.949	524.663.838
- Beban Bunga	17.8	-	-
Jumlah Beban Operasional		19.067.059.649	11.808.510.894
Surplus (Defisit) Operasional		3.509.985.667	6.919.271.766
C. Pendapatan (Beban) Non Operasional	18	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) TAHUN BERJALAN		3.509.985.667	6.919.271.766

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
 Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Waisai, 04 Juni 2025
BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

 Syafri, S.Pi.
 Kepala

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Keterangan	Catt	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Ekuitas Awal	15.1	17.409.153.585	6.167.594.137
2.	Surplus / Defisit - LO	15.2	3.509.985.667	6.919.271.766
3.	Koreksi Ekuitas Penghapusan Penyisihan Cadangan Piutang 2022 Penghapusan Utang PAD Retribusi 2019 Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan	15.3	- - -	48.500.000 4.259.147.500 14.640.182
4.	Ekuitas Akhir		20.919.139.252	17.409.153.585

Waisai, 04 Juni 2025
BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

 Syafri, S.Pi.

Kepala

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
LAPORAN ARUS KAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Arus Masuk Kas		
1. Pendapatan Internasional	22.181.424.078	17.495.751.668
2. Pendapatan Domestik	348.219.900	374.375.000
3. Pendapatan Hibah	-	896.792.000
4. Pendapatan Jasa Giro	81.355.828	10.049.279
5. Pendapatan Lain-lain	4.310.299	5.030.169
Jumlah Arus Masuk Kas	22.615.310.105	18.781.998.117
Arus Keluar Kas		
1. Belanja Pegawai	6.818.755.498	4.112.438.542
2. Belanja Barang Jasa	11.963.165.202	6.831.068.513
Jumlah Arus Keluar Kas	18.781.920.700	10.943.507.056
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
1. Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
1. Perolehan Aset Tetap - Tanah	280.000.000	-
2. Perolehan Aset Tetap - Gedung	908.000.000	153.000.000
3. Perolehan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	1.738.044.200	962.066.000
4. Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	311.250.000
Jumlah Arus Keluar Kas	2.926.044.200	1.426.316.000
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
1. Pindah Buku	38.068.863.312	21.053.886.000
Jumlah Arus Masuk Kas	38.068.863.312	21.053.886.000
Arus Keluar Kas		
1. Pindah Buku	38.068.863.312	21.053.886.000
Jumlah Arus Keluar Kas	38.068.863.312	21.053.886.000
IV. ARUS KAS DARI AKTIVITAS ANGGARAN		
Arus Masuk Kas		
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	907.345.205	6.412.175.061
KAS DAN SETARA KAS AWAL	11.389.971.595	4.977.796.534
KAS DAN SETARA KAS AKHIR	12.297.316.800	11.389.971.595

Waisai, 04 Juni 2025

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

 Syafri, S.Pi.

Kepala

BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP

Kepulauan Raja Ampat

Catatan Atas Laporan Keuangan

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. GAMBARAN UMUM

1.1. Sejarah Singkat

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalihkan kewenangan urusan pengelolaan sumber daya laut dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Semenjak diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka seluruh kewenangan konservasi perairan yang selama ini di kelola oleh Bupati melalui Dinas teknis terkait, menjadi tanggungjawab Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat pada tahun 2018. Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat beralih ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima dan penyerahan dokumen P3D (Personil, Peralatan, Pendanaan dan Dokumen) dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. yang ditandatangani oleh Bupati Raja Ampat dan Gubernur Papua Barat No. 900/456/2017, 032/2056/GPB/2017. Di tahun 2023, dengan Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Barat Daya, UPTD Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat diserahterimakan dari Pemerintah Papua Barat ke Pemerintah Papua Barat Daya. Pembentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.

1.2. Dasar Hukum/Landasan Operasional

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundungan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/174/10/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya;
- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal Dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;
- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penerimaan Hibah Untuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat; dan
- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/174/10/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

1.3. Visi, Misi dan Tujuan

A. Visi

Mewujudkan Pengelolaan KKP Raja Ampat secara efektif dan berkelanjutan berbasis ekosistem dan kearifan lokal masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

1. Mengatur penggunaan wilayah laut dan pesisir melalui perencanaan tata ruang dalam melindungi keanekaragaman hayati, sumberdaya perikanan dan ekosistem perairan.
2. Mendukung mata pencaharian dan pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Membangun kapasitas sumber daya manusia dan institusi lokal (adat) untuk secara efektif dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut.
4. Meningkatkan kapasitas jejaring kawasan konservasi antar lokasi kawasan konservasi perairan di Raja Ampat, Bentang Laut Wilayah Kepala Burung maupun Indonesia.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pengelolaan KKP Raja Ampat diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu :
 - Tujuan pengelolaan:
 - Mengelola lima kawasan konservasi (Selat Dampier, Teluk Mayalibit , Ayau-Asia, Kofiau dan Misool serta pulau Fam) efektif, efisien dan adaptif serta fokus untuk mencapai tujuan dan sasaran konservasi;
 - Menerapkan peraturan pemanfaatan ruang pada setiap alokasi peruntukan ruang kawasan konservasi (inti, pemanfaatan dan zona jalur/alur).
 - Tujuan Pengelolaan spesies dan ekosistem (kawasan):
 - Menjamin kelestarian keanekaragaman genetik, spesies, populasi dan ekosistem;
 - Menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan dalam menunjang kegiatan pariwisata pantai, bahari dan selam;
 - Menjamin pemanfaatan jasa lingkungan dalam menunjang kegiatan pariwisata pantai, bahari dan selam.
 - Tujuan sosial, ekonomi dan budaya:
 - Meningkatkan mata pencaharian yang ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dipromosikan pada lima kawasan konservasi;
 - Meningkatkan pengetahuan lokal dan nilai-nilai tradisional yang terintegrasi dengan pendekatan ilmiah dalam sistem pengelolaan lima kawasan konservasi;

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Membangun kapasitas antar *stakeholder* melalui kerja sama kalaboratif yang saling menguntungkan pada berbagai tingkat pemerintahan (kampung, distrik, kabupaten dan provinsi); dan
- Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.

Sasaran Pengelolaan KKP Raja Ampat yaitu sebagai berikut:

- Menerapkan sistem zonasi yang komprehensif dan pengelolaan strategis jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi, dan jika mungkin menghilangkan, ancaman saat ini dan masa mendatang;
- Memastikan keputusan pengelolaan yang adil, setara dan transparan dan mempertimbangkan faktor ekologi dan sosial ekonomi serta tujuan dan sasaran konservasi;
- Memastikan kepatuhan dengan sistem manajemen oleh penjangkauan yang efektif dan penegakan sistem zonasi dan peraturan oleh tim patroli resmi;
- Mendukung dan mempromosikan mata pencarian yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan yang menghasilkan ekosistem laut yang sehat serta ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat meningkat; dan
- Menerapkan dan melestarikan pengetahuan lokal, nilai-nilai dan sistem pengelolaan (seperti sasi) dalam pengelolaan kawasan konservasi.

2. Tujuan dan Sasaran Konservasi

Tujuan Konservasi KKP Raja Ampat diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu :

- Menjamin dan memelihara integritas, fungsi dan produktivitas ekosistem laut dan pesisir Raja Ampat;
- Menjamin kelangsungan hidup spesies dan habitat penting lokal dan global; dan
- Mewujudkan pemanfaatan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat pesisir.

Adapun sasaran kawasan konservasi KKP Raja Ampat yaitu sebagai berikut:

- Memastikan terumbu karang, mangrove, padang lamun, danau air asin dan habitat terkait lainnya serta ekosistem yang beragam, sehat, berfungsi dan produktif;
- Melindungi daerah penting pembibitan ikan seperti muara, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang penting untuk siklus hidup spesies ikan dan invertebrata;
- Melestarikan populasi dan jenis langka atau terancam punah, dan habitat yang dianggap penting untuk pemulihan dan kelangsungan hidup mereka;
- Melindungi semua lokasi pemijahan ikan, terutama dari seluruh spesies laut yang rentan dan sangat-dieksploitasi;
- Melestarikan pengetahuan lokal, budaya, nilai-nilai dan sistem pengelolaan tradisional seperti Sasi, dan menyediakan ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat lokal papua;
- Memastikan semua penggunaan atau ekstraksi sumber daya laut adalah berkelanjutan, dan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap habitat atau fungsi ekosistem;
- Mengurangi dan jika mungkin menghilangkan tekanan dan potensi ancaman saat ini dan dimasa terhadap sumber daya laut dan masyarakat lokal serta industri lokal yang bergantung pada mereka; dan

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Menerapkan praktek dan rekayasa pembangunan pesisir yang baik, untuk memastikan aktivitas didarat tidak berdampak pada lingkungan pesisir dan laut, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

D. Susunan Dewan Pengawas, Pengurus dan Struktur Organisasi

- Susunan struktur BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat sebagai berikut:

Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat	: Syafri, S.Pi
Asisten Teknis	
- Asisten Teknis Biologi & Ekologi	: <i>Vacant</i>
- Asisten Teknis Sosial & Ekonomi	: <i>Vacant</i>
Satuan Pengawas Internal	: <i>Vacant</i>
Pejabat Keuangan	
- Koord. Keuangan	: Indayani Paula R.D
- Asisten Bendahara Pengeluaran	: Yoan Agustin Talapessy
- Asisten Bendahara Pendapatan	: Icah Sapa
Koordinator Komunikasi	: Allan Ramandey
Koordinator Perencanaan dan Program	: Siti Nurdjana Sangadji
Pengurus Barang (Aset & Logistik)	: Yusuf Dimara
Koordinator Monitoring SDAL	: Imanuel Mofu
Kepala Seksi Wilayah I (Kep.Ayau Asia, Tel.Mayalibit, Selat Dampier & Kep. Fam)	: <i>Vacant</i>
- Koord. Area 1 Kep.Ayau Asia	: Aser Burdam
- Koord. Area 2 Teluk Mayalibit	: Yance Mayor
- Koord. Area 3 Selat Dampier	: Musa Yapen
- Koord. Area 6 Kep.Fam	: Feri Dimara
Kepala Seksi Wilayah II (Kep.Misool, Kep Kofiau-Boo & Kep.Misool Utara)	: <i>Vacant</i>
- Koord. Area 4 Kep.Misool	: Balif Wainsaf
- Koord. Area 5 Kofiau-Boo	: Oni Otis Mambrassar
- Kepala Pos Area 7 Kep.Misool Utara	: Judson Herlanus Fatot

E. Tugas Pokok dan Fungsi KKP

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada SKPD Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

Prinsip-prinsip akuntansi penting yang telah diterapkan secara taat dan konsisten dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

2.1 Periode Akuntansi

Periode akuntansi laporan keuangan (tahun buku) BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

2.2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU sebagaimana di amanatkan Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 99 ayat 2. Penyusunan Laporan Keuangan, UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Tahun 2019 telah memperhatikan ketentuan peraturan perundungan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019.
8. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Papua Barat Daya.

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 adalah basis akrual kecuali Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.3 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan UPTD. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (Bank).

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d. 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan, dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2.4 Piutang Usaha

Piutang Usaha merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional UPTD. Piutang usaha diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

2.5 Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional UPTD.

Yang termasuk dalam rekening ini antara lain piutang bunga dan piutang sewa. Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

2.6 Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan antara lain berupa: Persediaan kartu Tarif Layanan Jasa Lingkungan, bahan bakar minyak, barang cetakan dan barang habis pakai lainnya.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode tertentu untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil inventarisasi. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, atau harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga-nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan *Physical Inventory Method*, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (*Stock Opname*) dan ditetapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali dengan jurnal balik (*reversing entry*) menjadi biaya.

Dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan dengan metode *First In First Out* (FIFO/Masuk Pertama Keluar Pertama).

2.7 Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur se secara andal.
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas.
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

-
2. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaanya berpindah dan dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Hak atas tanah dikapitalisasi senilai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hak tersebut. Selanjutnya hak atas tanah diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan surat perijinan.
 4. Pengakuan penambahan nilai aset tetap akibat dikapitalisasi berdasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00.
 5. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/melewati satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 6. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap (*depreciable assets*) harus diaokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya.
 7. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight-line method*), dikelompokkan sebagai berikut:

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Garis Lurus
a) Bukan Bangunan		
- Kelompok I	4 tahun	25%
- Kelompok II	8 tahun	12,5%
- Kelompok III	17 tahun	6,25%
- Kelompok IV	> 16 tahun	5%
b) Bangunan		
- Permanen	20 tahun	5%
- Tidak Permanen	10 tahun	10%

2.8 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap. Aset lain-lain antar lain terdiri dari:

- a. Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- b. Aset Lain-lain
Kelompok aset ini yaitu aset Non Produktif (Aset tetap berupa kendaraan, mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya termasuk pula persediaan bahan/barang instalasi yang rusak, persediaan obat yang kadaluwarsa, yang tidak dapat digunakan lagi karena sebab-sebab yang normal), disajikan sebesar nilai bukunya.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.
2. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
4. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.10 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Usaha, Utang Pihak Ketiga, Utang Pajak, Utang Kepada Kas Umum Daerah, Belanja yang masih harus dibayar, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Jangka Pendek Lainnya, dan Utang Retribusi.

2.11 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban (utang) pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

2.12 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.13 Pendapatan

1. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas operasional selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.
2. Pendapatan diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan, Hibah, Pendapatan APBD, Pendapatan APBN, Pendapatan Usaha Lainnya, Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar dan Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa.
3. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan dari APBD dan APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D. Pendapatan Hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah. Pendapatan Hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh RI
4. Pengukuran pendapatan menggunakan dasar bruto. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan dasar bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

2.14 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Beban Pegawai
- b) Beban Barang dan Jasa
- c) Beban Modal

Beban diakui pada saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2. Terjadinya konsumsi aset

Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional UPTD. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

3. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada UPTD tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang – undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar UPTD.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
3. PENDAPATAN (LRA)	Pendapatan (LRA) merupakan realisasi penerimaan BLUD atas pendapatan dan pembayaran piutang tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai mata anggaran yang telah ditetapkan. Pendapatan (LRA) dicatat dan diakui berdasarkan basis kas (cash basis). Rincian pendapatan (LRA) tahun 2024 sebagai berikut :	Rp. 17.477.000.000	22.615.310.105	18.781.998.117
3.1 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :	Rp. 16.877.000.000	22.529.643.978	17.870.126.668
- Pendapatan Internasional	Rp. 16.424.800.000	22.181.424.078	17.495.751.668	
- Pendapatan Domestik	Rp. 452.200.000	348.219.900	374.375.000	
Jumlah Jasa Layanan Dari Masyarakat	Rp. 16.877.000.000	22.529.643.978	17.870.126.668	
3.2 Pendapatan Hibah	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Hibah per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :	Rp. 600.000.000	-	896.792.000
- Pendapatan Hibah Blue Abadi	Rp. 600.000.000	-	896.792.000	
- Pendapatan Hibah WFF	Rp. -	-	-	
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. 600.000.000	-	896.792.000	
3.3 Pendapatan Usaha Lainnya	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Usaha Lainnya per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :	Rp. -	85.666.127	15.079.448
- Pendapatan Jasa Giro	Rp. -	81.355.828	10.049.279	
- Pendapatan Lainnya	Rp. -	4.310.299	5.030.169	
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	Rp. -	85.666.127	15.079.448	
4. BELANJA	Belanja (LRA) merupakan realisasi pengeluaran BLUD atas pembayaran beban dan hutang tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2024 dan 2023. Belanja (LRA) dicatat dan diakui berdasarkan basis kas (cash basis). Rincian belanja (LRA) tahun 2023 sebagai berikut :	Rp. 28.849.187.273	21.707.964.900	12.369.823.056
4.1 BELANJA PEGAWAI	Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :	Rp. 7.213.200.000	6.818.755.498	4.112.438.542
- Uang Transport Jaga Libur	Rp. -	167.559.250	78.806.555	
- Pembayaran BPJS Tenagakerja	Rp. -	141.050.144	-	
- Pembayaran BPJS Kesehatan	Rp. -	75.961.956	255.869.405	
- Honorarium Pegawai	Rp. 6.760.000.000	4.517.447.627	3.416.763.563	
- Tunjangan Penghasilan	Rp. -	432.900.000	-	
- Uang THR	Rp. -	338.592.515	278.365.744	
Jumlah Dipindahkan	Rp. 6.760.000.000	5.673.511.492	4.029.805.266	

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
4.1 BELANJA PEGAWAI (LANJUTAN)				
Jumlah Pindahan	Rp.	6.760.000.000	5.673.511.492	4.029.805.266
- Biaya Insentif Pegawai	Rp.	50.000.000	-	13.500.000
- Biaya Insentif Pokmaswas	Rp.	403.200.000	123.574.046	-
- Bonus atas Prestasi	Rp.	-	847.935.860	-
- Belanja Parcel Pegawai	Rp.	-	63.945.500	30.681.000
- Biaya Pengembangan SDM	Rp.	-	102.300.000	4.100.000
- Belanja Pegawai Lainnya	Rp.	-	7.488.600	34.352.276
Jumlah Belanja Pegawai	Rp.	7.213.200.000	6.818.755.498	4.112.438.542
4.2 BELANJA BARANG DAN JASA				
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :	Rp.	18.597.287.273	11.963.165.202	6.831.068.513
- Belanja Non Pegawai BLUD Kantor UPTD	Rp.	-	374.666.321	282.680.768
- Belanja ATK Kantor UPTD	Rp.	419.040.000	494.567.000	254.138.616
- Belanja BBM Bensin Ayau	Rp.	397.200.000	197.800.000	170.010.000
- Belanja BBM Bensin Dampier	Rp.	1.215.720.000	565.130.000	369.345.000
- Belanja BBM Bensin Kep. Fam	Rp.	376.800.000	195.524.000	133.435.000
- Belanja BBM Bensin Kantor UPTD	Rp.	376.128.000	643.776.768	297.070.000
- Belanja BBM Bensin Kofiau	Rp.	397.200.000	236.450.000	184.340.000
- Belanja BBM Bensin Mayalibit	Rp.	397.200.000	192.960.000	126.925.000
- Belanja BBM Bensin Misool	Rp.	397.200.000	241.050.000	179.400.000
- Belanja BBM Bensin Misool Utara	Rp.	794.400.000	136.425.000	-
- Belanja Atribut Kantor/Seragam Kantor UPTD	Rp.	100.000.000	166.593.000	132.363.400
- Biaya Jasa - Listrik Kantor UPTD	Rp.	60.000.000	27.393.500	15.368.200
- Biaya Jasa - Telepon/Indihome Kantor UPTD	Rp.	84.000.000	20.001.136	18.387.426
- Biaya Jasa Air Bersih Kantor UPTD	Rp.	-	11.536.284	-
- Biaya Jasa - Pers/Koran/Promo Kantor UPTD	Rp.	615.000.000	465.480.638	353.984.700
- Biaya Jasa - Audit/Konsultasi Kantor UPTD	Rp.	350.000.000	550.850.332	559.703.855
- Biaya Jasa - Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat Kantor UPTD	Rp.	1.459.200.000	789.113.971	606.343.270
- Sewa Kantor/Gedung/Pos Kantor UPTD	Rp.	-	1.500.000	1.500.000
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Ayau	Rp.	48.600.000	29.515.000	11.315.000
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Dampier	Rp.	248.000.000	78.142.200	32.039.200
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Kep. Fam	Rp.	39.600.000	26.047.400	11.106.600
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Kantor UPTD	Rp.	503.600.000	400.819.775	223.753.037
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Kofiau	Rp.	48.600.000	25.525.000	17.075.000
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Mayalibit	Rp.	39.600.000	26.047.400	10.037.600
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Misool	Rp.	48.600.000	38.042.000	18.386.000
- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Misool Utara	Rp.	97.200.000	18.182.000	-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Kantor UPTD	Rp.	2.390.255.678	987.368.724	291.243.820
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat Kantor UPTD	Rp.	2.804.987.273	1.089.015.647	371.249.101
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Papua Barat Kantor UPTD	Rp.	3.289.346.322	1.726.578.870	1.426.746.900
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Ayau	Rp.	4.900.000	6.765.000	20.791.000
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Dampier	Rp.	8.400.000	142.118.500	96.797.600
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Kep. Fam	Rp.	4.900.000	2.915.000	38.060.000
Jumlah Dipindahkan	Rp.	17.015.677.273	9.907.900.466	6.253.596.093

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan		Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
4.2 BELANJA BARANG DAN JASA (LANJUTAN)					
Jumlah Pindahan	Rp.	17.015.677.273	9.907.900.466	6.253.596.093	
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Kantor UPTD (Fayam)	Rp.	312.320.000	169.888.911	196.825.601	
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Kofiau	Rp.	4.900.000	70.000	28.529.000	
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Mayalibit	Rp.	2.690.000	39.051.000	25.216.000	
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Misool	Rp.	4.900.000	19.497.000	7.690.000	
- Belanja Pemeliharaan Speedboat Misool Utara	Rp.	9.800.000	2.126.000	-	
- Belanja Pemeliharaan Pos Ayau	Rp.	52.000.000	1.108.000	-	
- Belanja Pemeliharaan Pos Dampier	Rp.	81.000.000	9.190.000	1.272.000	
- Belanja Pemeliharaan Pos Kep. Fam	Rp.	52.000.000	750.000	2.500.000	
- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD	Rp.	505.000.000	957.070.257	55.627.000	
- Belanja Pemeliharaan Pos Kofiau	Rp.	27.000.000	4.845.000	86.000	
- Belanja Pemeliharaan Pos Mayalibit	Rp.	52.000.000	15.310.000	5.033.000	
- Belanja Pemeliharaan Pos Misool	Rp.	22.000.000	-	2.507.000	
- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ops Kantor UPTD	Rp.	-	465.000	220.000	
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD	Rp.	70.000.000	98.679.950	112.173.639	
- Belanja Pemeliharaan Software KJL Kantor UPTD	Rp.	34.000.000	113.604.900	3.800.000	
- Belanja Pemeliharaan Website Kantor UPTD	Rp.	70.000.000	55.052.446	41.855.745	
- Biaya Administrasi Bank Kantor UPTD	Rp.	-	38.090.823	3.434.155	
- Biaya Sewa Kendaraan/Ongkos Angkut/ By pengiriman Kantor UPTD	Rp.	282.000.000	530.465.449	90.703.280	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.	18.597.287.273	11.963.165.202	6.831.068.513	
	Rp.	3.038.700.000	2.926.044.200	1.426.316.000	
4.3 BELANJA MODAL					
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024.					
Rincian Belanja Modal sebagai berikut :					
Belanja Tanah					
- Tanah Bengkel Perum 200 Waisai	Rp.	-	25.000.000	-	
- Tanah Pos Gam-Yenbekwan	Rp.	-	190.000.000	-	
- Tanah Pos Misool	Rp.	-	65.000.000	-	
Jumlah BM - Tanah	Rp.	300.000.000	280.000.000	-	
Belanja Peralatan dan Mesin					
1. Mebel Kantor UPTD					
- Mebelair	Rp.	-	28.400.000	10.300.000	
- Lemari Arsip	Rp.	-	-	3.400.000	
- Lemari Kamera (Dry Box)	Rp.	-	-	17.300.000	
- Dry Cabinet	Rp.	-	4.995.000	-	
- Lemari Kamera (Dry Box)	Rp.	-	-	6.948.000	
2. Belanja Modal Peralatan Kantor UPTD					
- CCTV	Rp.	-	6.250.000	-	
- Scanner	Rp.	-	-	7.875.000	
- TV	Rp.	-	44.300.000	-	
- GPS Garmin	Rp.	-	-	28.000.000	
- Kamera Sony	Rp.	-	-	18.842.000	
- Camera Underwater	Rp.	-	-	119.020.000	
- Printer Kartu TLPJL	Rp.	-	18.850.000	-	
- Printer Epson	Rp.	-	44.500.000	-	
Jumlah Dipindahkan BM Peralatan Kantor UPTD	Rp.	-	147.295.000	211.685.000	

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
4.3 BELANJA MODAL (LANJUTAN)				
	Jumlah Pindahan BM Peralatan Kantor UPTD'	Rp. -	147.295.000	211.685.000
-	- Kasko Sispandalwas	Rp. -	33.500.000	-
-	- Projector	Rp. -	-	3.000.000
-	- Laptop	Rp. -	170.974.200	104.450.000
-	- Tablet Jaga Laut	Rp. -	106.165.000	-
-	- 2 Mesin 40 pk kap bulat	Rp. -	-	110.000.000
-	- Mesin Tempel 40pk	Rp. -	165.000.000	-
-	- Alat gergaji dan bor	Rp. -	-	5.850.000
-	- Mesin 40 pk kap bulat	Rp. -	-	55.000.000
-	- AC	Rp. -	50.400.000	-
-	- LCD Interactive dan LCD Floor Standing Ads	Rp. -	-	172.050.000
-	- Brankas kecil	Rp. -	-	8.500.000
-	- Speaker Wireless	Rp. -	69.750.000	-
-	- Money counter	Rp. -	-	6.676.000
-	- Divecom	Rp. -	21.450.000	-
-	- Handphone	Rp. -	6.798.000	7.248.000
-	- Starlink	Rp. -	22.770.000	-
-	- Fins	Rp. -	4.798.000	-
-	- Mesin Babat	Rp. -	2.750.000	-
-	- Infocus	Rp. -	6.300.000	-
-	- Solar Panel	Rp. -	121.657.000	-
-	- Mesin 40 pk kap bulat	Rp. -	-	110.000.000
-	- Somel dan Bor	Rp. -	-	5.850.000
-	- Radio	Rp. -	30.000.000	47.147.000
-	- Gimbal HP	Rp. -	1.243.000	-
-	- Gimbal Kamera	Rp. -	3.520.000	-
-	- GPS	Rp. -	14.000.000	7.000.000
-	- HT dan Radio Marine	Rp. -	3.950.000	1.800.000
-	- Camera Underwater	Rp. -	9.499.000	105.810.000
-	- Housing Camera Underwater	Rp. -	5.499.000	-
-	- Lensa Kamera Sony	Rp. -	20.340.000	-
-	- Mooring Buoy	Rp. -	716.786.000	-
-	- Mesin Pompa Air	Rp. -	3.600.000	-
	Jumlah BM - Peralatan dan Mesin	Rp. 1.908.700.000	1.738.044.200	962.066.000
Belanja Gedung dan Bangunan				
1.	Belanja Modal Bangunan Kantor UPTD Raja Ampat Pos Pandalwas	Rp. -	-	153.000.000
2.	Belanja Modal Bangunan Kantor BLUD Kantor UPTD			
-	- Pos Jaga Laut Ayau	Rp. -	369.000.000	-
-	- Pos Jaga Laut Misool	Rp. -	369.000.000	-
-	- Gazebo Kantor	Rp. -	170.000.000	-
	Jumlah BM - Gedung dan Bangunan	Rp. 380.000.000	908.000.000	153.000.000
Aset Lainnya				
-	Belanja Aplikasi SIJALA	Rp. -	-	311.250.000
	Jumlah BM - Aset Lainnya	Rp. 450.000.000	-	311.250.000
	Jumlah Belanja Modal	Rp. 3.038.700.000	2.926.044.200	1.426.316.000

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
5. SURPLUS/(DEFISIT) LRA		Rp. (11.372.187.273)	907.345.205	6.412.175.061
Jumlah tersebut merupakan selisih antara Total Pendapatan dikurangi Total Belanja per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :				
- Pendapatan	Rp. 17.477.000.000	22.615.310.105	18.781.998.117	
- Belanja	Rp. 28.849.187.273	21.707.964.900	12.369.823.056	
Surplus/(Defisit)	Rp. (11.372.187.273)	907.345.205	6.412.175.061	

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	K e t e r a n g a n	Tahun 2024		Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
		(Diaudit)	Rp.	
6 KAS DAN SETARA KAS		12.297.316.800		11.389.971.595
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai				
- Kas				
- Kas di BLUD Penerimaan		Rp.	-	-
- Kas di BLUD Pengeluaran		Rp.	53.413.990	20.983.047
Jumlah Kas		Rp.	53.413.990	20.983.047
- Setara Kas				
Bank				
- Bank BNI TLPJL No. Rek 87-88-7777-86		Rp.	4.505.976.568	7.137.101.707
- Bank Mandiri No Rek. 160-00-5557666-0 (BAF)		Rp.	1.004.066	1.004.066
- Bank Papua No. Rek 2020-1050-20007		Rp.	518.614.023	368.400.979
- Bank BNI Hibah No. Rek 2244661232 (BAF)		Rp.	915.890.602	907.973.021
- Bank Mandiri TLPJL No. Rek 160-00-4445558-8		Rp.	6.182.221.692	2.834.312.916
- Bank BNI Hibah No. Rek 1105202037 (WFF)		Rp.	120.195.859,00	120.195.859
Jumlah Bank		Rp.	12.243.902.810	11.368.988.548
Jumlah Setara Kas		Rp.	12.243.902.810	11.368.988.548
Jumlah Kas dan Setara Kas		Rp.	12.297.316.800	11.389.971.595

Penjelasan rinci Kas dan Setara Kas :

- Kas Penerimaan BLUD, merupakan pemilahan pemegang kas yang bertanggungjawab terhadap pencatatan penerimaan kas UPTDP KKP Kep. Raja Ampat. Kas Pengeluaran BLUD, merupakan pemilahan pemegang kas yang bertanggungjawab terhadap pencatatan semua pengeluaran kas UPTDP KKP Kep. Raja Ampat .
- Rekening Bank BNI TLPJL No. 87-88-7777-86 digunakan untuk transaksi penerimaan jasa layanan BLUD.
- Rekening Bank Mandiri No. 160-00-5557666-0 digunakan untuk penerimaan hibah.
- Rekening Bank Papua No. 2020-1050-20007 digunakan untuk transaksi pengeluaran BLUD.
- Rekening Bank BNI No. 2244661232 digunakan untuk penerimaan hibah.
- Rekening Bank Mandiri No. 160-00-4445558-8 digunakan untuk penerimaan jasa layanan BLUD.
- Rekening bank BNI No. 1105202037 digunakan untuk penerimaan hibah.

7 PIUTANG	Rp.	50.000.000	-
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
- Pinjaman Dana Dinas P2KP	Rp.	50.000.000	-
Jumlah Piutang	Rp.	50.000.000	-

Piutang ini merupakan piutang pinjaman dana dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 05 Agustus tahun 2024 dengan nomor bukti 21-05/08/24/03 yang digunakan untuk suatu kegiatan mendesak akan tetapi dana dari provinsi belum juga cair sehingga Dinas P2KP meminjam pada BLUD UPTDP KKP Kep. Raja Ampat. Pada tanggal 14 Desember 2025 pihak BLUD UPTDP KKP Kep. Raja Ampat mengeluarkan surat dengan Nomor 523.1/174/KKP-RA-XII-2024 tentang Penagihan Piutang akan tetapi hingga saat ini belum ada respon dari pihak terkait.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
8 PERSEDIAAN		Rp. 72.527.000	50.103.000
Persediaan ini merupakan barang berwujud yang akan habis pakai atau terjual namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai atau terjual. Jumlah tersebut merupakan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.			
<i>Rincian Persediaan sebagai berikut :</i>			
- Persediaan Alat Tulis Kantor/Kartu Jasa Lingkungan	Rp. 58.952.000	37.608.000	
- Persediaan Bahan Bakar Minyak	Rp. 13.575.000	12.495.000	
Jumlah Persediaan	Rp. 72.527.000	50.103.000	
Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendukung kegiatan operasional UPTDP KKP Kep. Raja Ampat.			
Persediaan disajikan sebesar :			
<ul style="list-style-type: none"> - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian ; - Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ; - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan. 			
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.			
<i>Rincian lebih lanjut lihat lampiran Daftar Persediaan</i>			
9 ASET TETAP		Rp. 8.276.805.698	5.879.872.447
Jumlah tersebut merupakan Nilai Aset Tetap yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
9.1 Tanah	Rp. 763.500.000	483.500.000	
9.2 Peralatan dan Mesin			
- Peralatan dan Mesin	Rp. 1.964.733.056	1.964.733.056	
- Peralatan dan Mesin Ayau	Rp. 2.200.000	2.200.000	
- Peralatan dan Mesin Kantor BLUD	Rp. 3.797.328.700	2.059.284.500	
- Peralatan dan Mesin Mayalibit	Rp. 3.412.000	3.412.000	
9.3 Gedung dan Bangunan			
- Gedung dan Bangunan Kantor BLUD	Rp. 2.594.789.500	1.604.789.500	
- Gedung dan Bangunan Misool	Rp. 274.500.000	274.500.000	
9.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi			
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 1.621.133.000	1.621.133.000	
Harga Perolehan Aset Tetap	Rp. 11.021.596.256	8.013.552.056	
9.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp. (2.744.790.558)	(2.133.679.609)	
Nilai Buku Aset Tetap	Rp. 8.276.805.698	5.879.872.447	

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
-----	------------	-------------------------	-----------------------------------

9 ASET TETAP (LANJUTAN)

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan pemekaran yang membuat BLUD UPTDP KKP Kep. Raja Ampat pembentukan kembali sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pada tanggal 29 September 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat pada dinas pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan. Berdasarkan Pergub tersebut, sejak tahun 2023 BPKAD Papua Barat sudah tidak memasukkan aset BLUD dikarenakan sudah P3D ke BPKAD Papua Barat Daya. Sehingga BLUD mengeluarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset pada tanggal 10 September 2024 yang menyatakan BLUD melaksanakan rekonsiliasi Aset serta perhitungan beban penyusutan Aset TA 2023 secara manual dikarenakan belum ada hasil rekonsiliasi Aset bersama BPKAD Papua Barat Daya. Untuk TA 2024 juga dilaksanakan rekonsiliasi secara manual oleh BLUD dikarenakan masih belum ada hasil rekonsiliasi juga hingga saat ini oleh BPKAD Papua Barat Daya.

Rincian lebih lanjut lihat lampiran Daftar Aset Tetap

10 ASET LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Aplikasi SIA Keuangan	Rp. 150.000.000	150.000.000
- Aplikasi Sijala	Rp. 415.000.000	415.000.000
Bln: Nilai Buku Aset Lainnya	Rp. 565.000.000	565.000.000

11 UTANG USAHA

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Usaha yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Logistik	Rp. 3.000.000	-
Jumlah Utang Usaha	Rp. 3.000.000	-

Utang Usaha sebesar Rp 3.000.000,- merupakan utang logistik kepada Bama di Pos Ayau per bulan Desember 2024 yang sudah terbayarkan melalui bank Papua pada tanggal 07 Februari 2025 kepada Gehasi Mambrisauw, S.Pd. Dengan nomor rekening 2020205004969 sekaligus pembayaran logistik untuk TA 2025.

12 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023.

Rp. 64.280.246	26.015.457
----------------	------------

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
12 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (LANJUTAN)			
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut :			
Pendapatan di Muka Deposit KJL			
- LOB	Rp. 30.000.000		-
- Biodeversity	Rp. -		-
- Papua Paradise	Rp. 13.800.000		26.015.457
- Operator Lainnya	Rp. 20.480.246		-
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. 64.280.246		26.015.457
13 UTANG BELANJA			
Rp. 193.230.000 94.028.000			
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
13.1 Utang Bahan Bakar Minyak			
- Utang BBM CV Jaya Baru Mandiri	Rp. 152.120.000		94.028.000
- Utang BBM Pangkalan Rasyama	Rp. 16.400.000		-
- Utang BBM Pangkalan Minyak Berdikari	Rp. 24.710.000		-
13.2 Utang Retribusi 2019	Rp. -		-
Jumlah Utang Belanja	Rp. 193.230.000		94.028.000
14 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
Rp. 82.000.000 355.750.000			
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban yang Masih Harus Dibayar yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
14.1 Biaya Operasional			
- Biaya Sewa Kendaraan Operasional	Rp. -		132.000.000
- Aplikasi SIJALA	Rp. -		103.750.000
- Biaya Konsultan Inisiasi Ranpergub	Rp. -		120.000.000
- Pembangunan Pos Ayau & Pos Misool (Termin 3)	Rp. 82.000.000		-
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	Rp. 82.000.000		355.750.000
15 EKUITAS			
Rp. 20.919.139.252 17.409.153.585			
Jumlah tersebut merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
15.1 Ekuitas Awal	Rp. 17.409.153.585		6.167.594.137
15.2 Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	Rp. 3.509.985.667		6.919.271.766
15.3 Koreksi Ekuitas	Rp. -		
- Penghapusan Penyisihan Cadangan Piutang 2022	Rp. -		48.500.000
- Penghapusan Utang PAD Retribusi 2019	Rp. -		4.259.147.500
- Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan	Rp. -		14.640.182
Ekuitas Akhir	Rp. 20.919.139.252		17.409.153.585

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
16 PENDAPATAN		Rp. 22.577.045.316	18.727.782.660
Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
16.1 Pendapatan Operasional		Rp. 22.490.879.189	17.815.011.211
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional yang diperoleh selama periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
- Pendapatan Internasional	Rp. 22.144.384.289	17.434.536.211	
- Pendapatan Domestik	Rp. 346.494.900	380.475.000	
Jumlah Pendapatan Operasional	Rp. 22.490.879.189	17.815.011.211	
16.2 Pendapatan Hibah		Rp. -	896.792.000
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hibah yang diperoleh selama periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
- Pendapatan Hibah Blue Abadi	Rp. -	896.792.000	
- Pendapatan Hibah WFF	Rp. -	-	
Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. -	896.792.000	
16.3 Pendapatan Operasional Lainnya		Rp. 86.166.127	15.979.448
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Operasional Lainnya yang diperoleh selama periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
- Pendapatan Sewa	Rp. -	-	
- Pendapatan Jasa Giro	Rp. 81.355.828	10.049.279	
- Pendapatan Lain-lain	Rp. 4.810.299	5.930.169	
Jumlah Pendapatan Lainnya	Rp. 86.166.127	15.979.448	

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 tahun 2019 tentang tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan pada BLUD unit pelaksana teknis daerah kep. Raja Ampat, untuk harga tiket masuk terdiri dari wisatawan asing sebesar Rp 700.000 sedangkan wisatawan domestik sebesar Rp 425.000.

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024		Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
		Rp.	19.067.059.649	
17 BEBAN OPERASIONAL				11.808.510.894
Jumlah tersebut merupakan Beban Operasional yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat selama periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :				
17.1 Beban Pegawai				
- Beban Pegawai BLUD UPTD KKPD Raja Ampat	Rp.		-	-
- Beban Pegawai BLUD Kantor UPTD	Rp.	6.813.147.190		4.112.438.542
Jumlah Beban Pegawai	Rp.	6.813.147.190		4.112.438.542
17.2 Beban Persediaan				
- Beban ATK Kantor UPTD	Rp.	473.223.000		281.555.616
- Beban BBM Bensin Ayau	Rp.	214.200.000		170.010.000
- Beban BBM Bensin Dampier	Rp.	600.720.000		382.845.000
- Beban BBM Bensin Kep. Fam	Rp.	199.224.000		119.935.000
- Beban BBM Bensin Kantor UPTD	Rp.	658.498.768		393.993.000
- Beban BBM Bensin Kofiau	Rp.	236.450.000		184.340.000
- Beban BBM Bensin Mayalibit	Rp.	195.960.000		126.925.000
- Beban BBM Bensin Misool	Rp.	265.760.000		179.400.000
- Beban BBM Bensin Misool Utara	Rp.	136.425.000		-
- Beban Atribut Kantor	Rp.	166.593.000		132.363.400
Jumlah Beban Persediaan	Rp.	3.147.053.768		1.971.367.016
17.3 Beban Jasa				
- Beban Non Pegawai BLUP UPTD KKP Raja Ampat	Rp.	324.666.321		282.680.768
- Beban Jasa - Audit/Konsultasi	Rp.	430.850.332		679.703.855
- Beban Jasa - Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat	Rp.	789.113.971		606.343.270
- Sewa Kantor/Gedung/Pos	Rp.	1.500.000		1.500.000
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Ayau	Rp.	32.515.000		12.365.000
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Dampier	Rp.	78.142.200		31.773.800
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Kep. Fam	Rp.	26.047.400		10.456.600
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Kantor UPTD	Rp.	400.691.676		233.292.337
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Kofiau	Rp.	25.525.000		10.050.000
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Mayalibit	Rp.	26.047.400		16.987.600
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Misool	Rp.	38.042.000		13.386.000
- Beban Makan dan Minum Pertemuan Misool Utara	Rp.	18.182.000		-
- Beban Sewa Kendaraan/Ongkos Angkut/By Pengiriman	Rp.	399.465.449		222.703.280
- Beban Administrasi Bank	Rp.	38.090.823		3.434.155
Jumlah Beban Jasa	Rp.	2.628.879.572		2.124.676.665

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
17 BEBAN OPERASIONAL (LANJUTAN)			
17.4 Beban Pemeliharaan			
- Beban Pemeliharaan Speedboat Ayau	Rp.	6.765.000	20.791.000
- Beban Pemeliharaan Speedboat Dampier	Rp.	142.118.500	94.013.000
- Beban Pemeliharaan Kep. Fam	Rp.	2.915.000	38.810.000
- Beban Pemeliharaan Speedboat Kantor UPTD (Fayam)	Rp.	169.888.911	198.161.601
- Beban Pemeliharaan Speedboat Kofiau	Rp.	70.000	28.529.000
- Beban Pemeliharaan Teluk Mayalibit	Rp.	33.351.000	25.216.000
- Beban Pemeliharaan Speedboat Misool	Rp.	25.197.000	7.690.000
- Beban Pemeliharaan Speedboat Misool Utara	Rp.	2.126.000	-
- Beban Pemeliharaan Pos Ayau	Rp.	1.108.000	-
- Beban Pemeliharaan Pos Dampier	Rp.	9.190.000	1.272.000
- Beban Pemeliharaan Pos Kep. Fam	Rp.	750.000	-
- Beban Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD	Rp.	958.794.711	53.424.000
- Beban Pemeliharaan Pos Kofiau	Rp.	4.845.000	-
- Beban Pemeliharaan Pos Mayalibit	Rp.	15.310.000	569.000
- Beban Pemeliharaan Pos Misool	Rp.	-	2.507.000
- Beban Pemeliharaan Kendaraan OPS Kantor UPTD	Rp.	465.000	220.000
- Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor BLUD UPTD	Rp.	98.439.950	114.023.639
- Beban Pemeliharaan Software KJL Kantor BLUD UPTD	Rp.	9.854.900	3.800.000
- Beban Pemeliharaan Website Kantor BLUD UPTD	Rp.	55.052.446	5.855.745
Jumlah Beban Pemeliharaan	Rp.	1.536.241.418	594.881.985
17.5 Beban Langganan Daya dan Jasa			
- Beban Jasa - Listrik Kantor BLUD	Rp.	27.393.500	15.368.200
- Beban Jasa - Telepon/Indihome Kantor UPTD	Rp.	20.001.136	18.387.426
- Beban Jasa - Air Bersih Kantor UPTD	Rp.	11.536.284	-
- Beban Jasa - Pers/Koran/Promo Kantor UPTD	Rp.	464.644.638	353.984.700
Jumlah Beban Langganan Daya & Jasa	Rp.	523.575.558	387.740.326
17.6 Beban Perjalanan Dinas			
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	Rp.	986.368.724	291.865.820
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat	Rp.	1.089.015.647	369.009.801
- Beban Perjalanan Dinas Luar Provinsi Papua Barat	Rp.	1.731.666.823	1.431.866.900
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	Rp.	3.807.051.194	2.092.742.521

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

No.	Keterangan	Tahun 2024 (Diaudit)	Tahun 2023 (Disajikan Kembali)
17 BEBAN OPERASIONAL (LANJUTAN)			
17.7 Beban Penyusutan, Penyisihan dan Amortisasi			
- Beban Penyusutan Aset	Rp.	611.110.949	524.663.838
- Beban Penyisihan	Rp.	-	-
Jumlah Beban PPA	Rp.	611.110.949	524.663.838
17.8 Beban Bunga			
- Beban Bunga	Rp.	-	-
Jumlah Beban Bunga	Rp.	-	-
18 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan (Beban) Non Operasional yang diperoleh UPTDP KKP Kep. Raja Ampat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :			
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lain	Rp.	-	-
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lain	Rp.	-	-
Jumlah Non Operasional	Rp.	-	-

BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP

Kepulauan Raja Ampat

Lampiran Laporan Keuangan

Dalam Rupiah

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
ANALISA RASIO KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Rumus	Prosentase
Rasio Struktur Pendapatan		
Proporsi Penerimaan BLUD (Operasional)	$\frac{\text{Total Pendapatan BLUD}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{22.490.879,189}{22.577.045,316}$	= 99,62%
Proporsi Pendapatan Hibah	$\frac{\text{Total Pendapatan Hibah}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{-}{22.577.045,316}$	= 0,00%
Proporsi Pendapatan Operasional Lainnya	$\frac{\text{Total Pendapatan Lainnya}}{\text{Total Pendapatan}} = \frac{86.166.126,91}{22.577.045,316}$	= 0,38%
Rasio Beban		
Rasio Beban Pegawai	$\frac{\text{Jumlah Beban Pegawai}}{\text{Total Beban}} = \frac{6.813.147,190}{19.067.059,649}$	= 35,73%
Rasio Beban Persediaan	$\frac{\text{Jumlah Beban Persediaan}}{\text{Total Beban}} = \frac{3.147.053,768}{19.067.059,649}$	= 16,51%
Rasio Beban Jasa	$\frac{\text{Jumlah Beban Jasa}}{\text{Total Beban}} = \frac{2.628.879,572}{19.067.059,649}$	= 13,79%
Rasio Beban Pemeliharaan	$\frac{\text{Jumlah Beban Pemeliharaan}}{\text{Total Beban}} = \frac{1.536.241,418}{19.067.059,649}$	= 8,06%
Rasio Beban Langganan Daya dan Jasa	$\frac{\text{Jumlah Beban Langganan Daya & Jasa}}{\text{Total Beban}} = \frac{523.575,558}{19.067.059,649}$	= 2,75%
Rasio Beban Perjalanan Dinas	$\frac{\text{Jumlah Beban Perjalanan Dinas}}{\text{Total Beban}} = \frac{3.807.051,194}{19.067.059,649}$	= 19,97%
Rasio Beban Penyusutan dan Penyisihan	$\frac{\text{Jumlah Beban Penyusutan}}{\text{Total Beban}} = \frac{611.110,949}{19.067.059,649}$	= 3,21%
Rasio Beban Non Operasional	$\frac{\text{Jumlah Beban Non Operasional}}{\text{Total Beban}} = \frac{-}{19.067.059,649}$	= 0,00%
Rasio Sumber dan Penggunaan		
Rasio Pendapatan/Beban	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Beban}} = \frac{22.577.045,316}{19.067.059,649}$	= 118,41%
Rasio Pendapatan Operasional/Total Beban	$\frac{\text{Total Pendapatan Operasional}}{\text{Total Beban}} = \frac{22.490.879,189}{19.067.059,649}$	= 117,96%
Rasio Hibah/Total Beban	$\frac{\text{Total Hibah}}{\text{Total Beban}} = \frac{-}{19.067.059,649}$	= 0,00%
Rasio Pendapatan Lainnya/Total Beban	$\frac{\text{Total Pendapatan Lainnya}}{\text{Total Beban}} = \frac{86.166.127}{19.067.059,649}$	= 0,45%

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
ANALISA RASIO KEUANGAN

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Rumus	Prosentase
Rasio Kemampuan Membayar Hutang		
Cash Ratio	Kas = 12.297.316.800 Hutang Jangka Pendek 342.510.246	= 3590,35%
Rasio Lancar	Aset Lancar = 12.419.843.800 Hutang Jangka Pendek 342.510.246	= 3626,12%
Rasio Solvabilitas	Total Aset = 21.261.649.498 Total Hutang 342.510.246	= 6208%
Rasio Aktivitas & Rentabilitas		
Aset Turnover	Total Pendapatan = 22.577.045.316 Total Aset 21.261.649.498	= 106,19%
Fixed Asset Turn Over	Total Pendapatan = 22.577.045.316 Total Aset Tetap 8.276.805.698	= 272,77%
Asset Turn For Jasa Layanan	Total Penerimaan Jasa Layanan = 22.490.879.189 Total Aset 21.261.649.498	= 105,78%
Surplus/Defisit Anggaran	Surplus (Defisit) = 3.509.985.667 Total Pendapatan 22.577.045.316	= 15,55%

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
DAFTAR PERSEDIAAN

Per 31 Desember 2024

(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

No.	Keterangan	Sisa	Harga	Jumlah
PERSEDIAAN BBM				
1	Pertamax Murni	-	15.000	-
2	Oli	-	70.000	-
3	Pertalite Campur	905	15.000	13.575.000
4	Minyak Tanah	-	10.000	-
Jumlah Persediaan BBM				13.575.000
PERSEDIAAN KARTU JASA LINGKUNGAN				
1	TLPJL Asing	7.132	8.000	57.056.000
2	TLPJL Domestik	237	8.000	1.896.000
Jumlah Persediaan Kartu TLPJL				58.952.000

BLUD UPTDP KKP KEP RAJA AMPAT
REKAPITULASI DAFTAR ASET TETAP

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Nilai Buku Tahun 2024
				Semester I	Semester II		
I.	Tanah	763.500.000	-	-	-	-	763.500.000
II.	Peralatan dan Mesin	5.767.673.756	1.973.947.078	225.772.880	333.504.042	2.533.224.000	3.234.449.756
III.	Gedung dan Bangunan	2.797.289.500	130.243.990	20.321.179	25.012.848	175.578.017	2.621.711.483
IV.	Gedung dan Bangunan	72.000.000	8.212.500	900.000	900.000	10.012.500	61.987.500
V.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.621.133.000	21.276.041	2.350.000	2.350.000	25.976.041	1.595.156.959
JUMLAH ASET TETAP		11.021.596.256	2.133.679.609	249.344.059	361.766.890	2.744.790.558	8.276.805.698



NEHAF SAU BONOUT SAU

MEMBANGUN
DENGAN HATI
MENYATUKAN
DALAM KASIH

2024